



Sosiologi Pendidikan

Dr. Abdul Rahmat, M.Pd

DAFTAR ISI

BAB I

HAKIKAT SEKOLAH DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN

- A. Makna Sekolah ... 1
- B. Sekolah dan Investasi Sosial ... 2

BAB II

TENDENSI DAN TRADISI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN

- A. Perkembangan Sosiologi sebagai Ilmu ... 7
- B. Lahirnya Sosiologi pendidikan ... 13
- C. Kedudukan dan Perkembangan Sosiologi Pendidikan ... 15.
- D. Ruang Lingkup Sosiologi Pendidikan ... 17

BAB III

LANDASAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN

- A. Norma Kehidupan ... 21
- B. Konsep Sosial Budaya Pendidikan ... 22
- B. Transmisi Sosial Budaya Pendidikan ... 25
- C. Hubungan Sosial Budaya dengan Pendidikan ... 26
- D. Perkembangan Sosial Budaya dalam Pembangunan ... 30

BAB IV

TUJUAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN

- A. Kewajiban Sosiologi Pendidikan ... 35
- B. Keberfungsian Sosiologi Pendidikan ... 38

**BAB
V**

LINGKUNGAN SOSIAL PENDIDIKAN

- A. Keluarga Sebagai Lembaga Pendidikan ... 43
- B. Sekolah Sebagai Institusi Sosial ... 47
- C. Masyarakat Media Transformasi Sosial ... 53
- D. Prospek Pengembangan ... 61

**BAB
VI**

SEKOLAH DAN INTERAKSI SOSIAL

- A. Pengertian Interaksi Sosial ... 65
- B. Syarat-Syarat Interaksi Sosial ... 68
- C. Bentuk-bentuk interaksi sosial ... 70

**BAB
VII**

**STRUKTUR DAN STRATIFIKASI
SOSIAL SEKOLAH**

- A. Konsep Stratifikasi Sosial ... 73
- B. Sistem Stratifikasi Sosial ... 75

**BAB
VIII**

SEKOLAH DAN KELOMPOK SOSIAL

- A. Kelompok Sosial ... 79
- B. Klasifikasi Kelompok Sosial ... 82
- C. Kelompok Formal Dan Kelompok Informal ... 85

**BAB
IX**

BUDAYA SEKOLAH

- A. Pengertian Budaya Sekolah ... 87
- B. Pembentukan dan Pengembangan Budaya Sekolah ... 90
- C. Budaya Mikro Sekolah ... 92

**BAB
X**

**SOSIALISASI DAN PENYESUAIAN DIRI DI
SEKOLAH**

- A. Pengaruh Iklim Sosial Terhadap Sosialisasi Anak ... 99
- B. Persaingan Dan Kerjasama ... 102
- C. Membudayakan Kepemimpinan Etnopedagogi Sekolah ... 104

**BAB
XI**

**HUBUNGAN SEKOLAH DAN
MASYARAKAT**

- A. Pengertian Humas Sekolah ... 111
- B. Tujuan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat ... 114
- C. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat ... 116
- D. Sekolah sebagai Organisasi ... 119

**BAB
XII**

**DIMENSI SIKAP DAN PRILAKU
BELAJAR ORANG DEWASA**

- A. Mengukur Kedewasaan ... 127
- B. Dimensi Sikap dan Perilaku Dewasa ... 131

DAFTAR ISI..... 143

BAB I

HAKIKAT SEKOLAH DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN

A. Makna Sekolah

Disadari atau tidak, salah satu alat keberhasilan seseorang bersekolah adalah sejauh mana dia mampu membawa dirinya pada status sosial yang tinggi di masyarakat. Indikasinya adalah apakah seseorang itu bekerja dengan berpenampilan elegan (berdasi, pake sepatu mengkilap, dan membawa tas kantor) atau tidak, dan apakah seseorang tersebut bisa kaya dengan pekerjaannya? Kalau seseorang yang telah menempuh jenjang pendidikan (SLTP, SLTA, D1, D2, D3, S1, S2, dan S3) lulus dan setelah itu menganggur maka dia telah gagal bersekolah. Hal semacam inilah yang sering ditemui di masyarakat kita.

Mencermati hal diatas, apakah memang praktek-praktek pendidikan yang selama ini dijalani ada kesalahan proses?, mengapa dunia pendidikan belum bisa memberikan pengaruh pencerahan ditingkatan masyarakat, lantas apa yang selama ini dilakukannya oleh dunia pendidikan kita? walaupun yang diopinikan masyarakat itu adalah kesalahan berpikir, mengapa kualitas pendidikan di Indonesia tidak lebih baik dari negara lainnya, bukankah setiap hari upaya perbaikan pendidikan terus dilakukan mulai dari seminar sampai dengan pembuatan undang-undang sistem pendidikan nasional? Atau inilah yang dimaksud oleh Ivan Ilich bahwa "SEKOLAH itu lebih berbahaya daripada nuklir." Jelasnya pendidikan (sekolah) bukanlah suatu proses untuk mempersiapkan manusia-manusia penghuni pabrik, berpenampilan elegan apalagi

hanya sebatas regenerasi pegawai negeri sipil (PNS), tapi lebih dari itu adalah pendidikan merupakan upaya bagaimana memanusiakan manusia. Tentunya proses tersebut bukan hal yang sederhana butuh komitmen yang kuat dari setiap komponen pendidikan khususnya pemerintah bagaimana memposisikan pendidikan sebagai investasi jangka panjang dengan produk manusia-manusia masa depan yang hadal, kritis dan bertanggung jawab. Kalau dunia pendidikan hanya diposisikan sebagai pelengkap dunia industri maka bisa jadi manusia-manusia Indonesia kedepan adalah manusia yang kapitalistik.

Beberapa hal di atas setidaknya menjadi renungan bagi dunia pendidikan kita bahwa pendidikan bukanlah sesederhana dengan hanya mengupulkan orang lantas diceramahi setelah itu pulang kerumah mengerjakan tugas besoknya kesekolah lagi sampai kelulusan dicapainya (sekolah berbasis jalan tol), kalau aktivitas sekolah hanya monoton semacam ini maka pilihan untuk bersekolah merupakan pilihan yang sangat merugikan akan tetapi kalau proses yang dijalankannya tidak seperti sekolah jalan tol maka pilihan untuk beinvestasi di dunia pendidikan dengan jalan menyekolahkan anak-anak kita merupakan pilihan yang sangat cerdas. Oleh sebab itu sudah saatnya dunia pendidikan kita mereformasi diri secara serius khususnya bagaimana pembelajaran di sekolah itu bisa dijalankan melalui prinsip penyadaran kritis sehingga melalui kekuatan kesadaran kritis bisa menganalisis, mengaitkan bahkan menyimpulkan bahwa persoalan kemiskinan, pengangguran, dan lainnya merupakan persoalan system bukan karena persoalan jenjang sekolah. Inilah yang seharusnya menjadi muatan penting untuk diinternalisasikan disetiap diri siswa (Mof, Yahya. 1997:98).

B. Sekolah dan Investasi Sosial

Kata sekolah berasal dari Bahasa Latin: *skhole, scola, scolae* atau *skhola* yang memiliki arti: waktu luang atau waktu senggang, dimana ketika itu sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah-tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan waktu untuk menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang itu adalah mempelajari cara berhitung, cara membaca huruf dan mengenal tentang moral (budi pekerti) dan estetika (seni). Untuk mendampingi dalam kegiatan *scola* anak-anak didampingi oleh orang ahli dan mengerti tentang psikologi anak, sehingga memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada anak untuk menciptakan sendiri dunianya melalui berbagai pelajaran di atas. Saat ini, kata sekolah berubah arti menjadi bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala

Sekolah. Kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah. Jumlah wakil kepala sekolah di setiap sekolah berbeda, tergantung dengan kebutuhannya. Bangunan sekolah disusun meninggi untuk memanfaatkan tanah yang tersedia dan dapat diisi dengan fasilitas yang lain.

Ketersediaan sarana dalam suatu sekolah mempunyai peran penting dalam terlaksananya proses pendidikan. Ukuran dan jenis sekolah bervariasi tergantung dari sumber daya dan tujuan penyelenggara pendidikan. Sebuah sekolah mungkin sangat sederhana di mana sebuah lokasi tempat bertemu seorang pengajar dan beberapa peserta didik, atau mungkin, sebuah kompleks bangunan besar dengan ratusan ruang dengan puluhan ribu tenaga kependidikan dan peserta didiknya. Berikut ini adalah sarana prasarana yang sering ditemui pada institusi yang ada di Indonesia, berdasarkan kegunaannya.

Menurut Vaizey, John. (1987:31), proses-proses pendidikan yang sesungguhnya adalah interaksi kegiatan yang berlangsung di ruang kelas. Untuk keperluan tersebut pembahasan mengenai kegiatan kelas menempati sub-topik tersendiri dalam susunan kajian topik ini. Dari sudut sosiologi beberapa pendekatan telah digunakan sebagai alat analisis untuk mengamati proses- proses yang terjadi di ruang kelas. Sedikitnya terdapat tiga alasan untuk memprioritaskan sekolah sebagai investasi jangka panjang. *Pertama*, sekolah adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Pada praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari lima fungsi pendidikan adalah fungsi teknis-ekonomis baik pada tataran individual hingga tataran global. Fungsi teknis-ekonomis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Misalnya pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi dalam ekonomi yang kompetitif. Terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas seseorang tersebut dikarenakan dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Oleh karena itu salah satu tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan adalah mengembangkan keterampilan hidup. Inilah sebenarnya arah kurikulum berbasis kompetensi, pendidikan *life skill* dan *broad based education* yang dikembangkan di Indonesia akhir-akhir ini. Para penganut teori *human capital* berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi manfaat moneter ataupun non-moneter. Manfaat non-moneter dari pendidikan adalah diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, kepuasan kerja, efisiensi konsumsi, kepuasan menikmati

masa pensiun dan manfaat hidup yang lebih lama karena peningkatan gizi dan kesehatan. Manfaat moneter adalah manfaat ekonomis yaitu berupa tambahan pendapatan seseorang yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan dibawahnya. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Semakin banyak orang yang berpendidikan maka semakin mudah bagi suatu negara untuk membangun bangsanya. Hal ini dikarenakan telah dikuasainya keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi oleh sumber daya manusianya sehingga pemerintah lebih mudah dalam menggerakkan pembangunan nasional.

Kedua , investasi sekolah memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja. Di negara-negara sedang berkembang umumnya menunjukkan nilai balik terhadap investasi pendidikan relatif lebih tinggi dari pada investasi modal fisik yaitu 20 % dibanding 15 %. Sementara itu di negara-negara maju nilai balik investasi pendidikan lebih rendah dibanding investasi modal fisik yaitu 9 % dibanding 13 %. Keadaan ini dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah tenaga kerja terdidik yang terampil dan ahli di negara berkembang relatif lebih terbatas jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan sehingga tingkat upah lebih tinggi dan akan menyebabkan nilai balik terhadap pendidikan juga tinggi. Pilihan investasi pendidikan juga harus mempertimbangkan tingkatan pendidikan. Proses pendidikan pada pendidikan dasar setidaknya bertumpu pada empat pilar yaitu *learning to know, learning to do, learning to be* dan *learning live together* yang dapat dicapai melalui delapan kompetensi dasar yaitu *membaca, menulis, mendengar, menutur, menghitung, meneliti, menghafal dan menghayal*. Anggaran pendidikan nasional seharusnya diprioritaskan untuk mengentaskan pendidikan dasar 9 tahun dan bila perlu diperluas menjadi 12 tahun. Selain itu pendidikan dasar seharusnya “benar-benar” dibebaskan dari segala beban biaya. Dikatakan “benar-benar” karena selama ini wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah tidaklah gratis. Apabila semua anak usia pendidikan dasar sudah terlayani mendapatkan pendidikan tanpa dipungut biaya, barulah anggaran pendidikan dialokasikan untuk pendidikan tingkat selanjutnya.

Ketiga, investasi dalam bidang sekolah memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial- kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan. Fungsi sosial-kemanusiaan

merujuk pada kontribusi pendidikan terhadap perkembangan manusia dan hubungan sosial pada berbagai tingkat sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat individual pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan dirinya secara psikologis, sosial, fisik dan membantu siswa mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Fungsi politis merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkatan sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat individual, pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang positif untuk melatih warganegara yang benar dan bertanggung jawab. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mengerti hak dan kewajibannya sehingga wawasan dan perilakunya semakin demokratis. Selain itu orang yang berpendidikan diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara lebih baik dibandingkan dengan yang kurang berpendidikan. Fungsi budaya merujuk pada sumbangan pendidikan pada peralihan dan perkembangan budaya pada tingkatan sosial yang berbeda. Pada tingkat individual, pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan kreativitasnya, kesadaran estetis serta untuk bersosialisasi dengan norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan sosial yang baik. Fungsi kependidikan merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan dan pemeliharaan pendidikan pada tingkat sosial yang berbeda. Pada tingkat individual pendidikan membantu siswa belajar cara belajar dan membantu guru cara mengajar. Orang yang berpendidikan diharapkan memiliki kesadaran untuk belajar sepanjang hayat (*life long learning*), selalu merasa ketinggalan informasi, ilmu pengetahuan serta teknologi sehingga terus terdorong untuk maju dan terus belajar. Di kalangan masyarakat luas juga berlaku pendapat umum bahwa semakin berpendidikan maka makin baik status sosial seseorang dan penghormatan masyarakat terhadap orang yang berpendidikan lebih baik dari pada yang kurang berpendidikan.

BAB II

TENDENSI DAN TRADISI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN

A. Perkembangan Sosiologi sebagai Ilmu

Sejak awal perkembangan sosiologi sebagai ilmu, sosiologi hanya merupakan ontologi dari cabang filsafat, di mana ia hanya membicarakan tentang berbagai kenyataan (*riil*) yang terjadi di masyarakat. Sosiologi kurang begitu dikenal dikalangan masyarakat, karena pada umumnya masyarakat hanya tertarik pada masalah-masalah yang umum dikenal kala itu, seperti kejahatan, perang, kekuasaan, golongan yang berkuasa, keagamaan.

Sosiologi baru dikenal di kalangan masyarakat, manakala terjadinya perubahan-perubahan dikalangan masyarakat Eropa pada abad pertengahan sampai abad ke 18. Perubahan yang begitu panjang diidentifikasi oleh Laeyendecker (Sunartyo, 2006;19) meliputi:

1. Tumbuhnya kapitalisme pada akhir abad ke pertengahan (abad 15).
2. Perubahan di bidang sosial dan politik di berbagai kawasan di Eropa
3. Perubahan pandangan keagamaan (*revormasi*) yang dimotori oleh Martin Luther
4. Meningkatkan individualisme
5. Lahirnya berbagai ilmu pengetahuan modern
6. Berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri

Di samping itu Laeyendecker juga menyebutkan beberapa peristiwa besar sebagai awal lahirnya ilmu Sosiologi, yaitu:

1. Revolusi industri dan

2. Revolusi perancis.

Pada abad ke 19 barulah muncul ilmu psykologi dan ilmu sosiologi. Namun sosiologi belum dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri. ia masih mencari bentuk sebagai ilmu yang berdiri sendiri, hal ini dilakukan oleh berbagai ilmuan dengan melakukan berbagai tulisan atau penelitian yang bersifat ilmiah maupun non-ilmiah. Soekanto (2001;3) menyatakan bahwa ada beberapa factor yang mendorong sosiologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri, yaitu meningkatnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Di Amerika, Sosiologi dihubungkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan keadaan-keadaan sosial manusia dan sebagai suatu pendorong untuk menyelesaikan persoalan yang ditimbulkan oleh kejahatan, pelanggaran, pelacuran, pengangguran, kemiskinan, konflik, peperangan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Demikian pula pada masa awal perkembangannya, sosiologi yang masih belum disebut sebagai sosiologi, hanya dikenal dengan nama filsafat sosial (*social philosophies*). Pada fase ini, sosiologi hanya dilihat dari satu segi saja, seperti Plato (429-374 SM) yang membahas sosiologi dari segi tatanan Negara dalam suatu masyarakat, dalam tesisnya Plato menyatakan bahwa masyarakat sebenarnya merupakan refleksi dari manusia perorangan. Suatu masyarakat akan mengalami kegoncangan apabila manusia sebagai perorangan mengalami kegoncangan dan terganggu keseimbangan jiwanya. Plato menjelaskan bahwa jiwa manusia terdiri dari tiga unsur yaitu nafsu, semangat dan intelegensia; Ariestoteles (384-322 SM) membahas unsur-unsur sosiologi dalam hubungannya dengan etika sosial, yaitu bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku dengan manusia lainnya ataupun dalam tatanan kehidupan sosial lainnya, dalam bukunya yang berjudul *Politics* Plato menjelaskan hubungan sifat sifat biologis manusia dengan tatanan sosial di masyarakat. Kemudian pada tahun 1469 Machiavelli yang berlatar belakang gereja, membahas pemisahan pemikiran dari alam rokhaniah dari alam kenyataan dengan pemisahan antara gereja dan Negara, di mana Negara sebagai personifikasi dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang nyata. Sementara gereja merupakan personifikasi dari alam rokhaniah yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Walaupun pemikiran semacamnya muncul pada abad pertengahan, serta didominasi oleh dogma gereja, pemikiran tentang masyarakat sebenarnya telah dilahirkan oleh pemikir Islam, yaitu sekitar abad ke 14. Johnson (1986) mencatat bahwa sekitar 400 tahun sebelum August Comte (bapak Sosiologi) mengembangkan perspektif sosiologinya di Prancis, Ibnu Khaldun telah merumuskan suatu model tentang suku bangsa nomaden (*nomadic*) yang

keras dan penuh tantangan serta masyarakat-masyarakat halus bertipe menetap dalam suatu hubungan yang kontras. Khaldun melihat bahwa budaya atau prilaku masyarakat sebagai bentuk peradaban yang telah jauh berkembang merupakan produk masyarakat-masyarakat yang sudah menetap. Khaldun juga melihat bahwa peradaban yang berkembang dibarengi oleh suatu kerinduan yang semakin bertambah akan kemewahan dan kenikmatan oleh suatu sistem otoritas politik yang lebih terpusat, dan sebagai akibatnya secara bertahap, mulai berkurangnya tingkat solidaritas dikalangan masyarakat baik secara individual atau kelompok (*spirit de corps*). Dengan demikian Khaldun melihat bahwa peradaban yang dibawa oleh manusia, ditakdirkan untuk tidak bertahan lama dan tumbuh tidak terbatas, tetapi menjadi lebih mudah ditaklukkan oleh masyarakat nomaden (*nomadic*) yang mempunyai solidaritas yang tinggi, keras dan berani.

Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai tipe-tipe sistem sosial dan perubahan sosial di masyarakat, diwarnai oleh warisan pengalaman masyarakat padang gurun di daratan Arab.

Di Inggris, semenjak terjadinya revolusi industri telah merangsang para ahli teori sosial melahirkan berbagai macam teori, seperti Herbert Spennser dan Karl Marx yang datang dari perancis ke Inggris dan Karl Marx yang datang ke prancis dari daerah asalnya Jerman hanya untuk mengembangkan penjelasan-penjelasan mengenai tipe-tipe keteraturan sosial yang baru muncul sebagai konsekwensi dari munculnya masyarakat industri. Ia juga menjelaskan bahwa revolusi industri telah merusak hubungan-hubungan tradisional dan menciptakan perpecahan-perpecahan baru dalam struktur sosial, di samping itu revolusi industri juga telah membentuk jenis keteraturan sosial yang baru. Perubahan yang terjadi di Jerman, juga telah menarik perhatian Max Weber yang melihat bahwa pengaruh dari bentuk-bentuk organisasi sosial hirarkhis yang mempunyai sifat rasional.

Baru pada pertengahan abad kesembilan belas, Augus Comte melihat bahwa pemahaman intelektual mengenai hukum-hukum yang mengendalikan masyarakat tidak dapat menghasilkan perasaan altruistic di mana keteraturan sosial dibangun, karena secara tradisional Comte melihat bahwa perasaan-perasaan semacamnya tergantung pada kepercayaan yang dibangun oleh agama dan ritual-ritual. Karenannya ketika agama ~dominasi gereja~ mengalami kemunduran yang disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan mentalitas ilmiah, maka Comte merasa bahwa perlu untuk membangun suatu agama baru yang tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan dunia ilmiah.

Namun sebelum itu, pada abad ke tujuhbelas (XVII) kajian sosiologi ditandai dengan munculnya tulisan Hobbes yang berjudul *The Leviathan* (1679). Hobbes mencatat bahwa dalam keadaan alamiah kehidupan manusia didasarkan pada keinginan-keinginan yang mekanistik, sehingga manusia selalu ingin berkelahi. Konsep ini lebih banyak dipengaruhi latar belakang inspirasi Hobbes tentang hukum alam, fisika dan matematika. Namun segala yang diperbuat oleh manusia dalam mencapai ketentraman, kedamaian menurut Hobbes harus dilakukan suatu perjanjian atau kontrak dengan pihak lain yang mempunyai wewenang, diaman ia akan dapat memelihara ketentraman. Dengan demikian dalam konteks ini Hobbes beranggapan bahwa lembaga-lembaga sosiallah yang mempunyai peranan dan ikatan dengan suatu masyarakat.

Pada abad ini juga muncul tokoh yang mengembangkan kekuatan lembaga sosial, seperti John Locke (1632-1704) dan J.J. Rousseau (1712-1778). Menurut Locke manusia pada dasarnya terikat dengan hak-hak untuk hidup, bebas dan hak atas kekayaan. Sementara komitmen yang dibuat manusia dengan pihak wewenang hanya bersifat pamrih. Sebab apabila salah satu yang memegang wewenang gagal dalam memenuhi salah satu syarat yang menjadi komitmen bersama, maka salah satunya berhak untuk bebas dan memilih berkomitmen dengan pihak lain.

Pada awal abad ke sembilan belas, sebagai awal perkembangan sikap ilmiah. Metode ilmiah sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Salah satu hasil penting dalam pertumbuhan sikap ilmiah adalah dorongan untuk selalu membuktikan fakta-fakta alam, mengembangkan teknologi dalam lain sebagainya. Validitas Pendekatan ilmiah dibuktikan oleh kenyataan bahwa suatu pendekatan (*approach*) merupakan suatu jalan menemukan kebenaran ilmiah, dalam artian bahwa dengan menggunakan suatu Pendekatan ilmiah akan membekali setiap orang dengan pengetahuan yang dapat digunakan untuk diterapkan pada lingkungannya dengan lebih efektif dan efisien.

Demikian halnya sikap ilmiah yang ditunjukkan para ahli sosial, di mana mereka melihat kecenderungan perilaku manusia meniru titik tolak hukum alam. Dalam konteks ini ilmu sosial mampu menyamai keberhasilan ilmu fisika dalam menciptakan dasar teknologi industri. Hukum-hukum alam yang mengatur perilaku manusia dapat ditemukan dan dibuktikan melalui penelitian ilmiah. Hukum-hukum ini dapat dipergunakan untuk mereorganisir struktur hukum, struktur politik dalam masyarakat kala itu, yang lebih mengandalkan sikap paksaan, taahul, dan dogma-dogma gereja.

Perubahan yang sangat pesat dan meluas dalam struktur sosial dan pergeseran budaya yang mendasar dalam orientasi intelektual yang

berkaitan dengan perilaku manusia dan masyarakat mendorong munculnya perspektif sosiologis. Perubahan-perubahan ini menghasilkan refleksi yang sadar akan isu-isu dalam sosiologi dan mendorong untuk mengatasi dengan analisa-analisa ilmiah.

Seiring dengan perubahan sikap ilmiah pada abad kesembilanbelas inilah August Comte menggunakan istilah Sosiologi sebagai cabang ilmu di samping cabang ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Comte melihat bahwa sosiologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempunyai tingkat kompleksitas yang cukup tinggi, karenanya ia meramalkan bahwa ilmu ini akan berkembang dengan pesat. Dalam konteks ini Comte melihat sosiologi sebagai ilmu positif tentang hukum-hukum dasar dari gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Tercatat penggunaan istilah sosiologi pada tahun 1842, takkala August Comte menerbitkan buku *Positive Philosophy*.

Dalam perkembangan analisisnya ia kemudian membagi sosiologi menjadi sosiologi statis dan sosiologi dinamis. Soekanto (2001;29) mencatat bahwa sosiologi statis merupakan ilmu yang memusatkan perhatian pada hukum-hukum statis yang menjadi dasar dari terbentuknya suatu masyarakat. Dari hukum-hukum statis inilah akan menjadi dasar dalam mempelajari aksi-aksi dan reaksi timbal balik dari sistem sosial di masyarakat.

Sementara Sosiologi dinamis merupakan teori tentang perkembangan masyarakat. Konsep ini menggambarkan bagaimana perkembangan cara-cara yang dilakukan oleh manusia mulai dalam mempertahankan kehidupannya dari tingkat intelegensi yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian dinamika dalam konsep Comte menyangkut masyarakat-masyarakat untuk menunjukkan adanya perkembangan, Comte juga yakin bahwa masyarakat akan berkembang menuju suatu kesempurnaan (Soekanto, 2001;36).

Sebagai salah seorang yang memberikan sumbangan yang begitu berharga pada Sosiologi, August Comte kemudian dianggap sebagai "*bapak sosiologi*", atau menurut Reiss Jr (1968) ia adalah "*godfather*" nya sosiologi. Pasca Comte dan Spenser, sosiologi menjadi kawasan ilmu pengetahuan yang berkembang. Munculnya bidang-bidang yang berhubungan dengan bentuk-bentuk atau pola-pola perilaku manusia, sumber-sumber dan arah perubahan sosial, tipe-tipe alternative dalam struktur sosial, serta dasar-dasar yang penting dalam keteraturan sosial, seperti tradisi Historis Jerman yang menekankan pada perbedaan antara ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Hukum-hukum alam menentukan peristiwa-peristiwa dalam dunia fisik, akan tetapi dunia manusia adalah dunia kebebasan dan dunia yang bersifat sukarela, tidak seperti hukum-

hukum fisik atau hukum alam yang bersifat *deterministic* (Johnson, 1988:27). Teori *idealistic* yang lahir dari tradisi Historisi Jerman didengungkan oleh Hegel, yang kemudian Marx dan Weber menjadi pewarisnya. Namun Marx akhirnya menolak anggapan bahwa nilai-nilai budaya dan idea-ideanya mempengaruhi perilaku manusia terlepas dari sikap materialistisnya, Marx berpendapat bahwa selama masyarakat masih terbagi dalam bentuk kelas-kelas, maka kelas yang berkuasalah akan terhimpun segala kekuatan dan kekayaan. Hukum, filsafat, agama dan kesenian merupakan refleksi dari status ekonomi kelas tertentu. Kelas yang berkuasa akan mengeksploitasi pada kelas yang lemah, sebagai akibatnya akan timbul konflik, pertikaian dan akhirnya akan muncul kelas proletar (*proletarian*) atau kelas yang menang. Sementara Weber cenderung tetap mempertahankan Hitoris dan budaya sebagai sesuatu yang unik. Kedua tokoh yang melahirkan mazhab ekonomi inilah sosiologi menjadi sebuah ilmu pengetahuan.

Namun baru pada abad kedua puluhan sosiologi menjadi ilmu yang begitu populer, manakala *Herbert Spenser* mengembangkan suatu sistematika penelitian masyarakat dalam bukunya yang berjudul *principle of Sociology*.

Sosiologi juga berkembang di Amerika, sekalipun tetap bercermin pada akar-akar sosiologi di Eropa. Teori-teori yang lahir di Eropa dimasukkan dalam persepektif sosiologi Amerika oleh Talcott Parson. Sumbangan Sosiologi Amerika yang terpenting adalah menyangkut Psikologi Sosial, khususnya menyangkut perspektif interaksionisme symbol. Sosiologi Amerika sejak awal perkembangannya lebih bersifat *pragmatist*, *Individualistic* dan *optimist*, seperti pandangan John Dewey seorang kritisi terhadap praktek- praktek pendidikan tradisional. Dalam konteks ini Dewey mengusulkan bahwa perubahan sosial bisa dilakukan melalui praktek-praktek pendidikan dengan mengatur pengalaman-pengalaman belajar di bangku sekolah sedemikian rupa sehingga mencerminkan sedekat mungkin dengan kehidupan, memberikan kesempatan pada siswa untuk mengatasi masalah-masalah yang bersifat realistis sebagai dasar untuk belajar, konsep ini kemudian dikenal dengan belajar dengan berbuat (*learning by doing*). Sekalipun Dewey bukan sebagai pelopor dalam Sosiologi, namun wawasan pemikirannya yang fundamental sangat kental dan memperlihatkan hubungan yang erat antara pikiran dan tindakan, yang kemudian di adopsi oleh George Herbert Mead dalam meletakkan dasar-dasar dalam perspektif teori Interaksionisme *symbolic* dan psikologi sosial.

Dari beberapa pemikiran yang dikembangkan dalam sejarah perkembangan Sosiologi sebagai ilmu sudah sangat jelas bahwa hal itu

merupakan pendorong yang juga menentukan sosiologi menjadi kawasan ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

B. Lahirnya Sosiologi pendidikan

Sejak awal perkembangannya, sosiologi merupakan ontologi dari cabang filsafat, di mana ia hanya membicarakan tentang berbagai kenyataan (*riil*) yang terjadi di masyarakat. Sosiologi kurang begitu dikenal di kalangan masyarakat, karena pada umumnya masyarakat hanya tertarik pada masalah-masalah yang umum dikenal kala itu, seperti kejahatan, perang, kekuasaan, golongan yang berkuasa, keagamaan.

Sosiologi baru dikenal di kalangan masyarakat, manakala terjadinya perubahan-perubahan di kalangan masyarakat Eropa pada abad pertengahan sampai abad ke 18. Perubahan yang begitu panjang diidentifikasi oleh Laeyendecker (Sunartyo, 2006;1) meliputi:

- 1) Tumbuhnya kapitalisme pada akhir abad ke pertengahan (abad 15).
- 2) Perubahan di bidang sosial dan politik di berbagai kawasan di Eropa.
- 3) Perubahan pandangan keagamaan (*revormasi*) yang dimotori oleh Martin Luther.
- 4) Meningkatkan individualism.
- 5) Lahirnya berbagai ilmu pengetahuan modern.
- 6) Berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri.

Sosiologi berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri karena adanya ancaman terhadap tatanan sosial yang selama ini sudah dianggap seharusnya demikian nyata dan benar. Laeyndecker mengidentifikasi ancaman tersebut meliputi :

1. Terjadinya 2 revolusi yakni revolusi industri dan revolusi perancis.
2. Tumbuhnya kapitalisme pada akhir abad ke-15.
3. Perubahan dibidang sosial dan politik.
4. Perubahan yang terjadi akibat gerakan reformasi yang dicetuskan Marthin Luther.
5. Meningkatnya individualism.

Menurut Comte, konflik-konflik tersebut terjadi karena hilangnya norma atau pegangan bagi masyarakat dalam bertindak. Comte berkaca dari apa yang terjadi dalam masyarakat Perancis ketika itu (abad ke-19). Setelah pecahnya revolusi Perancis, masyarakat Perancis dilanda konflik antar kelas. Comte melihat hal itu terjadi karena masyarakat tidak lagi tahu bagaimana mengatasi perubahan akibat revolusi dan hukum-hukum apa saja yang dapat dipakai untuk mengatur tatanan sosial masyarakat.

Soekanto (2001;3) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong sosiologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri, yaitu

meningkatnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Di Amerika, sosiologi dihubungkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan keadaan-keadaan sosial manusia dan sebagai suatu pendorong untuk menyelesaikan persoalan yang ditimbulkan oleh kejahatan, pelanggaran, pelacuran, pengangguran, kemiskinan, konflik, peperangan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Demikian pula pada masa awal perkembangannya, sosiologi yang masih belum disebut sebagai sosiologi, hanya dikenal dengan nama filsafat sosial (*social philosophies*). Pada fase ini, sosiologi hanya dilihat dari satu segi saja, seperti Plato (429-374 SM) yang membahas sosiologi dari segi tatanan Negara dalam suatu masyarakat, dalam tesisnya Plato menyatakan bahwa masyarakat sebenarnya merupakan refleksi dari manusia perorangan. Suatu masyarakat akan mengalami kegoncangan apabila manusia sebagai perorangan mengalami kegoncangan dan terganggu keseimbangan jiwanya.

Plato menjelaskan bahwa jiwa manusia terdiri dari tiga unsur yaitu nafsu, semangat dan intelegensia; Aristoteles (384-322 SM) membahas unsur-unsur sosiologi dalam hubungannya dengan etika sosial, yaitu bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku dengan manusia lainnya ataupun dalam tatanan kehidupan sosial lainnya, dalam bukunya yang berjudul *Politics* Plato menjelaskan hubungan sifat-sifat biologis manusia dengan tatanan sosial di masyarakat.

Sosiologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sosiologi umum dan sosiologi khusus. Sosiologi umum menyelidiki gejala sosio-kultural secara umum. Sedangkan Sosiologi khusus, yaitu pengkhususan dari sosiologi umum, yaitu menyelidiki suatu aspek kehidupan sosio kultural secara mendalam. Misalnya: sosiologi masyarakat desa, sosiologi masyarakat kota, sosiologi agama, sosiologi hukum, sosiologi pendidikan dan sebagainya. Jadi sosiologi pendidikan merupakan salah satu sosiologi khusus.

Beberapa definisi sosiologi pendidikan menurut beberapa ahli:

1. Menurut F.G. Robbins, sosiologi pendidikan adalah sosiologi khusus yang tugasnya menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan. Struktur mengandung pengertian teori dan filsafat pendidikan, sistem kebudayaan, struktur kepribadian dan hubungan kesemuanya dengan tata sosial masyarakat. Sedangkan dinamika yakni proses sosial dan kultural, proses perkembangan kepribadian, dan hubungan kesemuanya dengan proses pendidikan.

2. Menurut H.P. Fairchild dalam bukunya "*Dictionary of Sociology*" dikatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Jadi ia tergolong *applied sociology*.
3. Menurut Prof. DR S. Nasution, M.A., Sosiologi Pendidikan adalah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik.
4. Menurut F.G Robbins dan Brown, Sosiologi Pendidikan ialah ilmu yang membicarakan dan menjelaskan hubungan-hubungan sosial yang mempengaruhi individu untuk mendapatkan serta mengorganisasi pengalaman. Sosiologi pendidikan mempelajari kelakuan sosial serta prinsip-prinsip untuk mengontrolnya.
5. Menurut E.G Payne, Sosiologi Pendidikan ialah studi yang komprehensif tentang segala aspek pendidikan dari segi ilmu sosiologi yang diterapkan.
6. Menurut Drs. Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan ialah ilmu pengetahuan yang berusaha memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan analisis atau pendekatan sosiologis.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari seluruh aspek pendidikan, baik itu struktur, dinamika, masalah-masalah pendidikan, ataupun aspek-aspek lainnya secara mendalam melalui analisis atau pendekatan sosiologis.

C. Kedudukan dan Perkembangan Sosiologi Pendidikan

Ketika diangkat menjadi Presiden *American Sociological Association* pada tahun 1883, Lester Frank Ward, yang berpandangan demokratis, menyampaikan pidato pengukuhan dengan menekankan bahwa sumber utama perbedaan kelas sosial dalam masyarakat Amerika adalah perbedaan dalam memiliki kesempatan, khususnya kesempatan dalam memperoleh pendidikan.

Orang berpendidikan lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk maju dan memiliki kehidupan yang lebih bermutu. Pendidikan dipandang sebagai faktor pembeda antara kelas-kelas sosial yang cukup merisaukan. Untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan tersebut ia mendesak pemerintahnya agar menyelenggarakan wajib belajar. Usulan itu dikabulkan, dan wajib belajar di USA berlangsung 11 tahun, sampai tamat *Senior High School*. Buah pikiran Ward dijadikan landasan untuk lahirnya

Educational Sociology sebagai cabang ilmu yang baru dalam sosiologi pada awal abad ke-20. Ia sering dijuluki sebagai “Bapak Sosiologi Pendidikan” (Rochman Natawidjaja, et. Al., 2007: 79).

Fokus kajian *Educational Sociology* adalah penggunaan pendidikan pendidikan sebagai alat untuk memecahkan permasalahan social dan sekaligus memberikan rekomendasi untuk mendukung perkembangan pendidikan itu sendiri. Kelahiran cabang ilmu baru ini mendapat sambutan luas dikalangan universitas di USA. Hal itu terbukti dari adanya 14 universitas yang menyelenggarakan perkuliahan *Educational Sociology*, pada tahun 1914. Selanjutnya, pada tahun 1923 dibentuk organisasi professional bernama *National Society for the Study of Educational Sociology* dan menerbitkan *Journal of educational Sociology*. Pada tahun 1948, organisasi profesional yang mandiri itu bergabung ke dalam seksi pendidikan dari *American Sociological Society*.

Pada tahun 1928 Robert Angel mengeritik *Educational Sociology* dan memperkenalkan nama baru yaitu *Sociology of Education* dengan focus perhatian pada penelitian dan publikasi hasilnya, sehingga *Sociology of Education* bisa menjadi sumber data dan informasi ilmiah, serta studi akademis yang bertujuan mengembangkan teori dan ilmu sendiri. Dengan dukungan dana penelitian yang memadai, berhembuslah angin segar dan menarik para sosiolog untuk melakukan penelitian dalam bidang pendidikan. Maka diubahlah nama *Educational Sociology* menjadi *Sociology of Education* dan *Journal of Educational Sociology* menjadi *Journal of the Sociology of Education* (1963) . Serta seksi *Educational Sociology* dalam *American Sociological Society* pun berubah menjadi seksi *Sociology of Education* yang berlaku sampai sekarang.

Di Jerman, Max Weber (1864-1920) menyoroti keadaan dan penyelenggaraan pendidikan pada masyarakat dengan latar belakang sosial budaya serta tingkat kemajuan berbeda. Sedang di Inggris, perhatian sosiologi pada pendidikan pada awalnya kurang berkembang karena pelopor sosiologi-nya, yaitu Herbert Spencer (1820-1903) justru merupakan Darwinisme Sosial. Namun belakangan, di Inggris muncul aliran sosiologi yang memfokuskan perhatiannya akan analisis pendidikan pada level mikro, yaitu mengenai interaksi social yang terjadi dalam ruang belajar. Berstein, misalnya, berusaha dengan jalan menyajikan lukisan tentang kenyataan dan permasalahan yang terdapat dalam sistem persekolahan dengan tujuan agar para pengambil keputusan menentukan langkah - langkah perbaikan yang tepat. Pendekatan Berstein ini oleh Karabel dijuluki sebagai *atheoretical, pragmatic, descriptive, and policy focused* (Murdock, G. P. 1965: 80).

Di Indonesia, perhatian akan peran pendidikan dalam pengembangan masyarakat, dimulai sekitar tahun 1900, saat Indonesia masih dijajah Belanda. Para pendukung politis etis di Negeri Belanda saat itu melihat adanya keterpurukan kehidupan orang Indonesia. Mereka mendesak agar pemerintah jajahan melakukan politik balas budi untuk memerangi ketidakadilan melalui edukasi, irigasi, dan emigrasi. Meskipun pada mulanya program pendidikan itu amat elitis, lama kelamaan meluas dan meningkat ke arah yang makin populis sampai penyelenggaraan wajib belajar dewasa ini. Pelopor pendidikan pada saat itu antara lain: Van Deventer, R.A.Kartini, dan R.Dewi Sartika.

Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat: (1) kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat, (2) kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat, (3) negara melindungi warga negaranya, dan (4) selaras serasi seimbang antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia tidak hanya meningkatkan kualitas manusia secara orang per orang melainkan juga kualitas struktur masyarakatnya.

D. Ruang Lingkup Sosiologi Pendidikan

Para ahli Sosiologi dan ahli Pendidikan sepakat bahwa, sesuai dengan namanya, Sosiologi Pendidikan atau *Sociology of Education* (juga *Educational Sociology*) adalah cabang ilmu Sosiologi, yang pengkajiannya diperlukan oleh profesional dibidang pendidikan (calon guru, para guru, dan pemikir pendidikan) dan para mahasiswa serta profesional sosiologi.

Mengenai ruang lingkup Sosiologi Pendidikan, Brookover mengemukakan adanya empat pokok bahasan berikut: (1) Hubungan sistem pendidikan dengan sistem social lain, (2) Hubungan sekolah dengan komunitas sekitar, (3) Hubungan antar manusia dalam sistem pendidikan, (4) Pengaruh sekolah terhadap perilaku anak didik (Rochman Natawidjaja, et. Al., 2007: 81). Sosiologi Pendidikan diharapkan mampu memberikan rekomendasi mengenai bagaimana harapan dan tuntutan masyarakat mengenai isi dan proses pendidikan itu, atau bagaimana sebaiknya pendidikan itu berlangsung menurut kacamata kepentingan masyarakat, baik pada level nasional maupun lokal.

Sosiologi Pendidikan secara operasional dapat defenisi sebagai cabang sosiologi yang memusatkan perhatian pada mempelajari hubungan antara pranata pendidikan dengan pranata kehidupan lain, antara unit pendidikan dengan komunitas sekitar, interaksi social antara orang-orang dalam satu unit pendidikan, dan dampak pendidikan pada kehidupan peserta didik (Rochman Natawidjaja, et. Al., 2007: 82).

Sebagaimana ilmu pengetahuan pada umumnya, Sosiologi Pendidikan dituntut melakukan tiga fungsi pokok.

Pertama, fungsi eksplanasi, yaitu menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk ke dalam ruang lingkup pembahasannya. Untuk diperlukan konsep-konsep, proposisi-proposisi mulai dari yang bercorak generalisasi empirik sampai dalil dan hukum-hukum yang mantap, data dan informasi mengenai hasil penelitian lapangan yang actual, baik dari lingkungan sendiri maupun dari lingkungan lain, serta informasi tentang masalah dan tantangan yang dihadapi. Dengan informasi yang lengkap dan akurat, komunikasi akan memperoleh pemahaman dan wawasan yang baik dan akan dapat menafsirkan fenomena-fenomena yang dihadapi secara akurat. Penjelasan-penjelasan itu bisa disampaikan melalui berbagai media komunikasi.

Kedua, fungsi prediksi, yaitu meramalkan kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Sejalan dengan itu, tuntutan masyarakat akan berubah dan berkembang akibat bekerjanya faktor-faktor internal dan eksternal yang masuk ke dalam masyarakat melalui berbagai media komunikasi. Fungsi prediksi ini amat diperlukan dalam perencanaan pengembangan pendidikan guna mengantisipasi kondisi dan tantangan baru.

Ketiga, fungsi utilisasi, yaitu menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat seperti masalah lapangan kerja dan pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain-lain yang memerlukan dukungan pendidikan, dan masalah penyelenggaraan pendidikan sendiri.

Jadi, secara umum Sosiologi Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan fungsi-fungsinya selaku ilmu pengetahuan (pemahaman eksplanasi, prediksi, dan utilisasi) melalui pengkajian tentang keterkaitan fenomena-fenomena sosial dan pendidikan, dalam rangka mencari model-model pendidikan yang lebih fungsional dalam kehidupan masyarakat. Secara khusus, Sosiologi Pendidikan berusaha untuk menghimpun data dan informasi tentang interaksi sosial di antara orang-orang yang terlibat dalam institusi pendidikan dan dampaknya bagi peserta didik, tentang hubungan antara lembaga pendidikan dan komunitas sekitarnya, dan tentang hubungan antara pendidikan dengan pranata kehidupan lain.

Masyarakat selalu mencakup sekelompok orang yang berinteraksi antar sesamanya, saling tergantung dan terikat oleh nilai dan norma yang dipatuhi bersama, pada umumnya bertempat tinggal di wilayah tertentu,

dan adakalanya mereka memiliki hubungan darah atau memiliki kepentingan bersama. Masyarakat dapat merupakan suatu kesatuan hidup dalam arti luas ataupun dalam arti sempit. Masyarakat dalam arti luas pada umumnya lebih abstrak misalnya masyarakat bangsa, sedang dalam arti sempit lebih konkrit misalnya marga atau suku. Masyarakat sebagai kesatuan hidup memiliki ciri utama, antara lain: (1) ada interaksi antara warga-warganya, (2) pola tingkah laku warganya diatur oleh adapt istiadat, norma-norma, hukum, dan aturan-aturan khas, (3) ada rasa identitas kuat yang mengikat para warganya. Kesatuan wilayah, kesatuan adat- istiadat, rasa identitas, dan rasa loyalitas terhadap kelompoknya merupakan pangkal dari perasaan bangga sebagai patriotisme, nasionalisme, jiwa korps, dan kesetiakawanan sosial (Umar Tirtarahardja dan La Sulo, 1994: 100).

Masyarakat Indonesia mempunyai perjalanan sejarah yang panjang. Dari dulu hingga kini, ciri yang menonjol dari masyarakat Indonesia adalah sebagai masyarakat majemuk yang tersebar di ribuan pulau di nusantara. Melalui perjalanan panjang, masyarakat yang bhineka tersebut akhirnya mencapai satu kesatuan politik untuk mendirikan satu negara serta berusaha mewujudkan satu masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang bhinneka tunggal ika. Sampai saat ini, masyarakat Indonesia masih ditandai oleh dua ciri yang unik, yakni (1) secara horizontal ditandai oleh adanya kesatuan-kesatuan social atau komunitas berdasarkan perbedaan suku, agama, adat istiadat, dan kedaerahan, dan (2) secara vertical ditandai oleh adanya perbedaan pola kehidupan antara lapisan atas, menengah, dan lapisan bawah.

Pada zaman penjajahan, sifat dasar masyarakat Indonesia yang menonjol adalah (1) terjadi segmentasi ke dalam bentuk kelompok social atau golongan social jajahan yang seringkali memiliki sub-kebudayaan sendiri, (2) memiliki struktur social yang terbagi-bagi, (3) seringkali anggota masyarakat atau kelompok tidak mengembangkan consensus di antara mereka terhadap nilai-nilai yang bersifat mendasar, (4) diantara kelompok relative seringkali mengalami konflik, (5) terdapat saling ketergantungan di bidang ekonomi, (6) adanya dominasi politiuik oleh suatu kelompok atas kelompok -kelompok social yang lain, dan (7) secara relative integrasi social sukar dapat tumbuh (Wayan Ardhana, 1986: Modul 1/70).

Masyarakat Indonesia setelah kemerdekaan, utamanya pada zaman pemerintahan Orde Baru, telah banyak mengalami perubahan. Sebagai masyarakat majemuk, maka komunitas dengan ciri-ciri unik, baik secara horizontal maupun secara vertical, masih dapat ditemukan, demikian pula

halnya dengan sifat- sifat dasar dari zaman penjajahan belum terhapus seluruhnya. Namun niat politik yang kuat menjadi suatu masyarakat bangsa Indonesia serta kemajuan dalam berbagai bidang pembangunan, maka sisi ketunggalan dari “bhinneka tunggal ika” makin mencuat. Berbagai upaya dilakukan, baik melalui kegiatan jalur sekolah maupun jalur luar sekolah, telah menumbuhkan benih-benih persatuan dan kesatuan yang semakin kokoh.

Berbagai upaya telah dilakukan dengan tidak mengabaikan kenyataan tentang kemajemukan masyarakat Indonesia. Hal terakhir tersebut kini makin mendapat perhatian yang semestinya dengan antara lain dimasukkannya muatan lokal (mulok) di dalam kurikulum sekolah. Perlu ditegaskan bahwa muatan local di dalam kurikulum tidak dimaksudkan sebagai upaya membentuk “manusia lokal”, akan tetapi haruslah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan “manusia Indonesia” di suatu lokal tertentu. Dengan demikian akan dapat diwujudkan manusia Indonesia dengan wawasan nusantara dan berjiwa nasional akan tetapi yang memahami dan menyatu dengan lingkungan (alam, sosial, dan budaya) de sekitarnya.

BAB III

LANDASAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN

A. Norma Kehidupan

Landasan sosiologi mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa. Untuk memahami kehidupan bermasyarakat suatu bangsa, kita harus memusatkan perhatian pada pola hubungan antar pribadi dan antar kelompok dalam masyarakat tersebut. Untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, terciptalah nilai-nilai sosial yang dalam perkembangannya menjadi norma-norma social yang mengikat kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing anggota masyarakat.

Menurut (Wuradji. 2008:90) dalam kehidupan bermasyarakat dibedakan tiga macam norma yang dianut oleh pengikutnya, yaitu: (1) paham individualisme, (2) paham kolektivisme, (3) paham integralistik. Paham individualisme dilandasi teori bahwa manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka. Masing-masing boleh berbuat apa saja menurut keinginannya, asalkan tidak mengganggu keamanan orang lain. Dampak individualisme menimbulkan cara pandang yang lebih mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat. Dalam masyarakat seperti ini, usaha untuk mencapai pengembangan diri, antara anggota masyarakat satu dengan yang lain saling berkompetisi sehingga menimbulkan dampak yang kuat. Paham kolektivisme memberikan kedudukan yang berlebihan kepada masyarakat dan kedudukan anggota masyarakat secara

perseorangan hanyalah sebagai alat bagi masyarakatnya. Sedangkan paham integralistik dilandasi pemahaman bahwa masing-masing anggota masyarakat saling berhubungan erat satu sama lain secara organis merupakan masyarakat. Masyarakat integralistik menempatkan manusia tidak secara individualis melainkan dalam konteks strukturnya manusia adalah pribadi dan juga merupakan relasi. Kepentingan masyarakat secara keseluruhan diutamakan tanpa merugikan kepentingan pribadi.

Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat: (1) kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat, (2) kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat, (3) negara melindungi warga negaranya, dan (4) selaras serasi seimbang antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia tidak hanya meningkatkan kualitas manusia secara orang per orang melainkan juga kualitas struktur masyarakatnya.

B. Konsep Sosial Budaya Pendidikan

Dasar sosial pendidikan mengkaji kondisi sosial dan pendidikan berdasarkan prinsip pemecahan masalah secara ilmiah dan berdasarkan nilai demokrasi. Kajian sosial pendidikan mengkombinasikan konsep, instrumen, dan metode dari ilmu sosial dan filsafat untuk membentuk kajian terpadu tentang asal usul, tujuan, dan fungsi lembaga pendidikan dalam suatu masyarakat. Manan (1989:5) mengemukakan sebuah program pendidikan mencerminkan kehidupan dan kondisi suatu masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial budaya, sejarah, dan filosofi yang semuanya memberi arah dalam bidang pendidikan.

Kajian sosial budaya menghubungkan pengetahuan tentang masyarakat dan kebudayaan dengan pendidikan sebagai institusi untuk memelihara kesinambungan dan pengembangan masyarakat dan kebudayaan. Sekolah harus memahami isu dan masalah sosial budaya dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan perubahan sosial budaya yakni modernisasi. Pemahaman tentang sosial budaya dan proses perubahan sosial budaya diharapkan sekolah dapat mempertahankan dan meningkatkan fungsinya sebagai *agent of change* dan membentuk generasi yang berkualitas. Herskovits (1964:14) berpendapat:

Society is formed by persons, their way comport to be their culture. because society concept and culture has interdependent, so in culture social concept is used in discussed education position in society. Connection between education and culture social life a society and rumorss that appear in education development and development a society.

Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa suatu masyarakat dibentuk oleh orang-orang, cara-cara mereka bertingkah laku merupakan kebudayaan mereka. Karena konsep masyarakat dan kebudayaan tersebut bersifat interdependen, maka dalam konsep sosial budaya digunakan dalam mengkaji kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Hubungan antara pendidikan dan kehidupan sosial budaya suatu masyarakat dan isu-isu yang muncul dalam perkembangan pendidikan dan pembangunan suatu masyarakat.

Kajian konsep sosial budaya akan terfokus pada pembahasan karakteristik sosial budaya, transmisi sosial budaya, dan hubungan sosial budaya dengan pendidikan.

Potensi yang dimiliki manusia yaitu otak mampu menghasilkan kebudayaan, hasil dari potensi yang tercermin dari berbagai hasil manusia merupakan sumber pembentukan kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengalaman universal manusia, manifestasi lokal dan regionalnya bersifat unik. Sosial budaya bersifat dinamis tetapi juga bersifat dinamis, dengan adanya perubahan terus menerus dan tetap. Koentjaraningrat (1974:41) mengemukakan bahwa kebudayaan memiliki unsur-unsur yang universal yaitu bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, sistem religi, dan sistem kesenian.

Bentuk manifestasi dari unsur-unsur sosial budaya berbagai masyarakat bersifat unik. Semua masyarakat memiliki unsur budaya bahasa tetapi tidak ada dua bahasa yang identik sama. Masing-masing kebudayaan memiliki kekerabatan dan persamaan tetapi tidak identik. Keragaman atau keunikan dari unsur-unsur sosial budaya terbentuk karena adanya keragaman lingkungan dan sejarah perkembangan suatu masyarakat. Kebudayaan bersifat stabil dan dinamis. Unsur-unsur sosial budaya biasanya bertahan dan stabil untuk suatu periode waktu tertentu, tetapi kontak budaya dan perubahan lingkungan mempengaruhi terjadinya perubahan budaya (enkulturasi dan akulturasi).

Suzuki dan Ponterotto (2008:56) mengemukakan karakter proses budaya yang harus dipertimbangkan adalah *pre-encounter assimilation* (sebelum mengalami asimilasi), *pre-encounter miseducation* (sebelum mengalami salah persepsi pendidikan), *pre-encounter self hatred* (sebelum membenci diri sendiri), *internalization nationalist* (internasionalisasi nasional), dan *internalization multiculturalist* (internasionalisasi multikultural). Kajian tentang karakter proses budaya mengkaji tentang diskriminasi yang pernah terjadi di Amerika Serikat terhadap warga kulit hitam.

Proses sebelum mengalami asimilasi adalah adanya pemberian identitas warga kulit hitam dalam bentuk diskriminasi. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi ras yang salah satu bentuknya menyangkut bidang pendidikan. Identitas ini diwariskan secara turun temurun sehingga diskriminasi tetap ada. Proses sebelum mengalami salah persepsi pendidikan yaitu persepsi tentang konsep pendidikan dipengaruhi oleh tingkat informasi yang dipahami dan hal ini membentuk sikap individu dalam menghargai martabat manusia, diskriminasi kulit hitam membentuk persepsi secara individu dan komunitas untuk memberlakukan hal tersebut secara kontinyu. Sehingga secara tidak langsung pendidikan berperan membentuk persepsi tersebut dalam kegiatan pembelajaran yaitu konsep diskriminasi ditransfer dan dibudayakan dalam bidang pendidikan.

Proses sebelum membenci diri sendiri tercermin dengan adanya proses pewarisan budaya diskriminasi terhadap kulit hitam menimbulkan kebencian tersendiri dengan memandang rendah budaya kulit. Individu memiliki sikap yang negatif terhadap budaya kulit hitam sehingga kajian tentang budaya kulit hitam kurang mendapat perhatian. Proses internasionalisasi nasional yaitu kasus diskriminasi kulit hitam akhirnya menjadi kajian dunia internasional sehingga proses selanjutnya adalah internasionalisasi nasional yaitu dengan adanya perlawanan dan kecaman terhadap praktik diskriminasi tersebut. Proses internasionalisasi multikultural yaitu berasumsi bahwa budaya merupakan hal kompleks dan terdapat beragam budaya. Antara budaya yang satu dengan yang lain tidak diperkenankan saling menjatuhkan melainkan saling membangun sehingga manusia menjadi berbudaya yang tinggi.

Pendidikan memegang peranan penting dalam perubahan sosial budaya manusia. Sosial budaya membentuk karakter suatu masyarakat.

Konsep budaya multikultural merupakan suatu ideologi yang mengkaji perbedaan budaya, mengakui, dan mendorong pluralisme budaya sebagai suatu corak kehidupan masyarakat (Zubaedi, 2005:61). Multikultural akan menjadi pemersatu yang mengakomodasi perbedaan dalam masyarakat yang heterogen. Antar individu hidup berdampingan dalam kesetaran derajat politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Prinsip multikultural dapat dijadikan sebagai strategi dan pendekatan dalam pengembangan kurikulum karena disesuaikan dengan kondisi budaya daerah. Relevansi antara kurikulum dan sosial budaya dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum sehingga pelaksanaannya diharapkan dapat mengembangkan potensi peserta didik dan potensi daerah.

Kebudayaan bersifat stabil tetapi dapat berubah, perubahan diukur dari elemen yang relatif stabil dan stabilitas diukur dari elemen budaya yang berubah dengan cepat. Beberapa kebudayaan bersifat fleksibel dari yang lain, menyesuaikan diri terhadap perubahan yang cepat tanpa mengalami disintegrasi. Beberapa aspek kebudayaan relatif lebih reseptif terhadap perubahan dibandingkan dengan aspek yang lain. Teknologi berubah dengan cepat dibandingkan dengan nilai-nilai, namun demikian tidak ada nilai dan ideologi yang secara keseluruhan tetap bersifat statis.

B. Transmisi Sosial Budaya Pendidikan

Kajian sosial budaya pendidikan dari masa ke masa mengalami perubahan secara terminologis (peristilahan). Istilah tersebut mencakup enkulturasi (pembudayaan), sosialisasi (pemasyarakatan), pendidikan, dan sekolahan. Istilah tersebut sangat penting dikaji dalam pendidikan karena berguna untuk menjelaskan gejala yang terjadi dalam bidang pendidikan. Herskovits (1964:84) mengemukakan bahwa enkulturasi dan sosialisasi memiliki hakikat yang sama, aspek-aspek dari pengalaman belajar yang memberi ciri khusus atau yang membedakan manusia dari makhluk lain, dan dengan menggunakan pengalaman kehidupan maka manusia memperoleh kompetensi dalam kebudayaannya.

Enkulturasi merupakan proses pembiasaan secara sadar atau tidak sadar yang dilakukan dalam batas yang diizinkan secara norma oleh suatu kebudayaan. Proses enkulturasi bersifat kompleks dan berlangsung seumur hidup dan tiap tahap kehidupan memiliki perbedaan dalam hal objek budaya yang dialami. Fungsi enkulturasi adalah mempengaruhi perubahan respons individu terhadap perilaku budaya yang secara sosial disetujui sehingga menghasilkan tingkah laku kehidupan yang berbudaya. Tiap individu memiliki serangkaian mekanisme perilaku yang diwarisi dan dapat berubah karena pengaruh budaya masyarakat.

Kesamaan konsep enkulturasi dengan konsep sosial tercermin pada sosialisasi menunjukkan proses pengintegrasian individu ke dalam sebuah kelompok sosial sedangkan enkulturasi adalah proses yang menyebabkan individu memperoleh kompetensi dalam kebudayaan kelompok. Enkulturasi dan sosialisasi mengandung unsur nilai, pola bertingkah laku, dan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan oleh individu untuk dapat berfungsi sebagai anggota suatu masyarakat yang mendukung kebudayaan. Hansen (1979:28-29) mengemukakan *education is part from enkulturasi that is intentional effort and has systematic to submit know-how and erudition, habit thinks, and comport that demanded must has by students*. Pendidikan merupakan bagian dari enkulturasi yaitu usaha yang

disengaja dan bersifat sistematis untuk menyampaikan keterampilan dan pengetahuan, kebiasaan berpikir, dan bertingkah laku yang dituntut harus dimiliki oleh para peserta didik.

Pendidikan mengandung unsur pembelajaran dan kebudayaan diwariskan, dipelajari, dan dikembangkan dengan belajar. Lembaga pendidikan merupakan institusi yang secara sengaja dan sistematis melaksanakan kegiatan belajar dengan berusaha mewariskan dan mengembangkan individu sebagai peserta didik dengan tujuan memiliki pengetahuan, bermoral, dan berketerampilan. Berbagai saluran pendidikan digunakan dalam proses transmisi budaya mulai dari keluarga, sekolah, teman sepermainan, media massa, dan lingkungan secara efektif dan efisien untuk menyampaikan, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan.

C. Hubungan Sosial Budaya dengan Pendidikan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan zaman. Sehingga di dalam penentuan tujuan dan proses pelaksanaannya, pendidikan di Indonesia harus selalu berakar pada budaya atau karakter nasional dan disisi lain pendidikan juga harus mampu memenuhi tuntutan jaman, apalagi di era globalisasi yang menuntut *high skilled labor* (tenaga berketerampilan tinggi) yang bisa diterima oleh pasar global. Oleh karena itu orientasi pendidikan harus selalu merujuk pada dua hal penting yaitu melestarikan karakter nasional dan menciptakan lulusan yang dapat bersaing secara kompetitif di pasar global atau mencetak manusia yang bertindak lokal dan berpikir global.

Peran sekolah adalah sebagai pewaris, pemelihara, dan pembaharu kebudayaan. Kartono (1977:99) menyatakan bahwa sekolah hendaknya dapat dijadikan sebagai (1) sentrum budaya untuk mengoperkan nilai dan benda budaya sendiri agar budaya nasional tidak hilang ditelan masa, (2) arena untuk mengumpulkan ilmu pengetahuan modern, teknik dan pengalaman, dan (3) bengkel latihan untuk mempraktikkan hak asasi manusia selaku warga negara yang bebas ditengah iklim demokrasi. Sekolah memiliki tugas mewariskan, memelihara, dan mengembangkan budaya yang tercermin dalam kurikulum.

Archie (2008:18) berpendapat:

Teachers working with students need increased awareness that different cultures interpret important concepts differently. The teacher trained on concepts of cultural centers is more prepared to stimulate learning among her students; she is aware of another reality and armed with a tool to employ a more multicultural approach to learning. The multicultural movement affirms a need for more culturally consistent models of education.

Guru bekerja sama dengan peserta didik meningkatkan kesadaran dengan menterjemahkan konsep budaya dengan cara berbeda. Guru mengarahkan ke konsep pusat kebudayaan dengan mempersiapkan dan motivasi belajar diantara peserta didik untuk sadar akan kenyataan dan berbekal belajar sebagai alat mendekati dunia kerja. Pergerakan multikultural meyakinkan bidang pendidikan sebagai suatu kebutuhan dengan model budaya yang konsisten.

Mangungwijaya dalam Tilaar (2004:14) menyatakan bahwa proses pendidikan memiliki dua aspek yang saling mengisi, yaitu sebagai proses hominisasi dan proses humanisasi. Pendidikan harus memiliki paradigma baru yang dapat menyajikan model dan strategi pembelajaran sehingga diharapkan dapat menyeimbangkan proses hominisasi dan humanisasi. Proses hominisasi melihat manusia sebagai makhluk hidup dalam konteks lingkungan ekologi yang memerlukan terasahnya kemampuan intelektual untuk menghadapi tantangan globalisasi. Proses humanisasi menekankan manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai otonomi moral dan sensitivitas (kedaulatan budaya).

1. Hominisasi

Pendidikan sebagai proses hominisasi melihat manusia sebagai makhluk hidup di dalam dunia dan ekologi. Proses hominisasi tersebut manusia memerlukan kebutuhan biologis seperti makan, beranak pinak, memerlukan pemukiman, dan pekerjaan untuk menopang kehidupan. Proses hominisasi memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk biologis. Pendidikan harus mampu menghasilkan output kompetitif yang mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dalam menopang kehidupannya yang lebih baik secara ekonomis dan sosial. Pendidikan harus memiliki orientasi intelektual yang dibutuhkan manusia untuk bersaing secara kompetitif sehingga mereka dapat diterima pasar, terlebih dalam era global yang lebih berasaskan *knowledge based economy*.

2. Humanisasi

Pendidikan melihat manusia sebagai makhluk yang bermoral (*human being*). Makhluk yang bermoral berarti bahwa manusia bukan hanya sekedar hidup tetapi hidup untuk mewujudkan eksistensi, yaitu bahwa manusia hidup bersama-sama dengan sesama manusia sebagai ciptaan

Yang Maha Kuasa. Proses humanisasi tingkah laku manusia diarahkan kepada nilai-nilai kehidupan yang vertikal di dalam kenyataan hidup bersama dengan manusia lain. Nilai-nilai luhur tersebut, apakah diwahyukan ataupun yang dipelihara di dalam kehidupan bersama manusia karena disepakati, dapat mengikat kehidupan bersama menuju suatu cita-cita bersama, yaitu kehidupan yang lebih baik, lebih tenteram, dan berkeadilan. Hal-hal tersebut dijalin dan terjalin di dalam nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat atau suatu kelompok hidup bersama manusia. Proses humanisasi mencapai puncaknya pada seseorang yang berpendidikan dan berbudaya (*educated and civilized human being*).

Kebudayaan dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik sebab kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara informal maupun formal. Sebaliknya bentuk, ciri-ciri, dan pelaksanaan pendidikan ikut ditentukan oleh kebudayaan masyarakat di mana proses pendidikan itu berlangsung (Tirtarahardja dan Sulo, 2005). Salah satu fungsi dari sekolah mencakup fungsi sosial. Sekolah dalam menjalankan fungsi sosial harus mampu mensosialisasikan peserta didik, sehingga mereka nantinya bisa merubah diri mereka dan merubah masyarakatnya. Masyarakat merupakan sebuah tempat yang menjadi tempat hidup, tumbuh, berkembang dan berubah bagi manusia. Sehingga sekolah tidak bisa dipisahkan dengan manusia, karena manusia merupakan anggota masyarakat dan menjadi pendukung dari kebudayaan yang ada di dalamnya.

Danim (2003:90) berpendapat pendidikan merupakan proses pemanusiaan untuk menjadikan manusia memiliki rasa kemanusiaan, menjadi manusia dewasa dan manusia seutuhnya agar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi secara penuh sebagai pemegang mandat Ilahiah dan kultural. Menetapkan tujuan-tujuan pendidikan, kita bisa mendapatkannya melalui analisis kebutuhan dari siswa, analisis budaya dan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan pendapat Oliva (1992:81) yang mengemukakan:

Education purposes is got from research towards child need at our society, culture analysis or our culture and from research towards various our society need. Education character in society develop erudition, interest, idea, habit, and strength from every body where will he find the place and use place to form th and the society aims to end better.

Tujuan pendidikan didapatkan dari penelitian terhadap kebutuhan peserta di masyarakat, analisis kultur atau budaya dan dari penelitian terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Peran pendidikan dalam

masyarakat adalah untuk mengembangkan pengetahuan, minat, ide, kebiasaan, dan kekuatan dari tiap orang dimana ia akan menemukan tempatnya dan menggunakan tempat tersebut untuk membentuk dirinya sendiri dan masyarakatnya menuju akhir yang lebih baik. Sekolah dalam menjalankan perannya sebagai pewaris dan pemelihara kebudayaan, harus mewariskan budaya kepada generasi berikutnya melalui transmisi pendidikan dan kegiatan pembelajaran dengan penekanan pada faktor rasio dan wawasan, dan bukan merupakan kegiatan adaptasi secara pasif, kodrati, dan otomatis terhadap alam.

Kebudayaan merupakan cara hidup atau *way of life* dan cara hidup ini merupakan totalitas kualitas kultural yang meliputi sistem nilai dan ideal dari hidup yang memberi isi dan makna bagi kehidupan. Kartono (1977:11) berpendapat unsur budaya yang harus diikutsertakan dalam kebijakan pendidikan nasional (1) asas pandangan hidup secara regional dan lokal, (2) dasar operasionalisasi bagi kegiatan mendidik, (3) dasar materialisasi bagi penentuan kurikulum (muatan lokal), (4) landasan afeksi bagi motivasi belajar dan hidup, dan (5) landasan ideal bagi upaya pembangunan lebih maju. Pendidikan diharapkan dapat menjadi salah satu perwujudan aspirasi dan perwujudan kebudayaan bangsa, sehingga ketekunan mengkaji dan menemukan kembali nilai budaya bangsa asli adalah identik dengan mengkaji asas dinamik yang ada pada bangsa dan bersumber pada budaya daerah.

Sekolah dalam menjalankan perannya sebagai agen pembaharuan dalam budaya globalisasi, pendidikan dihadapkan pada dua fungsi yaitu mempersiapkan sumber daya manusia yang bisa bersaing secara global dan berusaha tetap melindungi budaya -budaya yang telah menjadi karakter nasional. Oleh sebab itu menurut Pidarta (1997:90) berpendapat pendidikan perlu (1) memasukkan materi pelajaran yang diambil dari keadaan nyata di masyarakat atau keluarga, (2) metode belajar yang mengaktifkan peserta didik, (3) mengadakan survey di masyarakat tentang berbagai kebudayaan, (4) ikut memecahkan masalah masyarakat, dan (5) memberi kesempatan berinovasi atau kreatif menciptakan sesuatu yang baru yang lebih baik tentang hidup dan kehidupan. Akibat dari kebudayaan masa kini terdapat kemungkinan pergeseran paradigma pendidikan yaitu dari sekolah ke masyarakat luas dengan berbagai pengalaman luas. Sehingga sekolah tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sekitarnya, keduanya saling menunjang. Sekolah merupakan agen pembangunan dan perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat.

D. Perkembangan Sosial Budaya dalam Pembangunan

Dinamika masyarakat mencerminkan proses perubahan yang bersifat evolusioner dan revolusioner. Perubahan-perubahan sosial, budaya, politik, dan ekonomi diharapkan meningkatkan kemaslahatan manusia dan berlangsung secara damai. Perubahan sosial terjadi karena adanya dorongan perkembangan masyarakat secara sadar atau tidak. Adanya perubahan sosial budaya menciptakan inovasi-penciptaan sehingga masyarakat lebih berkembang dalam kehidupannya. Kajian perkembangan sosial budaya dalam pembangunan terfokus pada aspek enkulturasi dan akulturasi pendidikan, modernisasi dan pembangunan, dan perubahan sosial budaya.

1. Enkulturasi dan Akulturasi Pendidikan

Landasan kultural dalam aktivitas pendidikan sangat penting untuk dilakukan, sebab pendidikan memang merupakan proses transformasi kebudayaan dari satu generasi ke generasi lain. Sekolah sebagai lembaga pendidikan secara historis dibentuk atau didirikan oleh dan untuk masyarakat tertentu. Sistem sosial sekolah sebagai pelaksana pendidikan mempunyai struktur proses kegiatan dan pola-pola interaksi yang akan menentukan program sekolah. Struktur dari sistem sekolah adalah peranan serta fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh pemegang peranan tersebut. Guru adalah pemegang peranan yang harus mengetahui fungsinya dalam keseluruhan sistem pendidikan.

Penanaman budaya dan nilai-nilainya oleh sekolah akan mendorong terjadinya proses enkulturasi. Manan (1989) menyatakan bahwa pendidikan adalah enkulturasi. Pendidikan adalah suatu proses membuat orang menerima budaya, membuat orang berperilaku mengikuti budaya yang diterima dirinya. Enkulturasi terjadi di mana-mana, di setiap tempat hidup seseorang dan di setiap waktu. Berdasarkan hal tersebut muncul pengertian kurikulum yang sangat luas, yaitu semua lingkungan tempat hidup manusia. Sebab dimanapun orang berada maka ditempat itu juga terjadi proses pendidikan dan enkulturasi. Sekolah adalah salah satu dari tempat enkulturasi, tempat-tempat lainnya adalah keluarga, perkumpulan pemuda, perkumpulan olah raga, keagamaan, dan di tempat-tempat kursus dan latihan.

Proses enkulturasi ini peranan sekolah adalah sebagai (1) pewaris kebudayaan, guru-guru di sekolah harus dapat berperan sebagai model kebudayaan yang dapat dipedomani dan ditiru oleh peserta didik, agar peserta didik memahami dan mengadopsi nilai-nilai budaya masyarakatnya maka guru harus dapat mengajarkan nilai-nilai yang diyakini masyarakat tempat sekolah itu. Contohnya, mengenai

kedisiplinan, rasa hormat dan patuh, bekerja keras, dan kehidupan bernegara, sekolahlah yang berkompeten untuk tugas-tugas pewarisan budaya seperti itu; (2) sebagai pemelihara kebudayaan, artinya sekolah harus berusaha melestarikan nilai-nilai budaya daerah tempat sekolah. Misalnya, pengguna bahasa daerah, kesenian daerah dan budi pekerti, selain itu juga berupaya mempersatukan nilai-nilai budaya yang beragam demi kepentingan budaya bangsa (nasional).

Pembangunan pendidikan nasional juga harus dikaitkan dengan kerangka kebudayaan bangsa sendiri. Oleh karena itu, wawasan kultural mengenai gejala pendidikan dan tujuan pendidikan nasional kita tetap diperlukan, demi pengayaan wawasan-wawasan lainnya. Fungsi lembaga pendidikan ialah memelihara, mengembangkan, dan mewujudkan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat pemiliknya (mentransformasikan nilai-nilai budaya). Hasan (2004:52) menyatakan bahwa pendidikan tidak hanya merupakan prakarsa bagi terjadinya pengalihan pengetahuan dan ketrampilan (*transfer of knowledge and skill*) tetapi juga meliputi pengalihan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial (*transmission of cultural values and social norms*). Tiap masyarakat sebagai pengemban budaya (*culture bearer*) berkepentingan untuk memelihara keterjalinan antara berbagai upaya pendidikan dengan usaha pengembangan kebudayaannya.

Selain proses enkulturasi dalam pendidikan, terjadi pula proses akulturasi dalam pendidikan. Akulturasi (*acculturation*) adalah proses yang perubahan-perubahan dalam budaya dan bahasa sebuah kelompok terjadi melalui interaksi dengan kelompok yang berbeda bahasa dan kebudayaannya. Kebudayaan merupakan produk pendidikan. Produk ini dapat dihasilkan salah satunya melalui akulturasi dari berbagai macam budaya yang ada dalam lingkungan pendidikan, baik itu melalui berbagai literatur yang digunakan, penyampaian dari guru maupun dari siswa dengan berbagai latar belakang sosial, budaya dan ekonomi yang berbeda.

Peursen dalam Kartono (1977:99) menyatakan bahwa seluruh kebudayaan manusia itu adalah produk dari kegiatan pembelajaran yang berlangsung terus-menerus sepanjang sejarah manusia. Setiap peserta didik, pendidik, dan lingkungannya memiliki potensi yang dapat dikembangkan secara lebih jauh. Berbagai potensi ini dalam lingkup pendidikan dapat membentuk suatu produk budaya baru yang tidak ada sebelumnya. Sekolah memiliki peran sebagai agen pembaharuan kebudayaan dengan cara melakukan reproduksi budaya (nilai-nilai dan kebiasaan baru diberikan secara langsung melalui mata pelajaran yang relevan atau dengan kegiatan ekstrakurikuler), difusi kebudayaan (murid

dibimbing, dibantu menyebarkan hasil kebudayaan yang diperoleh di sekolahnya kepada keluarga atau masyarakat), dan peningkatan kemampuan murid berpikir kritis.

Proses kegiatan pendidikan dapat berupa kegiatan pembelajaran dan sistem komunikasi antara guru dengan peserta didik. Pola interaksi sosial dalam sistem pendidikan di sekolah yaitu berupa interaksi guru dengan peserta didik dan dinamika kelompok. Akulturasi memiliki nilai keluwesan dan kedinamisan sehingga bisa menutup kelemahan yang ditinggalkan oleh enkulturasi. Oleh karena itu, akan sangat tidak memadai jika sekolah hanya menunjukkan perannya sebagai lembaga tempat berlangsungnya proses enkulturasi, karena proses enkulturasi saja tanpa diikuti oleh proses akulturasi hanya akan menciptakan orang yang kaku dalam budaya sendiri. Orang yang seperti ini hanya akan mampu berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan budaya yang dipelajarinya. Pendidikan tidak didirikan untuk menciptakan robot-robot budaya, oleh karena itu pendidikan harus mampu mendorong siswa untuk berpikir kritis sehingga mereka tidak hanya menerima, tapi juga secara dinamis mampu mengembangkan, memperbaharui dan menciptakan hal-hal baru.

Pidarta (1997:88) menyatakan bahwa sejak dini manusia perlu dididik berpikir kritis. Kemampuan untuk mempertimbangkan secara bebas dikembangkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberi kesempatan mengamati, melaksanakan, menghayati, dan menilai kebudayaan. Cara ini membuat individu tidak menerima begitu saja suatu kebudayaan melainkan melalui pemahaman dan perasaan dikala berada dalam kandungan budaya, yang akhirnya menimbulkan penilaian menerima, merevisi, atau menolak budaya itu. Pendidikan seperti ini membuat individu terbiasa dengan pemikiran terbuka dan lentur.

2. Modernisasi dan Pembangunan

Konsep perubahan sosial budaya yang mendominasi ilmu-ilmu sosial adalah konsep modernisasi (*modernization*) dan konsep pembangunan (*development*). Pengembangan intelektual merupakan pengembangan dalam bidang gagasan yang mencerminkan pola pertumbuhan dan interaksi antara eksperimen empiris, pemikiran politik, seni, dan sastra, dan spekulasi tentang hakikat manusia, Tuhan, dan alam semesta. Pengembangan intelektual berdampak pada aspek kehidupan seperti ilmu pengetahuan, sosial, budaya, politik, dan industri. Hal tersebut meningkatkan kemajuan ke arah modernisasi pembangunan segala bidang.

Dinamika kehidupan modern menghasilkan berbagai tantangan yang mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat modern yang secara simultan memerlukan daya penyesuaian, daya inovasi, dan kreasi individu sebagai anggota masyarakat. Individu yang tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang setiap saat mengalami perubahan dan perkembangan akan ketinggalan dan tergilas dengan kemajuan jaman. Pendidikan merupakan alat untuk menuju perkembangan yang modern, perubahan sosial budaya, dan pengembangan ilmu pengetahuan, penyesuaian sikap dan nilai yang mendukung pembangunan. Pembangunan pendidikan memerlukan anggaran, isi materi, metode, dan dukungan sosial budaya. Dukungan tersebut diperlukan untuk relevansi pengembangan pendidikan dengan dunia kerja dan realita sosial. Semua unsur yang diperlukan dalam pengembangan pendidikan saling berhubungan, saling ketergantungan, dan saling memengaruhi dalam proses perubahan sosial budaya masyarakat dan proses pembangunan masyarakat.

3. Perubahan Sosial Budaya

Proses perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dari tradisional menuju ke masyarakat yang modern. Arah perubahan sosial budaya, modernisasi, dan pembangunan direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dimana ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi alat untuk membantu dan mempermudah aktivitas manusia. Kehidupan sekarang dan di masa mendatang menuntut penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Individu atau masyarakat yang tidak dapat menguasai teknologi akan tertinggal di belakang.

Pendidikan sebagai konsekuensi dari adanya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum. Pendidikan merupakan institusi yang dibentuk untuk tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa. Hagen (1962:99) mengemukakan faktor yang mempengaruhi perubahan masyarakat tradisional ke arah modern yaitu (1) meluasnya sifat kreatifitas, kesanggupan menyelesaikan masalah, dan menggunakannya untuk maksud ekonomis, (2) sikap positif terhadap kerja teknologi dan keseimbangan lingkungan alam. Kedua faktor tersebut disalurkan ke arah inovasi teknologi.

Proses pembangunan aspek kehidupan mencakup proses modernisasi dilakukan secara kontinyu, sistematis, dan komprehensif dengan memaksimalkan penggunaan potensi sumber daya secara efektif dan efisien. Kemampuan tersebut diformulasikan dalam bentuk gagasan dan pelaksanaan dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia dan menghasilkan norma selanjutnya menciptakan institusi pendidikan

sebagai alat penopang pembangunan. Pendidikan diharapkan dapat mengarahkan kepada perkembangan sosial budaya dan mendukung pembangunan dan penguasaan berbagai keterampilan dalam inovasi menciptakan peralatan teknologi dan menggunakannya untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

TUJUAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN

A. Kewajiban Sosiologi Pendidikan

Menurut Lawang Robert M. Z. (1986:91), sosiologi pendidikan mempunyai kewajiban untuk menganalisa evolusi dari lembaga -lembaga pendidikan dalam hubungannya dengan perkembangan manusia, dan dibatasi oleh pengaruh-pengaruh dari lembaga pendidikan yang menentukan kepribadian social dari tiap-tiap individu. Jadi prinsipnya antara individu dengan lembaga-lembaga social itu selalu saling pengaruh mempengaruhi (*process social interaction*). Sosiologi pendidikan adalah ilmu yang membicarakan dan menjelaskan hubungan -hubungan social yang mempengaruhi individu untuk mendapatkan serta mengorganisasi pengalamannya. Sosiologi pendidikan mempelajari kelakuan sosial serta perinsip-perinsip untuk mengontrolnya.

Parker, S. R. (1990:99) secara spesifik memandang sosiologi pendidikan sebagai studi yang komprehensif tentang segala aspek pendidikan dari segi ilmu yang diterapkan. Bagi Payne sosiologi pendidikan tidak hanya meliputi segala sesuatu dalam bidang sosiologi yang dapat dikenakan analisis sosiologis. Tujuan utamanya ialah memberikan guru-guru, para peneliti dan orang lain yang menaruh perhatian akan pendidikan latihan yang serasi dan efektif dalam sosiologi yang dapat memberikan

sumbangannya kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang pendidikan

Menurut *Dictionary of Sociology*, sosiologi pendidikan ialah sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Menurut Prof. DR.S.Nasution. Sosiologi pendidikan ialah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik.

Menurut F.G. Robbins, Sosiologi pendidikan adalah sosiologi khusus yang bertugas menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan.

Francis Broun mengemukakan bahwa sosiologi pendidikan memperhatikan pengaruh keseluruhan lingkungan budaya sebagai tempat dan cara individu memperoleh dan mengorganisasi pengalamannya. Sosiologi pendidikan adalah Ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk memperoleh perkembangan kepribadian individu yang lebih baik.

Dari kedua pengertian dan beberapa pengertian yang telah dikemukakan dapat disebutkan beberapa konsep tentang tujuan sosiologi pendidikan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis proses sosialisasi anak, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dalam hal ini harus diperhatikan pengaruh lingkungan dan kebudayaan masyarakat terhadap perkembangan pribadi anak. Misalnya, anak yang terdidik dengan baik dalam keluarga yang religius, setelah dewasa/tua akan cenderung menjadi manusia yang religius pula. Anak yang terdidik dalam keluarga intelektual akan cenderung memilih/mengutamakan jalur intelektual pula, dan sebagainya.
- 2) Sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis perkembangan dan kemajuan social. Banyak orang/pakar yang beranggapan bahwa pendidikan memberikan kemungkinan yang besar bagi kemajuan masyarakat, karena dengan memiliki ijazah yang semakin tinggi akan lebih mampu menduduki jabatan yang lebih tinggi pula (serta penghasilan yang lebih banyak pula, guna menambah kesejahteraan social). Disamping itu dengan pengetahuan dan keterampilan yang banyak dapat mengembangkan aktivitas serta kreativitas sosial.
- 3) Sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis status pendidikan dalam masyarakat. Berdirinya suatu lembaga pendidikan dalam masyarakat sering disesuaikan dengan tingkatan daerah di mana lembaga pendidikan itu berada. Misalnya, perguruan tinggi bisa didirikan di tingkat propinsi atau minimal kabupaten yang cukup animo mahasiswanya serta tersedianya dosen yang bonafid.

- 4) Sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis partisipasi orang-orang terdidik/berpendidikan dalam kegiatan social. Peranan/aktivitas warga yang berpendidikan / intelektual sering menjadi ukuran tentang maju dan berkembang kehidupan masyarakat. Sebaiknya warga yang berpendidikan tidak segan-segan berpartisipasi aktif dalam kegiatan social, terutama dalam memajukan kepentingan / kebutuhan masyarakat. Ia harus menjadi motor penggerak dari peningkatan taraf hidup sosial.
- 5) Sosiologi pendidikan bertujuan membantu menentukan tujuan pendidikan. Sejumlah pakar berpendapat bahwa tujuan pendidikan nasional harus bertolak dan dapat dipulangkan kepada filsafat hidup bangsa tersebut. Seperti di Indonesia, Pancasila sebagai filsafat hidup dan kepribadian bangsa Indonesia harus menjadi dasar untuk menentukan tujuan pendidikan Nasional serta tujuan pendidikan lainnya.

Menurut Johnson Doyle Paul (1980:91), sosiologi pendidikan bertujuan utama memberi kepada guru- guru (termasuk para peneliti dan siapa pun yang terkait dalam bidang pendidikan) latihan - latihan yang efektif dalam bidang sosiologi sehingga dapat memberikan sumbangannya secara cepat dan tepat kepada masalah pendidikan. Menurut pendapatnya, sosiologi pendidikan tidak hanya berkenaan dengan proses belajar dan sosialisasi yang terkait dengan sosiologi saja, tetapi juga segala sesuatu dalam bidang pendidikan yang dapat dianalisis sosiologi. Seperti sosiologi yang digunakan untuk meningkatkan teknik mengajar yaitu metode sosiodrama, bermain peranan (*role playing*) dan sebagainya.dengan demikian sosiologi pendidikan bermanfaat besar bagi para pendidik, selain berharga untuk menganalisis pendidikan, juga bermanfaat untuk memahami hubungan antara manusia di sekolah serta struktur masyarakat. Sosiologi pendidikan tidak hanya mempelajari masalah - masalah sosial dalam pendidikan saja, melainkan juga hal - hal pokok lain, seperti tujuan pendidikan, bahan kurikulum, strategi belajar, sarana belajar, dan sebagainya. Sosiologi pendidikan ialah analisis ilmiah atas proses sosial dan pola- pola sosial yang terdapat dalam sistem pendidikan

Sosiologi Pendidikan di dalam menjalankan fungsinya untuk menelaah berbagai macam hubungan antara pendidikan dengan masyarakat, harus memperhatikan sejumlah konsep-konsep umum. Sosiologi pendidikan merupakan suatu disiplin ilmu yang masih muda dan belum banyak berkembang.

Sosiologi Pendidikan dalam perkembangannya mempunyai beberapa tujuan praktis, diantaranya adalah :

- 1) Memberikan analisis terhadap pendidikan sebagai alat kemajuan sosial.
- 2) Merumuskan tujuan pendidikan
- 3) Sebagai sebuah bentuk aplikasi Sosiologi terhadap pendidikan
- 4) Menjelaskan proses pendidikan sebagai proses sosialisasi
- 5) Memberikan pengajaran Sosiologi bagi tenaga-tenaga kependidikan dan penelitian pendidikan
- 6) Menjelaskan peranan pendidikan di masyarakat
- 7) Menjelaskan pola interaksi di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat

B. Keberfungsian Sosiologi Pendidikan

Para ahli Sosiologi dan ahli Pendidikan sepakat bahwa, sesuai dengan namanya, Sosiologi Pendidikan atau *Sociology of Education* (juga *Educational Sociology*) adalah cabang ilmu Sosiologi, yang pengkajiannya diperlukan oleh profesional dibidang pendidikan (calon guru, para guru, dan pemikir pendidikan) dan para mahasiswa serta profesional sosiologi.

Ruang lingkup Sosiologi Pendidikan, ada empat pokok bahasan berikut: (1) hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial lain, (2) hubungan sekolah dengan komunitas sekitar, (3) hubungan antar manusia dalam sistem pendidikan, (4) pengaruh sekolah terhadap perilaku anak didik (Rochman Natawidjaja, et. Al., 2007: 81). Sosiologi Pendidikan diharapkan mampu memberikan rekomendasi mengenai bagaimana harapan dan tuntutan masyarakat mengenai isi dan proses pendidikan itu, atau bagaimana sebaiknya pendidikan itu berlangsung menurut kacamata kepentingan masyarakat, baik pada level nasional maupun lokal.

Sosiologi Pendidikan secara operasional dapat defenisi sebagai cabang sosiologi yang memusatkan perhatian pada mempelajari hubungan antara pranata pendidikan dengan pranata kehidupan lain, antara unit pendidikan dengan komunitas sekitar, interaksi social antara orang-orang dalam satu unit pendidikan, dan dampak pendidikan pada kehidupan peserta didik (Rochman Natawidjaja, et. Al., 2007: 82).

Sebagaimana ilmu pengetahuan pada umumnya, Sosiologi Pendidikan dituntut melakukan tiga fungsi pokok.

Pertama , fungsi eksplanasi, yaitu menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk ke dalam ruang lingkup pembahasannya. Untuk diperlukan konsep-konsep, proposisi-proposisi mulai dari yang bercorak generalisasi empirik sampai dalil dan hukum-

hukum yang mantap, data dan informasi mengenai hasil penelitian lapangan yang actual, baik dari lingkungan sendiri maupun dari lingkungan lain, serta informasi tentang masalah dan tantangan yang dihadapi. Dengan informasi yang lengkap dan akurat, komunikasi akan memperoleh pemahaman dan wawasan yang baik dan akan dapat menafsirkan fenomena- fenomena yang dihadapi secara akurat. Penjelasan-penjelasan itu bisa disampaikan melalui berbagai media komunikasi.

Kedua, fungsi prediksi, yaitu meramalkan kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Sejalan dengan itu, tuntutan masyarakat akan berubah dan berkembang akibat bekerjanya faktor-faktor internal dan eksternal yang masuk ke dalam masyarakat melalui berbagai media komunikasi. Fungsi prediksi ini amat diperlukan dalam perencanaan pengembangan pendidikan guna mengantisipasi kondisi dan tantangan baru.

Ketiga, fungsi utilisasi, yaitu menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat seperti masalah lapangan kerja dan pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain-lain yang memerlukan dukungan pendidikan, dan masalah penyelenggaraan pendidikan sendiri.

Jadi, secara umum Sosiologi Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan fungsi-fungsinya selaku ilmu pengetahuan (pemahaman eksplanasi, prediksi, dan utilisasi) melalui pengkajian tentang keterkaitan fenomena-fenomena sosial dan pendidikan, dalam rangka mencari model-model pendidikan yang lebih fungsional dalam kehidupan masyarakat. Secara khusus, Sosiologi Pendidikan berusaha untuk menghimpun data dan informasi tentang interaksi sosial di antara orang-orang yang terlibat dalam institusi pendidikan dan dampaknya bagi peserta didik, tentang hubungan antara lembaga pendidikan dan komunitas sekitarnya, dan tentang hubungan antara pendidikan dengan pranata kehidupan lain.

Masyarakat selalu mencakup sekelompok orang yang berinteraksi antar sesamanya, saling tergantung dan terikat oleh nilai dan norma yang dipatuhi bersama, pada umumnya bertempat tinggal di wilayah tertentu, dan adakalanya mereka memiliki hubungan darah atau memiliki kepentingan bersama. Masyarakat dapat merupakan suatu kesatuan hidup dalam arti luas ataupun dalam arti sempit. Masyarakat dalam arti luas pada umumnya lebih abstrak misalnya masyarakat bangsa, sedang dalam arti sempit lebih konkrit misalnya marga atau suku. Masyarakat sebagai kesatuan hidup memiliki ciri utama, antara lain: (1) ada interaksi antara warga-warganya, (2) pola tingkah laku warganya diatur oleh adapt

istiadat, norma-norma, hukum, dan aturan-aturan khas, (3) ada rasa identitas kuat yang mengikat para warganya. Kesatuan wilayah, kesatuan adat- istiadat, rasa identitas, dan rasa loyalitas terhadap kelompoknya merupakan pangkal dari perasaan bangga sebagai patriotisme, nasionalisme, jiwa korps, dan kesetiakawanan sosial (Umar Tirtarahardja dan La Sulo, 1994: 100).

Masyarakat Indonesia mempunyai perjalanan sejarah yang panjang. Dari dulu hingga kini, ciri yang menonjol dari masyarakat Indonesia adalah sebagai masyarakat majemuk yang tersebar di ribuan pulau di nusantara. Melalui perjalanan panjang, masyarakat yang bhineka tersebut akhirnya mencapai satu kesatuan politik untuk mendirikan satu negara serta berusaha mewujudkan satu masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang bhinneka tunggal ika. Sampai saat ini, masyarakat Indonesia masih ditandai oleh dua ciri yang unik, yakni (1) secara horizontal ditandai oleh adanya kesatuan-kesatuan social atau komunitas berdasarkan perbedaan suku, agama, adat istiadat, dan kedaerahan, dan (2) secara vertical ditandai oleh adanya perbedaan pola kehidupan antara lapisan atas, menengah, dan lapisan bawah.

Pada zaman penjajahan, sifat dasar masyarakat Indonesia yang menonjol adalah (1) terjadi segmentasi ke dalam bentuk kelompok social atau golongan social jajahan yang seringkali memiliki sub-kebudayaan sendiri, (2) memiliki struktur social yang terbagi-bagi, (3) seringkali anggota masyarakat atau kelompok tidak mengembangkan consensus di antara mereka terhadap nilai-nilai yang bersifat mendasar, (4) diantara kelompok relative seringkali mengalami konflik, (5) terdapat saling ketergantungan di bidang ekonomi, (6) adanya dominasi politiuik oleh suatu kelompok atas kelompok -kelompok social yang lain, dan (7) secara relative integrasi social sukar dapat tumbuh (Wayan Ardhana, 1986: Modul 1/70).

Masyarakat Indonesia setelah kemerdekaan, utamanya pada zaman pemerintahan Orde Baru, telah banyak mengalami perubahan. Sebagai masyarakat majemuk, maka komunitas dengan ciri-ciri unik, baik secara horizontal maupun secara vertical, masih dapat ditemukan, demikian pula halnya dengan sifat- sifat dasar dari zaman penjajahan belum terhapus seluruhnya. Namun niat politik yang kuat menjadi suatu masyarakat bangsa Indonesia serta kemajuan dalam berbagai bidang pembangunan, maka sisi ketunggalan dari “bhinneka tunggal ika” makin mencuat. Berbagai upaya dilakukan, baik melalui kegiatan jalur sekolah maupun jalur luar sekolah, telah menumbuhkan benih-benih persatuan dan kesatuan yang semakin kokoh.

Berbagai upaya telah dilakukan dengan tidak mengabaikan kenyataan tentang kemajemukan masyarakat Indonesia. Hal terakhir tersebut kini makin mendapat perhatian yang semestinya dengan antara lain dimasukkannya muatan lokal (mulok) di dalam kurikulum sekolah. Perlu ditegaskan bahwa muatan local di dalam kurikulum tidak dimaksudkan sebagai upaya membentuk “manusia lokal”, akan tetapi haruslah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan “manusia Indonesia” di suatu lokal tertentu. Dengan demikian akan dapat diwujudkan manusia Indonesia dengan wawasan nusantara dan berjiwa nasional akan tetapi yang memahami dan menyatu dengan lingkungan (alam, sosial, dan budaya) de sekitarnya.

Dasar sosiologis berkenaan dengan perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat. Sosiologi pendidikan merupakan analisa ilmiah tentang proses social di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi empat bidang:

1. hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial lain
2. hubungan sekolah dengan komunitas sekitar
3. hubungan antar manusia dalam sistem pendidikan
4. pengaruh sekolah terhadap perilaku anak didik

Sosiologi pendidikan dituntut untuk melakukan tiga fungsi, yaitu: (1) fungsi eksplanasi, (2) fungsi prediksi, (3) fungsi utilisasi. Secara umum, sosiologi pendidikan bertujuan untuk mengembangkan fungsi-fungsinya tersebut melalui pengkajian fenomena-fenomena sosial dan pendidikan, dalam rangka mencari model-model pendidikan yang lebih fungsional dalam kehidupan masyarakat.

Perkembangan masyarakat Indonesia dari masa ke masa telah mempengaruhi sistem pendidikan nasional. Hal tersebut sangatlah wajar, mengingat kebutuhan akan pendidikan semakin meningkat dan kompleks. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan masyarakat terutama dalam hal menumbuhkembangkan ke-Bhineka tunggal ika-an, baik melalui kegiatan jalur sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

BAB V

LINGKUNGAN SOSIAL PENDIDIKAN

A. Keluarga Sebagai Lembaga Pendidikan

Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil dalam tatanan kehidupan manusia. Keluarga adalah kelompok masyarakat paling tua dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Seperti halnya dengan eksistensi masyarakat, keluarga pun senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan tersebut terjadi antara lain dalam status dan kedudukan orang tua, status anggota dalam keluarga, pandangan terhadap jumlah anak, pandangan tentang pendidikan bagi anak-anak, serta nilai-nilai dan pandangan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga di masyarakat.

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama dalam kehidupan anak. Dalam lingkungan keluarga inilah anak mulai belajar berbagai hal yang berdampak terhadap perkembangan intelektual, sosial, dan sikap anak. Salah satu hal yang mempengaruhi perkembangan anak dalam keluarga adalah tipe pelayanan orangtua. Tipe pelayanan orangtua dalam keluarga ada empat macam, sebagai berikut:

Pertama, tipe pelayanan orangtua yang hangat yakni yang memberikan kasih sayang yang tulus dan perhatian besar terhadap kepentingan anak. Anak-anak dari keluarga yang memiliki tipe pelayanan ini menunjukkan sifat mandiri dan percaya diri yang tinggi, *kedua*, tipe pelayanan orangtua yang mengekang ditandai dengan sifat orangtua yang selaku memberikan larangan dan bersifat otoriter terhadap anaknya. Tipe pelayanan seperti ini membuat

anak merasa dangkal, takut yang akhirnya menimbulkan kenakalan pada anak laki-laki dan anak perempuan cenderung pasif, dan hidup bergantung pada orangtua, *ketiga*, tipe pelayanan yang mengabaikan, ditandai dengan sifat orangtua memberikan kebebasan yang berlebihan dan tidak memperdulikan anaknya. Dampak pelayanan seperti ini membuat anak cenderung berperilaku tidak terarah dan tidak terpimpin; *keempat*, tipe pelayanan orangtua yang bermusuhan dan bersikap kekerasan terhadap anaknya. Dampak pelayanan seperti ini membuat anak menjadi pembangkang, agresif, tidak berdaya dan pasif. Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa bentuk pelayanan orangtua dalam keluarga mempengaruhi perkembangan anak.

Keluarga sudah dikenal sebagai lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Hal ini mengindikasikan betapa pentingnya peran dan pengaruh lingkungan keluarga dalam pembentukan perilaku dan kepribadian anak. Pandangan yang sangat menghargai posisi dan peran keluarga sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang istimewa. Pandangan seperti ini sangat logis dan mudah dipahami karena beberapa alasan berikut ini :

Pertama , keluarga lazimnya merupakan pihak yang paling awal memberikan perlakuan kepada anak. Misalnya sejak anak lahir, pihak keluargalah yang langsung menyambut dan memberikan layanan interaktif kepada anak. Hal ini diwujudkan dalam bentuk perilaku mengurus anak. Apa yang dilakukan dan diberikan oleh pihak keluarga tersebut menjadi sumber perlakuan pertama yang akan mempengaruhi pembentukan karakteristik pribadi dan perilaku anak. Menurut para ahli, pengalaman hidup pada masa awal ini akan menjadi fundasi bagi proses perkembangan dan pembelajaran anak selanjutnya.

Kedua, sebagian besar waktu anak umumnya dihabiskan di lingkungan keluarga. Kalau di sekolah anak menghabiskan waktu sekitar lima atau enam jam, maka di rumah anak bias menghabiskan waktu sekitar dua kali lipat atau lebih dari itu. Besarnya peluang dan kesempatan interaksi ini akan sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak. Jika kesempatan yang banyak ini diisi dengan hal -hal yang sangat bermakna dan positif bagi perkembangan anak maka kecenderungan pengaruhnya akan positif pula. Sebaliknya apabila kesempatan itu disia-siakan, apalagi diisi dengan hal-hal yang tidak mendukung perkembangan anak, maka pengaruhnya bisa menjadi sangat lain.

Ketiga, karakteristik hubungan orangtua -anak sangat berbeda dari hubungan anak dengan pihak -pihak lainnya, misalnya guru, teman dan sebagainya. Kepada orangtua, disamping anak memiliki ketergantungan secara materi, ia juga memiliki ikatan psikologis tertentu sejak dalam

kandungan sudah dibangun melalui jalinan kasih sayang dan pengaruh-pengaruh normatif tertentu. Kualitas hubungan psikologis ini tidak dimiliki anak dalam berhubungan dengan orang lain, termasuk guru di sekolah.

Keempat, interaksi kehidupan orangtua dan anak di rumah bersifat “asli”, seadanya dan tidak dibuat-buat. Perilaku orangtua yang “asli” inilah cenderung akan menjadi nasihat paling bermakna bagi anak daripada nasihat kata-kata dan bentuk-bentuk nasihat formal lainnya.

Dalam prakteknya, bagaimanapun pengaruh keluarga itu akan bervariasi. Hal itu tergantung kepada bentuk, kualitas, dan intensitas perlakuan yang terjadi, disamping tergantung pula kepada kondisi anak sendiri. Walaupun ada prinsip-prinsip umum yang dapat dijadikan bahan rujukan oleh orangtua dalam memperlakukan anak, unsur keunikan anak tetap merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Peran keluarga lebih banyak bersifat memberikan dukungan baik dalam hal penyediaan fasilitas maupun penciptaan suasana belajar yang kondusif. Sebaliknya dalam hal pembentukan perilaku, sikap dan kebiasaan, penanaman nilai, perilaku-perilaku sejenisnya, lingkungan keluarga bisa memberikan pengaruh yang kuat dan langsung.

Berkaitan dengan perkembangan aspek-aspek perilaku seperti itu, keluarga dapat berfungsi langsung sebagai lingkungan kehidupan nyata untuk mempraktekkan aspek-aspek perilaku tersebut. Ada beberapa cara yang dilakukan orangtua dalam mempengaruhi anak.

Pertama, pemodelan perilaku (*modeling of behaviours*). Baik disengaja atau tidak, orangtua dengan sendirinya menjadi model bagi anaknya. Cara dan gaya orangtua berperilaku akan menjadi sumber objek tiruan bagi anak. Tidak hanya yang baik-baik saja yang diterima oleh anak, akan tetapi sifat-sifat yang jeleknya pun akan dilihat pula. Jika orangtua biasa berperilaku kasar dalam berinteraksi di lingkungan rumahnya, maka kecenderungan anak-anaknya untuk akan berperilaku seperti itu sangat besar. Sebaliknya kalau orangtua berperilaku dan bertutur kata lemah lembut hamper tidak pernah ada marah-marah dan kekerasan maka anak-anaknya juga akan kecenderungan berperilaku demikian.

Kedua, memberikan ganjaran dan hukuman (*giving rewards and punishment*). Orangtua mempengaruhi anaknya dengan cara memberi ganjaran terhadap perilaku tertentu yang dilakukan oleh anaknya dan memberi hukuman terhadap beberapa perilaku lainnya. Misalnya, seorang anak yang mendapat rengking satu mendapat pujian dari orang tuanya; sementara anak yang tidak pernah belajar mendapat teguran dari orang tuanya.

Ketiga perintah langsung (*direct instruction*). Kadang -kadang orangtua secara sederhana mengatakan kepada anak seperti berikut: "Jangan malas belajar", "Jangan suka coret-coret di tembok!", "Cepat mandi! Nanti sekolah kesiangan!". Dari perintah-perintah seperti ini, anak sering mengambil pelajaran tertentu sehingga lebih memahami harapan-harapan dan keinginan-keinginan orangtuanya.

Keempat, menyatakan peraturan-peraturan (*stating rules*). Secara berulang-ulang orangtua sering menyatakan peraturan-peraturan umum yang berlaku di rumah, meskipun hal itu sering dinyatakan secara tidak tertulis. Misalnya orangtua berkata "Kalau sudah dari kamar kecil tutup pintunya dan matikan lampunya". Dengan cara ini, anak didorong untuk melihat perilakunya apakah sudah benar atau belum melalui perbandingan dengan peraturan-peraturan tersebut.

Kelima, nalar (*reasoning*). Pada saat-saat menjengkelkan, orangtua bisa mempertanyakan kapasitas anak untuk bernalar, dan cara itu digunakan orangtua untuk mempengaruhi anaknya. Sebagai contoh, orangtua bisa mengingatkan anaknya tentang kesenjangan perilaku dengan nilai-nilai yang dianut melalui pertanyaan berikut: "Apakah memukul teman itu merupakan pekerjaan yang baik?". Atau orangtua bisa mendefinisikan dan memberikan label terhadap aktivitas-aktivitas anak dalam cara-cara yang dianggap mempengaruhi perilakunya seperti : "Sekarang rangking kamu jelek karena kamu malas belajar, dan bukan karena kamu bodoh".

Keenam, menyediakan fasilitas atau bahan-bahan dan adegan suasana (*providing materials and settings*). Orangtua dapat mempengaruhi perilaku anak dengan suasana. Misalnya, untuk menciptakan suasana yang menimbulkan minat belajar anak, orangtua membelikan buku-buku yang diminati anak daripada membelikan pistol-pistolan.

Dalam kehidupan bermasyarakat dikenal 2 (dua) macam bentuk keluarga, yaitu (1) Keluarga kecil, dan (2) keluarga besar.

- 1) *Keluarga kecil*; adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan Pernikahan yang terdiri atas seorang ibu, ayah dan anak-anak atau tanpa anak-anak, dan bertempat tinggal bersama dalam satu rumah.
- 2) *Keluarga besar*; anggota-anggotanya diikat berdasarkan hubungan darah. Keluarga ini anggotanya tidak hanya terdiri dari ibu, ayah dan anak, tetapi juga kakek, cucu, keponakan saudara sepupu, dan anggota lainnya. Keluarga besar tidak selalu bertempat tinggal dalam satu rumah.

Dalam keluarga secara kodrat terdapat pembagian tugas, tanggung jawab dan fungsi-fungsi. Bapak adalah pemimpin, ia bertanggung jawab sepenuhnya dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu kedudukan

Bapak sangat menen-tukan. Namun demikian seorang ibu, juga mempunyai tugas, tanggung jawab serta fungsi-fungsi yang tidak kalah pentingnya dalam keluarga dibandingkan dengan tugas, tanggung jawab, dan fungsi-fungsi yang diperankan oleh sang ayah. Demikian pula anak-anak juga mempunyai tugas, tanggung jawab serta fungsi-fungsi tertentu yang ikut menunjang kehidupan positif dalam keluarga.

Sehubungan dengan tugas, tanggung jawab dan fungsi-fungsi masing-masing anggota keluarga, maka dalam menyelenggarakan kehidupan keluarga harus diciptakan keharmonisan dan keserasian antara anggota keluarga. Bapak, ibu dan anak harus dapat menjalankan tugas, tanggung jawab dan fungsinya masing -masing dengan disiplin agar terbinanya ketertiban dan keamanan dalam keluarga tetap dapat dipertahankan. Upaya ini diharapkan mendukung tercapainya tujuan keluarga yaitu keluarga sejahtera lahir dan bathin di dunia dan di akhirat.

B. Sekolah Sebagai Institusi Sosial

Proses pendidikan secara formal dilakukan melalui system persekolahan, pada umumnya dipandang sebagai proses terbuka. Proses pendidikan secara formal ini bersifat terbuka sehingga dapat diketahui dan terlihat oleh siapapun, dan diorganisasi secara baik, mulai dari pengaturan peserta didik sampai pada pengaturan kapan seseorang harus belajar dan apa yang harus dipelajari pada waktu tertentu sampai pada pengaturan system penilaian sebagai bukti terjadinya perubahan pada diri individu sebagai akibat proses pendidikan. Akan tetapi baik edukasi maupun sosialisasi juga dapat terjadi secara informal dan bersifat tertutup, dan bahkan sebagian tidak disadari oleh individu yang bersangkutan. Dalam beberapa masyarakat, misalnya pada kelompok-kelompok masyarakat tribal, terutama di negara-negara sedang berkembang dari Dunia Ketiga, proses edukasi dan sosialisasi dari generasi muda berlangsung tidak selalu melalui prosedur dan jalur belajar formal yang ekstensif. Namun demikian proses "*schooling*" atau persekolahan sebenarnya selalu terjadi dimana-mana, dan masyarakat sukar menghindari diri dari proses belajar mengajar formal tersebut, baik di dalam masyarakat di desa-desa, masyarakat yang hidup di padang pasir, masyarakat di lereng-lereng gunung, semuanya sekarang pasti telah dijamah oleh proses "*schooling*" tersebut. Sifat universal dari sekolah-sekolah dan proses *schooling* tersebut dapat digolongkan menjadi enam golongan besar :

1. Sekolah-sekolah yang memberikan dasar-dasar pengetahuan untuk menyadari dirinya sebagai warga masyarakat dan warga negara. Sekolah-sekolah ini meliputi pendidikan tingkat kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah lanjutan.

2. Sekolah-sekolah yang memberikan pengetahuan tingkat lanjut di perguruan tinggi, yang memberikan pendidikan dan latihan spesialis.
3. Sekolah-sekolah yang berorientasi pada pendidikan keagamaan.
4. Sekolah-sekolah yang menyiapkan generasi muda menjadi militer.
5. Sekolah-sekolah kejuruan yang berorientasi pada kerja, dan
6. Sekolah-sekolah dalam bentuknya yang lain misalnya sekolah yang dipersiapkan untuk menyebarkan pengetahuan tertentu, misalnya sekolah untuk kepentingan indoktrinasi, sekolah untuk menyiapkan guru-guru agama, dan sekolah-sekolah untuk mempersiapkan tenaga-tenaga profesional lainnya (Chesler and Cave, 1981:2)

Proses dari persekolahan bukan merupakan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Sekolah-sekolah seperti itu sejak lama telah dipersiapkan oleh masyarakat, dan dimaksudkan untuk melestarikan warisan budaya masyarakat, serta berfungsi untuk melangsungkan proses memajukan masyarakat. Lebih jelasnya tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui proses pendidikan dimanapun proses pendidikan itu berlangsung (melalui persekolahan atau diluar persekolahan) adalah untuk menghasilkan orang-orang agar mereka mengenal dan menyadari dirinya serta bertanggungjawab untuk menyempurnakan/mengembangkan masyarakatnya atau dengan kata lain mendewasakan manusia yang ditandai oleh indikator: bertanggung jawab, mandiri, tidak tergantung atau selalu menggantungkan diri kepada orang lain, berani mengambil keputusan terbaik untuk dirinya dan masyarakatnya serta menanggung resiko dari keputusan yang diambilnya.

Munculnya sekolah-sekolah formal sebagai konsekuensi dari perkembangan masyarakat, dan kompleksnya tatanan sosial yang ada, serta untuk merespon kebutuhan bagi upaya melestarikan warisan budaya, kontrol sosial dan untuk memajukan masyarakat yang bersangkutan. Kemunculan sekolah ini pada awalnya didasarkan pada kenyataan bahwa pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan keluarga oleh orang dewasa di sekitar keluarga, tidak mampu lagi berperan mempersiapkan anggota keluarganya secara intensif dalam memberikan pengalaman belajar untuk menghadapi berbagai kemajuan dan kompleksitas kehidupan dan tatanan sosial budaya yang berkembang secara cepat.

Bagi orang-orang/masyarakat yang menempatkan permikiran pada orientasi edukasi, untuk memajukan masyarakat, tidak menginginkan perubahan-perubahan masyarakat secara radikal, apalagi dengan jalan berontak atau kekerasan untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap institusi dan struktur sosial yang ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kelembagaan pendidikan itu pada

hakekatnya merupakan lembaga konservatif, yang berfungsi untuk mempertahankan dan mewariskan budaya sambil berusaha mengembangkan budaya bagi kesejahteraan masyarakatnya. Titik tolak atau sentral segala upaya dalam pengembangan budaya yang dilakukan melalui proses persekolahan atau proses pendidikan di sekolah pada dasarnya adalah memajukan kehidupan masyarakat, meningkatkan kualitas kehidupan warga masyarakat atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pengertian yang utuh, yaitu sejahtera dalam arti lahir dan sejahtera dalam arti bathin. Dengan demikian orientasinya bukan semata pada aspek materialistis tetapi juga aspek psikologis dan spritualistis. Oleh sebab itulah maka sekolah dimanapun, dalam kondisi apapun sebagai sekolah tidak dapat dipisahkan dengan masyarakatnya. Mestinya dia tumbuh dan berkembang dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Pada sisi lain sekolah dihadapkan pada kenyataan perkembangan budaya masyarakat yang sangat cepat, perubahan-perubahan yang terjadi terhadap berbagai aspek-aspek budaya dan masyarakat yang begitu cepat menjadikan sekolah mempunyai misi sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan (*agent of change*), sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Sekolah berfungsi sebagai alat untuk mengintrodusir nilai-nilai baru yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat tanpa meninggalkan nilai lama yang perlu dipertahankan agar dapat diadopsi oleh masyarakat, demi mengadaptasi perkembangan teknologi dan pengetahuan, yang pada akhirnya sebenarnya bertujuan agar kehidupan masyarakat lebih berkualitas.

Jadi tidak mungkin kita berfikir dan memfungsikan sekolah hanya sebagai alat untuk melestarikan kebiasaan-kebiasaan dan tata nilai yang berlaku di dalam masyarakat serta sebagai alat untuk mentransmisikan warisan-warisan budaya masyarakat semata-mata, karena masyarakat akan tertinggal dari budaya yang terus menerus berkembang, lebih-lebih pada masa sekarang perkembangan budaya masyarakat jauh lebih cepat dari apa yang dapat dilakukan oleh sekolah. Bersamaan dengan proses pelestarian tersebut, sekolah harus dipandang sebagai agen pembaharuan serta kekuatan yang mampu menciptakan kondisi-kondisi untuk melakukan perubahan-perubahan kearah peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian dalam pembicaraan mengenai sekolah ini kita dihadapkan dua kepentingan atau tujuan pokok, yaitu: melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan untuk mempersiapkan anak didik agar dapat mengantisipasi masa depan tanpa harus meninggalkan budaya dan nilai yang sudah menjadi karakteristik masyarakat. Jadi sekolah disatu

pihak dapat dipandang sebagai lembaga konservasi nilai-nilai masa lampau dan kedua sebagai agent untuk melakukan perubahan.

Kepentingan tersebut di atas tidak perlu dianggap sebagai asumsi yang harus dipertentangkan, akan tetapi harus ditempatkan di dalam suatu kontinum, yang akan memberi kesempatan kepada pengambil kebijakan, untuk mengambil pilihan-pilihan yang diinginkan, atas pertimbangan-pertimbangan situasi, tempat dan kepentingan tertentu.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, nampak bahwa pembicaraan tentang persekolahan tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang masyarakatnya, sebab sekolah diciptakan sebagai lembaga yang berperan dalam mengembangkan masyarakat kearah kemajuan, berkualitas dan sejahtera. Oleh sebab itu sangat tepat kalau tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan itu berpusat pada tiga lembaga yaitu : keluarga, sekolah dan masyarakat. Ketiga lembaga tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dalam proses pembentukan masyarakat yang berkualitas.

Tugas utama sekolah yaitu berupaya untuk menciptakan proses pembelajaran secara efektif dan efisien untuk mengantarkan peserta didik mencapai prestasi yang memuaskan. Tanpa menyentuh aspek ini, maka organisasi sekolah tidak akan mempunyai arti penting dalam melaksanakan pendidikan. Beberapa penelitian tentang sekolah yang efektif selalu terkait dengan proses organisasi menemukan pentingnya peran manajemen sekolah dalam menciptakan iklim, kultur, dan etos kerja sekolah yang efektif. Komponen iklim, kultur dan ethos kerja sekolah mampu menciptakan keefektifan proses pendidikan (Campbell, Roald, F., Cobally, J, dan Nystrand, Raael, O. 1983:98).

Sekolah sebagai sistem sosial adalah suatu upaya untuk memahami tujuan, peran, hubungan dan perilaku berbagai komponen pendidikan di sekolah dalam setting sosial. Setidak-tidaknya ada dua elemen dasar yaitu: 1) institusi, peran dan harapan dalam menentukan norma bersama atau dimensi sosial, 2) individual, personalitas dan pemenuhan kebutuhan yang merupakan dimensi psikologis. Di sini sekolah sebagai sistem sosial diharapkan mampu mencapai moral kerja anggota organisasi yang efektif, efisien dan memuaskan melalui integrasi kebutuhan individu dan kebutuhan organisasi.

Sekolah sebagai birokrasi di mana terjadi ada formalisasi, standarisasi, rasionalisasi, efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan aktivitas organisasi. Tingkat birokrasi sekolah mungkin berbeda dengan birokrasi pemerintah, militer dan industri lainnya, yang menuntut persyaratan cukup ketat dalam proses pengelolaan. Berbeda dengan

sekolah sebagai lembaga pendidikan mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan yang tidak tampak (*intangible*) berupa meningkatnya keefektifan pembelajaran serta berpengaruh pada terjadinya peningkatan prestasi siswa. Sekolah sebagai tempat pelayanan pendidikan menghadapi keragaman tingkat perkembangan bakat, minat dan intelektual siswa. Kondisi organisasi sekolah ini membutuhkan sistem birokrasi sekolah terstandar, yang terorganisir secara sistematis dan sistemik.

Pelaksanaan pendidikan di sekolah merupakan aktivitas yang membutuhkan proses yang terorganisir secara sistematis, sistemik, terencana dan terprogram dengan tingkat elastisitas tinggi. Sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak lepas dari berbagai komponen seperti guru, siswa, kurikulum dan sarana-prasarana untuk terjadinya sebuah interaksi edukatif. Semua komponen tersebut merupakan sub sistem yang saling terkait, menguatkan dan saling mempengaruhi dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan. Salah satu komponen yang tidak terorganisir secara efektif dan efisien berakibat pada komponen lainnya.

Berbeda dengan organisasi industri dan jasa lainnya, bahwa sekolah mempunyai karakteristik khusus baik menyangkut misi, tujuan dan orientasinya. Sekolah sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang pengajaran dan pembelajaran terfokus pada peningkatan kualitas intelektual. Proses pendidikan menjadi perhatian utama dalam sistem organisasi sekolah. Sehingga semua aktivitas sekolah diarahkan untuk meningkatkan prestasi siswa, baik berkaitan dengan harapan jangka pendek (*out put*) atau jangka panjang (*out come*) terhadap lulusannya. Sistem organisasi sekolah tidak menerapkan prinsip ekonomis dengan pencapaian keuntungan ekonomi yang tinggi. Tapi yang menjadi nilai kuntungan sekolah yaitu bersifat non-profit, berupa keefektifan dan efisiensi sekolah dan meningkatnya prestasi siswa dari tahun ke tahun.

Organisasi sekolah sebagai lembaga non-profit dalam bidang pendidikan, belakangan ini, menjadi perhatian semua pihak yang berkepentingan dengan hasil pendidikan. Lebih-lebih, sekolah merupakan sistem sosial yang tidak lepas dari lingkungan yang dimilikinya. Keberhasilan sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran tidak lepas dari peran semua komponen pendidikan. Dalam tinjauan administratif bahwa sekolah sebagai sistem sosial berlangsung struktur birokrasi yang dengan karakteristik khusus yaitu; 1) berorientasi tujuan; sekolah mempunyai tujuan, 2) Struktur hirarkis; kekuasaan yang ada secara formal antara atasan dan bawahan yang jelas, 3) Struktur organisasi; fungsi dan proses yang dipahami dalam hubungan peran dan prosedur untuk mengatur dan mengevaluasi aktifitas organisasi.

Sekolah sebagai organisasi tentu tidak lepas dari berbagai aktifitas yang berkaitan dengan upaya menciptakan efisiensi dan keefektifan pencapaian tujuan pendidikan. Atas dasar inilah sekolah membutuhkan pendekatan organisasi yang memungkinkan bagi terciptanya iklim dan budaya sekolah yang mendukung tercapainya proses pembelajaran yang baik. Sementara sekolah dipahami seperti organisasi industri akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi proses pendidikan itu sendiri. Hal ini didasarkan pada tingginya unsur manusiawi dalam sekolah; bangunan kelembagaan harus ditujukan pada terjadinya peningkatan kualitas peserta didik. Sehingga faktor manajerial dan pembelajaran harus mengarah pada meningkatnya proses dan mutu lulusan sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah, pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya hendaknya mengarah pada terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Sehingga sasaran utama dari sekolah untuk meningkatkan pengembangan intelektual dan emosional siswa dapat tercapai dengan baik.

Akhir-akhir ini bahwa sekolah berkembang menjadi sistem organisasi yang lebih maju seiring terjadinya perubahan paradigma organisasi modern. Apabila organisasi dengan pendekatan manajemen ilmiah dan birokrasi menekankan pada distribusi kekuasaan dan wewenang (*power and authority*) kepada semua unit organisasi yang sangat birokratis, maka pendekatan terbaru dewasa ini lebih terfokus pada membangun budaya sekolah (*school culture*) dan sistem birokrasi yang fleksibel namun tetap mengarah pada upaya tercapainya tujuan pendidikan. Sekolah tidak lagi sebagai sebuah organisasi dengan komponen-komponen internal semata, tapi juga sangat dipengaruhi dengan aspek lingkungan sekitarnya. Sehingga pendekatan baru dalam meningkatkan kualitas manajemen sekolah menjadi kebutuhan utama yang diakibatkan oleh perkembangan paradigma tentang pendidikan dan sekolah itu sendiri (Preedy, Margaret, 1993:19).

Pentingnya organisasi sekolah yang efektif berangkat dari adanya perubahan paradigma sekolah sebagai lembaga pendidikan yang membutuhkan pengorganisasian secara profesional. Sekolah sebagai lembaga pendidikan hendaknya memperhatikan tugas utama yaitu untuk memberikan layanan pendidikan kepada siswa. Untuk menciptakan sekolah agar menjadi organisasi yang efektif dan efisien maka dibutuhkan upaya-upaya manajemen yang sesuai dengan konteks budaya sekolah, dengan mempertimbangkan aspek pengelolaan, untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Sehingga, dalam konteks ini, kualitas guru, kepemimpinan kepala sekolah, siswa, orang tua dan masyarakat perlu mempunyai peran dan tanggung jawab untuk meningkatkan keefektifan manajemen sekolah.

Perbaikan mutu di sekolah mempunyai tantangan agar bagaimana semua anggota mendidikasikan diri pada perbaikan mutu unjuk kerja (*performance quality improvement*) dan perbaikan terus menerus (*conitnous improvement*). Perbaikan mutu unjuk kerja di sekolah akan memberikan pengaruh pada peningkatan kemampuan profesional masing-masing anggota dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Perbaikan tersus menrus yang dilakukan disekolah akan menjadikan sekolah selalu respon terhadap berbagai inovasi kependidikan dan ilmu pengetahuan. Sekolah harus memperbaiki atau meperbaharui pola manajemen pendidikan untuk mencapai tujuan secara maksimal. Di sini kepala sekolah, guru, siswa, staf, orang tua dan masyarakat (*komite sekolah dan dewan pendidikan*) perlu dilibatkan dalam rangka melakukan peningkatan mutu sekolah, khususnya sistem manajemen sekolah dan proses pembelajaran.

C. Masyarakat Media Transformasi Sosial

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata “masyarakat” sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, *musyarak*. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas- entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.

Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utamanya dalam bermata pencaharian. Pakar ilmu sosial mengidentifikasi ada: masyarakat pemburu, masyarakat pastoral nomadis, masyarakat bercocoktanam, dan masyarakat agrikultural intensif, yang juga disebut masyarakat peradaban. Sebagian pakar menganggap masyarakat industri dan pasca-industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari masyarakat agrikultural tradisional.

Masyarakat dapat pula diorganisasikan berdasarkan struktur politiknya: berdasarkan urutan kompleksitas dan besar, terdapat masyarakat *band*, suku, *chiefdom*, dan masyarakat negara.

Adanya sarana untuk berintegrasi menyebabkan warga dari suatu kolektif akan saling berintegrasi. Namun tidak semua kesatuan manusia yang bergaul atau berintegrasi itu disebut masyarakat karena masyarakat harus mempunyai suatu ikatan lain yang khusus. Ikatan yang membuat suatu kesatuan manusia mejadi suatu masyarakat adalah pola tingkah laku yang khas mengenai faktor kehidupannya dalam batas kesatuan itu yang menjadi sebuah adat istiadat dan bersifat kontiniu. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berintegrasi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontiniu dan yang terikat oleh satu rasa identitas yang sama.

Dari ketiga macam pengaruh lingkungan pendidikan (keluarga, sekolah, dan masyarakat), kiranya lingkungan masyarakatlah yang cukup sulit dirancang agar selalu memberikan pengaruhnya yang baik untuk perkembangan anak didik. Karena lingkungan masyarakat itu sangat luas dan banyak berbagai pihak yang berperan dalam masyarakat tersebut, sehingga memerlukan pengawasan dan pengontrolan yang lebih agar suasana lingkungan masyarakat dapat memberikan pengaruh yang baik bagi pendidikan anak.

Masyarakat yang berperan aktif dalam bidang pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Kelompok ini berupa organisasi-organisasi pendidikan, sosial, politik, ekonomi, keagamaan dan sebagainya. Semua kelompok ini perlu dilibatkan secara aktif dalam membantu dan mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pengelola atau pihak sekolah hendaknya mampu menganalisis kelompok masyarakat mana yang bisa dilibatkan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pendidikan di sekolah dan tersedianya sarana dan prasarana saja, tetapi juga ditentukan oleh lingkungan keluarga dan atau masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah (sekolah), keluarga dan masyarakat. Ini berarti mengisyaratkan bahwa orang tua murid dan masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk berpartisipasi, turut memikirkan dan memberikan bantuan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Partisipasi yang tinggi dari orang tua murid dalam pendidikan di sekolah merupakan salah satu ciri dari pengelolaan sekolah yang baik, artinya sejauhmana masyarakat dapat diberdayakan dalam proses pendidikan di sekolah adalah indikator terhadap manajemen sekolah yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan ini merupakan sesuatu yang esensial bagi penyelenggaraan sekolah yang baik (Kumars, 1989). Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan

di sekolah ini nampaknya memberikan pengaruh yang besar bagi kemajuan sekolah, kualitas pelayanan pembelajaran di sekolah yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kemajuan dan prestasi belajar anak-anak di sekolah. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Husen (1988) dalam penelitiannya bahwa siswa dapat belajar banyak karena dirangsang oleh pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dan akan berhasil dengan baik berkat usaha orang tua mereka dalam memberikan dukungan.

Penelitian lain yang memperkuat apa yang dikemukakan di atas dinyatakan oleh Levine & Hagigust, (1988) yang menyatakan bahwa Lingkungan keluarga, cara perlakuan orang tua murid terhadap anaknya sebagai salah satu cara/bentuk partisipasi mereka dalam pendidikan dapat meningkatkan intelektual anak. Partisipasi orang tua ini sangat tergantung pada ciri dan kreativitas sekolah dalam menggunakan pendekatan kepada mereka. Artinya masyarakat akan berpartisipasi secara optimal terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah sangat tergantung pada apa dan bagaimana sekolah melakukan pendekatan dalam rangka memberdayakan mereka sebagai mitra penyelenggaraan sekolah yang berkualitas. Hal ini ditegaskan oleh Brownell bahwa pengetahuan masyarakat tentang program merupakan awal dari munculnya perhatian dan dukungan. Oleh sebab itu orang tua/ masyarakat yang tidak mendapatkan penjelasan dan informasi dari sekolah tentang apa dan bagaimana mereka dapat membantu sekolah (lebih- lebih di daerah pedesaan) akan cenderung tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, bagaimana mereka harus melakukan untuk membantu sekolah. Hal tersebut sebagai akibat ketidaktahuan mereka.

Di negara-negara maju, sekolah memang dikreasikan oleh masyarakat, sehingga mutu sekolah menjadi pusat perhatian mereka dan selalu mereka upayakan untuk dipertahankan. Hal ini dapat terjadi karena mereka sudah meyakini bahwa sekolah merupakan cara terbaik dan meyakinkan untuk membina perkembangan dan pertumbuhan anak-anak mereka. Mengingat keyakinan yang tinggi akan kemampuan sekolah dalam pembentukan anak-anak mereka dalam membangun masa depan yang baik tersebut membuat mereka berpartisipasi secara aktif dan optimal mulai dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah. Nampak mereka selain merasa sebagai pemilik sekolah juga sebagai penanggung jawab atas keberhasilan sekolah. Kondisi ini dapat terjadi karena kesadaran yang tinggi dari masyarakat yang bersangkutan.

Pentingnya keterlibatan orang tua/masyarakat akan keberhasilan pendidikan ini telah dibuktikan kebenarannya oleh Richard Wolf dalam

penelitiannya yang menyimpulkan bahwa terdapat korelasi yang sangat signifikan (0.80) antara lingkungan keluarga dengan prestasi belajar. Penelitian lain di Indonesia juga telah membuktikan hal yang sama.

Partisipasi yang tinggi tersebut nampaknya belum terjadi di negara berkembang (termasuk Indonesia). Hoyneman dan Loxley menyatakan bahwa di negara berkembang sebagian besar keluarga belum dapat diharapkan untuk lebih banyak membantu dan mengarahkan belajar murid, sehingga murid di negara berkembang sedikit waktu yang digunakan dalam belajar. Hal ini disebabkan banyak masyarakat/orang tua murid belum paham makna mendasar dari peran mereka terhadap pendidikan anak. Bahkan Made Pidarta menyatakan di daerah pedesaan yang tingkat status sosial ekonomi yang rendah, mereka hampir tidak menghiraukan sekolah dan mereka menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan anaknya kepada sekolah.

Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada dan terjadi di sekeliling proses pendidikan itu berlangsung yang terdiri dari masyarakat beserta lingkungan yang ada disekitarnya. Semua keadaan lingkungan tersebut berperan dan memberikan kontribusi terhadap proses peningkatan kualitas pendidikan dan atau kualitas lulusan pendidikan. Perhatian manajer pendidikan/Top Manajemen (Kepala Sekolah) seharusnya adalah berupaya untuk mengintegrasikan sumber-sumber pendidikan dan memanfaatkannya secara optimal mungkin, sehingga semua sumber tersebut memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Salah satu sumber yang perlu dikelola adalah lingkungan masyarakat atau orang tua murid, termasuk stakeholders. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah: Mengapa Manajemen Pendidikan perlu Menangani Masyarakat (perlu Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat), secara optimal baik orang tua murid, stakeholders, tokoh masyarakat maupun institusi yang ada di lingkungan sekolah.

Organisasi sekolah adalah organisasi yang menganut sistem terbuka, sebagai sistem terbuka berarti sekolah mau tidak mau, disadari atau tidak disadari akan selalu terjadi kontak hubungan dengan lingkungannya yang disebut sebagai supra sistem. Kontak hubungan ini dibutuhkan untuk menjaga agar sistem atau lembaga itu tidak mudah punah. Suatu organisasi yang mengisolasi diri, termasuk sekolah sebagai organisasi apabila tidak melakukan kontak dengan lingkungannya maka dia lambat laun akan mati secara alamiah (tidak dapat eksis), karena organisasi hanya akan tumbuh dan berkembang apabila didukung dan dibutuhkan oleh lingkungannya. Hanya sistem terbuka yang memiliki megantropy, yaitu suatu usaha yang terus menerus untuk menghalangi kemungkinan

terjadinya entropy atau kepunahan. Ini berarti hidup matinya sekolah akan sangat tergantung dan ditentukan oleh usaha sekolah itu sendiri, dalam arti sejauhmana dia mampu menjaga dan memelihara komunikasinya dengan masyarakat luas atau dia mau menjadi organisasi terbuka.

Dalam kenyataan sering kita temui sekolah yang tidak punya nama baik di masyarakat akhirnya akan mati. Hal ini disebabkan karena sekolah itu tidak mampu membuat hubungan yang baik dan harmonis dengan masyarakat pendukungnya. Dengan berbagai alasan masyarakat tidak mau menyekolahkan anaknya di suatu sekolah, yang akhirnya membuat sekolah itu mati dengan sendirinya. Demikian pula sebaliknya sekolah yang bermutu akan dicari bahkan masyarakat akan membayar dengan biaya mahal asalkan anaknya diterima di sekolah tersebut. Adanya sekolah favorit dan tidak favorit ini nampaknya sangat terkait dengan kemampuan kepala sekolah mengadakan pendekatan dan hubungan dengan para pendukungnya di masyarakat, seperti tokoh masyarakat, tokoh pengusaha, tokoh agama dan tokoh politik atau tokoh pemerintahan (*stakeholders*).

Karena itu sejak lama Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan itu berlangsung pada tiga lingkungan yaitu lingkungan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat. Konsep ini diperkuat oleh kebijakan pemerintah bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat. Artinya pendidikan tidak akan berhasil kalau ketiga komponen itu tidak saling bekerjasama secara harmonis. Kaufman menyebutkan patner/mitra pendidikan tidak hanya terdiri dari guru dan siswa saja, tetapi juga para orang tua/masyarakat.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa sekolah bukanlah lembaga yang berdiri sendiri dalam membina pertumbuhan dan perkembangan putra-putra bangsa, melainkan ia merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang luas, dan bersama masyarakat membangun dan meningkatkan segala upaya untuk memajukan sekolah. Hal ini akan dapat dilakukan apabila masyarakat menyadari akan pentingnya peranan mereka dalam sekolah. Hal ini dapat tercipta apabila sekolah mau membuka diri dan menjelaskan kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana masyarakat dapat berperan dalam upaya membantu sekolah/sekolah memajukan dan meningkatkan kualiuas penyelenggaraan pendidikan.

Ada hubungan saling menguntungkan antara sekolah dengan masyarakat, yaitu dalam bentuk hubungan saling memberi, saling melengkapi dan saling menerima sebagai patner yang memiliki kedudukan setara. Sekolah pada hakekatnya melaksanakan dan

mempunyai fungsi ganda terhadap masyarakat, yaitu memberi layanan dan sebagai agen pembaharuan bagi masyarakat sekitarnya, yang oleh Stoop disebutnya sebagai fungsi layanan dan fungsi pemimpin (fungsi untuk memajukan masyarakat melalui pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas). Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pembaharu terhadap masyarakat maka sekolah mau tidak mau atau suka tidak suka harus mengikutsertakan masyarakat dalam melaksanakan fungsi dan peranannya agar pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikul oleh sekolah akan menjadi ringan. Setiap aktivitas pendidikan, apalagi yang bersifat inovatif, seharusnya dikomunikasikan dengan masyarakat khususnya orang tua siswa, agar mereka sebagai salah satu penanggung jawab pendidikan menegrti mengapa aktoivitas tersebut harus dilakukan oleh sekolah dan pada sisi mana mereka dapat berperan membantu sekolah dalam merealisasikan program inovatif tersebut.

Dengan hubungan yang harmonis tersebut ada beberapa manfaat pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu:

Bagi Sekolah.

1. Memperbesar dorongan mawas diri, sebab seperti diketahui pada saat dengan berkembangnya konsep pendidikan oleh masyarakat, untuk masyarakat dan dari masyarakat serta mulai berkembangnya impelementasi manajemen berbasis sekolah, maka pengawasan sekolah khususnya kualitas sekolah akan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat antara lain melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.
2. Memudahkan/meringankan beban sekolah dalam memperbaiki serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah. Hal ini akan tercapai apabila sekolah benar-benar mampu menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam pengembangan dan peningkatan sekolah. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada sekolah yang berkembang dan berkualitas baik apabila tidak mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat lingkungannya. Masyarakat akan mendukung sepenuhnya serta membantunya apabila sekolah mampu menunjukkan kinerja yang berkualitas.
3. Memungkinkan upaya peningkatan profesi mengajar guru. Melalui hubungan yang erat dengan masyarakat, maka profesi guru akan semakin mudah untuk tumbuh dan berkembang. Sebab pada dasarnya laboraturium terbaik bagi sekolah seperti sekolah adalah masyarakatnya sendiri. Demikian pula laboraturium profesi guru yang professional akan dibuktikan oleh masyarakatnya.
4. Opini masyarakat tentang sekolah akan lebih positif/benar. Opini yang positif akan sangat membantu sekolah dalam mewujudkan

segala program dan rencana pengembangan sekolah secara optimal, sebab opini yang baik merupakan modal utama bagi sekolah untuk mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Bantuan masyarakat hanya akan lahir apabila mereka memiliki opini dan persepsi yang positif tentang sekolah. Karena itu keterbukaan, kebersamaan dan komitmen bersama perlu ditumbuhkembangkan di lingkungan sekolah.

5. Masyarakat akan ikut serta memberikan kontrol/koreksi terhadap sekolah, sehingga sekolah akan lebih hati-hati.
6. Dukungan moral masyarakat akan tumbuh terhadap sekolah sehingga memudahkan mendapatkan bantuan material dari masyarakat dan akan memberikan kemudahan dalam penggunaan berbagai sumber belajar termasuk nara sumber yang ada dalam masyarakat.

Bagi Masyarakat, dengan adanya hubungan yang harmonis antar sekolah dengan masyarakat maka:

1. Masyarakat/orang tua murid akan mengerti tentang berbagai hal yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan di sekolah
2. Keinginan dan harapan masyarakat terhadap sekolah akan lebih mudah disampaikan dan direalisasikan oleh pihak sekolah.
3. Masyarakat akan memiliki kesempatan memberikan saran, usul maupun kritik untuk membantu sekolah menciptakan sekolah yang berkualitas.

Hubungan pengaruh timbal balik antara tingkat partisipasi masyarakat dengan kualitas proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah, menuntut adanya jalinan hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat. Jalinan hubungan yang dimaksud, realisasinya bisa diwujudkan di dalam berbagai bentuk dan jalinan. Beberapa bentuk atau cara yang telah dikenal, adalah: *open door politics*, atau pemberian kesempatan kepada orang tua murid berkunjung ke sekolah untuk membicarakan masalah khusus yang terjadi pada anaknya; *home visiting* atau kunjungan sekolah ke rumah murid; penggunaan *resources persons*, kunjungan sekolah ke objek-objek tertentu di masyarakat, pertemuan antara orang tua murid dan warga sekolah, serta pengadaan serta mengefektifkan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Sedangkan secara umum Indrafachrudi (1994:67) teknik penyelenggaraan hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu teknik: (1) *Pertemuan kelompok*, berupa seminar, lokakarya, sarasehan, dsb. Ragam unsur masyarakat yang dilibatkan di dalam kegiatan ini tergantung dari tema yang sedang dibahas. (2) *Tatap muka*, pihak sekolah dapat memanggil orang tua siswa

yang bermasalah atau siswa yang memiliki kemampuan lebih, yang perlu pembinaan bersama agar kemampuannya dapat berkembang secara maksimal. (3) *Observasi dan partisipasi* masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah, agar masyarakat tersebut mengetahui secara langsung hambatan dan faktor pendukung penyelenggaraan pendidikan, mengetahui keberhasilan sekolah, sehingga diharapkan bersedia membantu pelaksanaan pendidikan di sekolah. dan (4) *Surat menyurat* dengan berbagai pihak yang dapat dikaitkan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Seiring dengan perkembangan teknologi, sekolah dapat menerapkan teknik ini dengan menggunakan alat-alat komunikasi berupa telepon, fax, internet, e-mail, dsb.

Dengan adanya kerja sama tersebut, para guru akan dapat memperoleh keterangan-keterangan dari orang tua tentang kehidupan dan sifat anak-anaknya yang sangat besar gunanya bagi guru dalam memberikan pelajaran dan pendidikan terhadap murid-muridnya. Sebaliknya, orang tua juga memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari guru dalam hal mendidik anak-anaknya sehingga dapat mengetahui kesulitan-kesulitan manakah yang sering dihadapi anak-anaknya di sekolah. Orang tua dapat mengetahui apakah anaknya itu rajin, malas, bodoh, suka mengantuk, atau pandai, dan sebagainya. Dengan demikian, orang tua dapat menjauhkan pandangan dan pendapat yang keliru sehingga terhindarlah salah pengertian yang mungkin timbul antara keluarga dan sekolah.

Maisyaroh (2003:121) mengelompokkan masyarakat secara umum, yaitu: (1) Masyarakat orang tua, adalah gabungan dari orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah tertentu; (2) Masyarakat yang terorganisasi dalam organisasi tertentu; dan (3) Masyarakat luas yang terdiri dari individu-individu yang tidak terkait secara langsung terhadap penyelenggaraan program pendidikan.

Kenyataan di Indonesia, dari sekian kelompok tersebut yang paling aktif peranannya adalah masyarakat orang tua siswa. Sedangkan masyarakat terorganisasi dan masyarakat luas sudah berperan dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan namun masih belum optimal. Perhatian orang tua itupun hanya ditujukan pada lembaga pendidikan tempat anaknya bersekolah, sementara lembaga pendidikan yang lain di luar perhatiannya.

Kelompok terorganisasi di Indonesia yang bisa diajak kerjasama antara lain anggota kelompok dari pengelola perusahaan, DPR, dewan pendidikan, komite sekolah, majelis madrasah, kelompok layanan kesehatan, kelompok agama, pengelola televisi, radio, bank, kantor pos/ giro, LSM, dan sebagainya.

Sementara itu, Unruh (1974:77) mengelompokkan masyarakat menurut hubungannya dengan sekolah. Kelompok tersebut adalah: (1) *Immadiate* (pihak yang sangat cepat berhubungan dengan sekolah yaitu siswa, guru, dan orang tua siswa); (2) *Associated* (pihak yang tertarik pada sekolah); (3) *Disassociated* (pihak yang tidak tertarik dengan sekolah); dan (4) *Institusionalized* (lembaga umum).

Kehidupan manusia sejak lahir sampai akhir hayat tidak dapat terlepas dari berbagai pengaruh yang berasal dari dalam maupun luar dirinya. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat mengarah positif maupun negatif yang berasal dari tiga lingkungan pendidikan (*Tri Pusat Pendidikan*) yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sehingga lingkungan pendidikan berperan menjadi pusat berlangsungnya pendidikan untuk pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.

D. Prospek Pengembangan

Sekolah tidak akan bisa melaksanakan kegiatan pendidikannya dengan lancar tanpa adanya dukungan dan keterlibatan dari masyarakat. Sehingga pihak sekolah hendaknya mampu menganalisis kelompok masyarakat mana yang bisa dilibatkan dalam mendukung penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan di sekolah. Kreativitas pihak sekolah/pengelola pendidikan dalam hal ini sangat diperlukan untuk menjalin kerjasama sekolah dengan lingkungan keluarga/orang tua siswa dan lingkungan masyarakat di sekitar sekolah.

1. Kutub Keluarga (Rumah Tangga)

Dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan, dikemukakan bahwa anak/remaja yang dibesarkan dalam lingkungan sosial keluarga yang tidak baik/disharmoni keluarga, maka resiko anak untuk mengalami gangguan kepribadian menjadi berkepribadian antisosial dan berperilaku menyimpang lebih besar dibandingkan dengan anak/remaja yang dibesarkan dalam keluarga sehat/harmonis (sakinah).

Kriteria keluarga yang tidak sehat tersebut menurut para ahli, antara lain:

- a. Keluarga tidak utuh (*broken home by death, separation, divorce*)
- b. Kesibukan orangtua, ketidakterdapat dan ketidakbersamaan orang tua dan anak di rumah
- c. Hubungan interpersonal antar anggota keluarga (ayah-ibu-anak) yang tidak baik (buruk)
- d. Substitusi ungkapan kasih sayang orangtua kepada anak, dalam bentuk materi daripada kejiwaan (psikologis).

Selain daripada kondisi keluarga tersebut di atas, berikut adalah rincian kondisi keluarga yang merupakan sumber stres pada anak dan remaja, yaitu:

- a. Hubungan buruk atau dingin antara ayah dan ibu
- b. Terdapatnya gangguan fisik atau mental dalam keluarga
- c. Cara pendidikan anak yang berbeda oleh kedua orangtua atau oleh kakek/nenek
- d. Sikap orangtua yang dingin dan acuh tak acuh terhadap anak
- e. Sikap orangtua yang kasar dan keras kepada anak
- f. Campur tangan atau perhatian yang berlebih dari orangtua terhadap anak
- g. Orang tua yang jarang di rumah atau terdapatnya isteri lain
- h. Sikap atau kontrol yang tidak konsisiten, kontrol yang tidak cukup
- i. Kurang stimuli kongnitif atau sosial
- j. Lain-lain, menjadi anak angkat, dirawat di rumah sakit, kehilangan orang tua, dan lain sebagainya.

Sebagaimana telah disebutkan di muka, maka anak/remaja yang dibesarkan dalam keluarga sebagaimana diuraikan di atas, maka resiko untuk berkepribadian anti sosial dan berperilaku menyimpang lebih besar dibandingkan dengan anak/maja yang dibesarkan dalam keluarga yang sehat/harmonis (sakinah).

2. Kutub Sekolah

Kondisi sekolah yang tidak baik dapat mengganggu proses belajar mengajar anak didik, yang pada gilirannya dapat memberikan “peluang” pada anak didik untuk berperilaku menyimpang. Kondisi sekolah yang tidak baik tersebut, antara lain;

- a. Sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai
- b. Kuantitas dan kualitas tenaga guru yang tidak memadai
- c. Kualitas dan kuantitas tenaga non guru yang tidak memadai
- d. Kesejahteraan guru yang tidak memadai
- e. Kurikulum sekolah yang sering berganti-ganti, muatan agama/budi pekerti yang kurang
- f. Lokasi sekolah di daerah rawan, dan lain sebagainya.

3. Kutub Masyarakat (Kondisi Lingkungan Sosial)

Masyarakat dalam pandangan ahli ilmu “manusia” (*human science*) pada umumnya tidak sama antara ahli yang satu dengan yang lainnya,

hal ini disebabkan bahwa sudut pandang para ahli tidak selalu sama dalam melihat masyarakat yang lokasi dan waktunyapun berbeda. Ahli antropologi memandang masyarakat dari sudut budaya, ahli ekonomi juga memandang masyarakat sebagai satu kesatuan yang dibentuk oleh kepentingan ekonomis, demikian pula ahli politik juga memandang masyarakat sebagai satu kesatuan yang dipengaruhi oleh kepentingan dan kekuasaan dan ahli sosiologi memandang masyarakat sebagai suatu gejala sosial. Dari beberapa pandangan para ahli sebenarnya dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat adalah satu kesatuan yang tetap dari orang-orang yang hidup didaerah tertentu dan melakukan hubungan tertentu dalam kelompoknya, berdasarkan kebudayaan yang sama untuk mencapai kepentingan yang sama.

Simmel (Johnson.1998;257) sebagai ahli Sosiologi mengemukakan bahwa masyarakat merupakan sejumlah individu yang membentuk suatu kumpulan dimana terdapat pola interaksi timbal balik yang saling mempengaruhi

Berangkat dari pemahaman yang dikemukakan diatas maka masyarakat mempunyai beberapa ciri-ciri sebagai berikut;

- a. adanya sejumlah orang
- b. tinggal dalam suatu daerah tertentu
- c. mengadakan atau mempunyai hubungan yang tetap dan teratur antara satu dengan lainnya.
- d. Sebagai akibat hubungan/interaksi akan membentuk system hubungan antar manusia.
- e. Terikat karena memiliki kepentingan yang sama;
- f. Mempunyai tujuan bersama dan bekerja bersama;
- g. Mengadakan ikatan berdasarkan unsure-unsur sebelumnya;
- h. Mempunyai perasaan solidaritas
- i. Sadar akan interdependensi satu sama lainnya;
- j. Berdasarkan system yang terbentuk, dengan sendirinya membentuk norma-norma;
- k. Berdasarkan unsur diatas akhirnya akan membentuk kebudayaan.

Faktor kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau "rawan", dapat merupakan faktor yang kondusif bagi anak/remaja untuk berperilaku menyimpang. Faktor kutub masyarakat ini dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu pertama, faktor kerawanan masyarakat dan kedua, faktor daerah rawan (gangguan kamtibmas). Kriteria dari kedua faktor tersebut, antara lain:

- a. Faktor Kerawanan Masyarakat (Lingkungan)
 - 1) Tempat-tempat hiburan yang buka hingga larut malam bahkan sampai dini hari

- 2) Peredaran alkohol, narkotika, obat-obatan terlarang lainnya
 - 3) Pengangguran
 - 4) Anak-anak putus sekolah/ anak jalanan
 - 5) Wanita tuna susila (wts)
 - 6) Beredarnya bacaan, tontonan, TV, Majalah, dan lain-lain yang sifatnya pornografis dan kekerasan
 - 7) Perumahan kumuh dan padat
 - 8) Pencemaran lingkungan
 - 9) Tindak kekerasan dan kriminalitas
 - 10) Kesenjangan sosial
- b. Daerah Rawan (Gangguan Kantibmas)
- 1) Penyalahgunaan alkohol, narkotika dan zat aditif lainnya
 - 2) Perkelahian perorangan atau berkelompok/ massal
 - 3) Kebut-kebutan
 - 4) Pencurian, perampasan, penodongan, pengompasan, perampokan
 - 5) Perkosaan
 - 6) Pembunuhan
 - 7) Tindak kekerasan lainnya
 - 8) Pengrusakan
 - 9) Coret-coret dan lain sebagainya

BAB VI

SEKOLAH DAN INTERAKSI SOSIAL

A. Pengertian Interaksi Sosial

Manusia adalah makhluk sosial, ia tidak bisa hidup sendiri, manusia memerlukan manusia lain. Oleh karena itu manusia harus berhubungan atau berinteraksi dengan manusia atau lingkungan. Pentingnya melakukan interaksi dengan pihak lain dimaksudkan untuk tetap menjaga kelangsungan hidup manusia. Salah satu bidang kajian dalam ilmu Sosiologi adalah interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya proses sosial di masyarakat. Mempelajari interaksi sosial sangat berguna dalam memperhatikan berbagai masalah yang terjadi di masyarakat, apa lagi Pendidikan Luar Sekolah merupakan pendidikan yang jelas berhubungan langsung dengan berbagai kepentingan masyarakat. Interaksi sosial merupakan kunci utama dari semua kehidupan sosial, karena tanpa adanya interaksi tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Demikian halnya dengan pengetahuan tentang proses sosial. Pemahaman tentang proses sosial memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengertian mengenai segi dinamis dari masyarakat yang selalu bergerak. Elemen penting terjadinya proses sosial di masyarakat adalah terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan kunci utama dari semua segi kehidupan sosial. Karena tanpa interaksi tidak akan mungkin terjadi perubahan atau gerak sosial dalam masyarakat.

Interaksi dalam kehidupan masyarakat sebenarnya telah dimulai sejak manusia menikmati kehidupan dalam ala mini, bahkan interaksi telah dimulai sejak dalam kandungan. Namun hanya ibu yang mengandung dan anak yang ada dalam kandungan yang hanya merasakan bagaimana ia berhubungan, namun bentuk interaksi yang dilakukan antara anak yang ada dalam kandungan dan ibu yang mengandung belumlah dikatakan sebagai interaksi sosial, interaksi yang dilakukan masih bersifat sederhana dan terbatas pada bentuk isyarat-isyarat yang ditimbulkan oleh bayi yang ada dalam kandungan.

Interaksi sosial dalam konteks ini adalah hubungan antara dua individu atau lebih, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok yang dilakukan secara dinamis dan terus menerus serta menimbulkan arus timbal balik dalam kehidupan masyarakat. Beberapa ahli mendefinisikan interaksi sosial yang terjadi di masyarakat sebagai bentuk simbol dari suatu tujuan tertentu dari masing-masing individu atau kelompok kepada individu atau kelompok yang lain. Teori yang paling terkenal tentang interaksi sosial dicetuskan oleh Georg Simmel. Ia melihat bahwa masyarakat sebagai bentuk interaksi. Dalam pandangannya ia mengemukakan bahwa masyarakat menunjuk pada pola-pola interaksi timbal balik antar individu. Ia juga mengemukakan bahwa pola-pola interaksi yang berlaku di masyarakat menjadi sangat kompleks manakala masyarakat itu menjadi kumpulan yang sangat besar, dan akan kelihatan sangat riil secara objektif pada individu, akan tetapi tanpa pola interaksi timbal-balik yang berulang-ulang sifatnya, kenyataan di masyarakat itu akan hilang. Pada tingkatan tertentu, teori yang dikemukakan oleh Simmel merupakan pola interaksi yang kecil sifatnya, namun bisa diperluas pada perspektif institusi yang lebih luas dan besar.

Dalam teori Simmel (Johnson, 1988;256) ia mengisolasi bentuk-bentuk atau pola-pola di mana proses interaksi dapat dibedakan dari isi kepentingan, tujuan atau maksud tertentu yang sedang dikejar melalui interaksi. Ia juga menjelaskan bahwa "isi kepentingan" dalam interaksi meliputi insting erotik, kepentingan objektif, dorongan agama, tujuan membela dan menyerang, bermain, keuntungan, bantuan atau instruksi, dan berbagai cara yang dilakukan manusia yang dapat menyebabkan manusia lainnya untuk hidup bersama, untuk bertindak, serta untuk mempengaruhi orang lain dan dipengaruhi oleh orang.

Interaksi sosial sebagai proses pengaruh mempengaruhi pada akhirnya akan menghasilkan hubungan tetap dan memungkinkan dalam proses pembentukan struktur sosial. Dalam proses interaksi, komunikasi menjadi alat, karena itu komunikasi menjadi salah satu faktor penentu dalam interaksi sosial.

Interaksi sosial akan berlangsung selama pihak- pihak yang terlibat menginginkan atau merasa ada keuntungan yang bisa didapat dari proses interaksi dengan pihak lain. Beberapa hasil penelitian mengemukakan bahwa apabila keuntungan dirasakan tidak bisa diperoleh lagi, maka interaksi dengan sendirinya akan berhenti.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka interaksi sosial di masyarakat didasarkan pada berbagai faktor yaitu faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi dan faktor simpati (Soekanto, 2001;69).

1. *Faktor imitasi* menunjuk pada sifat dan sikap manusia yang mudah meniru dan berperilaku sama dengan orang yang ditiru. Imitasi mempunyai peranan penting dalam proses interaksi sosial, sebab imitasi dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidan atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, namun demikian imitasi akan berdampak negative jika yang ditiru adalah perilaku yang menyimpang dari norma-norma, bahkan dapat juga melemahkan daya kreatif seseorang. Seseorang hanya berperilaku meniru tanpa mampu mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya.
2. *Faktor sugesti* merupakan sikap yang ditunjukkan seseorang dalam memberikan pandangan-pandangannya, atau kemampuannya kepada orang lain, yang kemudian diterima tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya. Sugesti dapat berlangsung manakala seseorang yang menerima pandangan-pandangan dari orang lain tidak mampu berfikir rasional dan berada dalam tekanan-tekanan perasaan pada diri manusia. Proses berlangsungnya sugesti ini hamper mirip dengan proses imitasi, namun yang membedakan adalah titik tolak (Soekanto, 2001;69) dan tujuan yang ingin dicapai keduanya.
3. *Identifikasi* sebenarnya menunjuk pada sikap dan perilaku seseorang untuk mengidentikkan dirinya dengan orang lain. Proses ini biasanya berlangsung manakala seseorang memerlukan tipe-tipe ideal yang patut untuk di contoh dalam proses kehidupannya. Identifikasi ini sebenarnya mirip dengan sikap dan perilaku imitasi, namun tekanannya lebih mendalam. Seseorang yang mengidentikkan dirinya dengan orang lain, dengan sendirinya akan melembaga, sehingga adakalanya pandangan, sikap maupun kaidah-kaidah yang berlaku pada pihak lain akan menjadi patokan sikap yang melekat pada jiwa seseorang.
4. *Proses simpati* merupakan sikap dan perasaan yang mendalam pada seseorang. Soekanto (2001;71) melihat bahwa dalam proses simpati ini, perasaan memegang peranan penting, walaupun dorongan utama sikap simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain untuk bekerja sama atau mempunyai tujuan-tujuan untuk bersama dengan pihak yang di simpati. Soekanto (2001) juga mencatat bahwa perbedaan simpati dan identifikasi terletak pada dorongan untuk belajar pada

pihak lain yang dianggap kedudukannya lebih tinggi dan harus di hormati karena mempunyai kelebihan-kelebihan atau kemampuan-kemampuan tertentu yang patut dijadikan contoh. Proses simpati akan dapat berkembang di dalam suatu keadaan di mana faktor saling mengerti terjamin.

Masing masing faktor yang telah disebutkan diatas dapat berdiri sendiri dan dapat pula saling terkait. Masing faktor mempunyai tingkat kompleksitas yang berbeda. Namun Soekanto (2001) mencatat bahwa proses berlangsungnya faktor imitasi dan sugesti bisa terjadi lebih cepat, walau pengaruhnya kurang mendalam jika dibandingkan dengan faktor Identifikasi maupun faktor simpati.

Dari beberapa faktor terjadinya interaksi sosial tersebut, jelas bahwa sebenarnya interaksi sosial juga melibatkan sikap, nilai maupun harapan dari masing masing individu. Seperti yang dikemukakan oleh Sutherland (1961;99) "*interaction in some measure, form ... when people and their attitude are involved, the process become social or more precisely, sosial interaction is that dynamic interplay of force in which contacts between person and groups result in a modification of the attitudes and behaviors of the participations*".

B. Syarat-Syarat Interaksi Sosial

Sebagaimana halnya orang akan melakukan hubungan sosial dengan orang lain, maka dalam interaksi sosial mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi, di mana interaksi ini tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi beberapa syarat. Soekanto (2001;71) mengemukakan bahwa syarat minimal yang harus ada apabila interaksi sosial akan dilakukan meliputi;

1. Adanya kontak sosial (*social contact*)
2. Adanya komunikasi

Kontak sosial secara harfiah merupakan hubungan yang terjadi antara dua orang individu dengan individu lainnya, baik dengan menyentuh bagian tubuhnya ataupun dengan melambangkan berbagai isyarat. Sutherland dalam *Introductions Sociology* mengatakan bahwa "*social contact are a prerequisite of interaction*".

Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu;

1. Antara orang perorang
2. Antara orang perorang dengan kelompok manusia atau sebaliknya,
3. Antara satu kelompok manusia dengan kelompok lainnya.

Komunikasi adalah penyampaian lambang-lambang yang mengandung arti kepada pihak lain. Dalam interaksi sosial komunikasi mempunyai peranan penting, dan bahkan menentukan berlangsung tidaknya suatu interaksi sosial dalam tatanan proses sosial di masyarakat.

Komunikasi juga sebagai sebagai suatu bentuk interaksi dengan suatu *stimulus* yang memperoleh suatu arti tertentu dan di jawab oleh orang lain (*response*) baik secara lisan ataupun dengan isyarat yang bisa diterima oleh pihak lainnya.

Bogargus (dalam Susanto, 1999;15) mengatakan bahwa "*communication is interaction in terms of stimulus or gesture by one person which produces a response in the form of verbal or silent symbol by a second persons*". Sebagai penentu dalam interaksi sosial, komunikasi mempunyai beberapa unsur, yaitu;

1. Menggunakan lambang,
2. Memberikan arti interpretasi kepada lambing,
3. Merupakan nilai-nilai individu dan nilai kelompok,
4. Menunjukkan tujuan dari lambing yang disampaikan.

Salah satu Pendekatan dalam memahami interaksi sosial di kenal dengan nama Interaksi simbolik (*symbolic interaction*). pendekatan ini pertama kali bersumber dari pemikiran George Herbert Mead. Mead yang mewakili pemikiran pragmatis menjelaskan tentang pikiran atau kesadaran manusia (*mind or human consciousness*) yang sejalan dengan kerangka pemikiran evolusi. Dalam penjelasannya ia melihat bahwa pikiran manusia sebagai suatu yang muncul dalam proses evolusi alamiah. Pikiran dan kesadaran muncul dalam proses ilmiah, namun demikian individu tidak bertindak sebagai organisme yang terasing, sebaliknya tindakan-tindakan mereka saling berhubungan dan saling tergantung. Proses komunikasi dan interaksi di mana individu-individu saling mempengaruhi, saling menyesuaikan diri atau di mana tindakan-tindakan individu saling mencocokkan, tidak berbeda secara kualitatif dari proses berfikir internal. Mead juga menyatakan bahwa adaptasi individu terhadap dunia luar dihubungkan melalui proses komunikasi.

Proses komunikasi dalam pandangan ini dapat digambarkan dalam "percakapan isyarat", namun manusia tidak hanya terbatas pada satu bentuk isyarat saja. Hal ini dikarenakan manusia atau individu mampu menjadi objek bagi dirinya sendiri dan melihat tindakan-tindakannya seperti orang lain melihatnya. Dengan kata lain manusia atau individu dapat membayangkan dirinya secara sadar dalam prilakunya dari sudut pandangan orang lain. Sebagai akibatnya, manusia dapat mengkonstruksikan prilakunya dengan sengaja untuk membangkitkan respon tertentu dari orang lain.

Sebuah isyarat yang menghasilkan respon yang sama pada orang sedang melakukannya seperti terjadi pada orang ke mana isyarat itu diarahkan, merupakan sebuah isyarat yang berarti. Respon yang sama ini merupakan arti isyarat, dmuncul arti-arti bersamayang memungkinkan menjadi komunikasi simbol (*symbolic communication*). Simbol menurut

Leslie (Sunarto, 2001) sebagai “*a thing the value or meaning of which is bestowed upon by those who use it*”

Karakteristik dari bentuk komunikasi simbol pada manusia tidak terbatas pada bentuk fisik, seperti orang berpakaian, orang berjalan atau orang berbicara, namun juga menggunakan kata-kata, yaitu simbol-simbol suara yang mengandung arti-arti bersama dan bersifat standart. Simbol bunyi dapat dimengerti oleh orang yang menggunakannya dalam cara yang praktis samaseperti mereka di mengerti oleh orang lain.

Herbert Blumer menjabarkan pemikiran Mead mengenai interaksi simbolik menjadi tiga bagian penting, yaitu:

1. Bahwa manusia melakukan tindakan (*act*);
2. Atas dasar pikiran (*thing*);
3. Dan atas dasar makna (*meaning*) atas dasar itulah muncul tindakan manusia yang disebut dengan “konsep diri” (*self concept*). Konsep diri terdiri dari kesadaran individu mengenai keterlibatan yang khusus dalam seperangkat hubungan sosial yang sedang berlangsung atau dalam suatu komunitas yang terorganisasi.

Akhirnya, gambaran yang fundamental mengenai kenyataan sosial (interaksi sosial) yang tersirat dalam perspektif Mead adalah bahwa kenyataan sosial merupakan konstruksi simbol (*symbol*) dan mencerminkan usaha manusia untuk menyesuaikan bersama tindakan-tindakan sosialnya sendiri dengan tindakan-tindakan mereka yang bersifat terbuka dimana mereka terlibat. Hal penting dalam penjelasan Mead mengenai intelegensi manusia, perilaku dan organisasi sosial.

C. Bentuk-bentuk interaksi sosial

Lavine (Johnson, 1988) yang mengembangkan suatu daftar mengenai berbagai bentuk interaksi, menjadi tiga kategori utama:

1. Proses-proses sosial
2. Tipe-tipe sosial
3. Pola-pola perkembangannya

Proses-proses sosial mencatat bentuk-bentuk seperti perilaku kolektif elementer, pembentukan partai, pembagian kerja, isolasi, asosiasi, dari tiga atau lebih anggota, subordinasi dibawah satu pimpinan, oposisi terhadap penguasa, konflik, kompetisi, unifikasi, persaingan, rasa terimakasih, kagum dan percakapan. *Tipe-tipe sosial* memusatkan perhatiannya bukan pada proses interaksi secara keseluruhan, melainkan pada peran perilaku yang khas dari seseorang yang terlibat, seperti misalnya penengah, orang yang tidak memihak, wasit, atasan, bawahan, makelar, pedagang, wanita, orang miskin, orang asing dan aristocrat.

Sementara itu *pola-pola perkembangan* memusatkan perhatiannya pada proses-proses sosial yang lebih kompleks, seperti diferensiasi sosial,

perubahan dari basis organisasi sosial yang bersifat local ke yang fungsional, perubahan dari kriteria eksternal atau mekanik sebagai dasar untuk organisasi sosial ke kriteria yang lebih rasional, dan pemisahan bentuk dari isi, dan munculnya bentuk sebagai suatu yang bersifat otonom.

Dari perbedaan yang dikemukakan oleh Simmel, Johnson melihat adanya kesulitan dari Pendekatan yang dilakukan Simmel (*formalistis*) bahwa apa yang dikemukakan tidak ada dasar yang logis untuk mencapai kesimpulan teoritis, namun demikian tekanan yang dikemukakan Simmel dalam melihat interaksi dari bentuk dan isinya mempunyai arti penting dalam perspektif Sosiologi masa kini, terutama pada bentuk interaksi tingkat mikro. Bentuk yang dikemukakan Simmel bersifat dialektis di mana ia telah mampu menjembatani pemikiran kaum realistik dan nominalis.

Berbeda dengan Simmel, Knapp (1978) membagi interaksi kedalam tahap-tahap tertentu di mana ia melakukan hubungan. Ada dua kelompok besar dalam proses interaksi, pertama adalah tahap yang mendekatkan peserta interaksi dan yang kedua adalah tahap yang menjauhkan peserta interaksi.

Pada tahap yang pertama (tahap yang mendekatkan) dirinci menjadi tahap memulai (*initiating*), penjajakan (*experimenting*), meningkatkan (*intensifying*), menyatupadukan (*integrating*) dan mempertalikan (*bonding*).

Pada tahap pertama ini, penjajakan (*experimenting*) merupakan tahap yang dijadikan landasan untuk menuju pada tahap selanjutnya, pada tahap ini akan terjalin komunikasi pribadi dan komunikasi *non verbal*. Kebersamaan pada tahap ini memungkinkan untuk meningkat. Sementara tahap penyatupaduan (*integrating*) merupakan tahap yang menjembatani peningkatan hubungan menuju pada tahap pertalian (*bonding*), pada tahap ini pula masing-masing pihak akan merasakan manfaat dari hubungan atau interaksi yang dilakukan dan menjadi bagian dari suatu kesatuan.

Pertalian merupakan tahap terakhir dalam proses interaksi yang mempersatukan (Soenarto,2000;49) dan di tandai dengan kesepakatan atau komitmen yang mencerminkan suatu bentuk dukungan masyarakat terhadap hubungan yang dilakukan.

Sementara pada tahap perenggangan Knapp (Soekanto,2001;48) merinci menjadi beberapa bagian yaitu; tahap membeda-bedakan (*differentiating*), membatasi (*Circumscribing*), memacetkan (*Stagnating*), menghindari (*avoiding*), dan memutuskan (*terminating*).

Pada tahap ini diawali dengan tahap membeda-bedakan, dan pada tahap ini keakuan menjadi lebih menonjol dibandingkan kebersamaan, kemudian dilanjutkan dengan membatasi (*Circumscribing*) diri dengan pihak lain, pembicaraan mulai mengarah pada hal yang pribadi dan

individual. Kondisi ini akan mengakibatkan kemacetan (*Stagnating*) dalam komunikasi karena masing-masing pihak merasa benar dan masing-masing pihak akan berusaha untuk menghindari (*avoiding*), dan pada akhirnya akan terjadi bentuk pemutusan hubungan. Pemutusan hubungan ini menurut Knapp (Soenarto, 2000;49) ditandai dengan pernyataan mengenai jarak dan pemisahan diri. Dengan adanya jarak komunikasi diharapkan diharapkan agar terhalang dan dengan berlangsungnya pemisahan diri masing-masing pihak diharapkan dapat meneruskan kehidupannya tanpa kehadiran pihak lain.

Pendapat Soekanto (2001;76) mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial dapat dibagi menjadi;

1. Kerjasama (*accommodation*)
2. Persaingan (*competitor*)
3. Pertentangan (*conflict*)

Gillin and Gillin menggolongkan interaksi sosial ke dalam beberapa bentuk yang lebih luas lagi, yaitu:

1. Proses yang asosiatif (*presses of associative*); proses ini terbagi kedalam dua bentuk yaitu (a) akomodasi, (b) asimilasi dan akulturasi.
2. Proses disasosiatif (*processes of dissociation*); proses ini mencakup (a) persaingan, (b) kontravensi dan pertentangan atau pertikaian (*conflict*).

Kimball Young (Soekanto, 2001;78) juga membagi bentuk-bentuk interaksi sosial sebagai proses sosial kedalam beberapa kelompok, yaitu;

1. Oposisi (*opposition*) yang mencakup persaingan (*competition*) dan pertentangan (*conflict*).
2. Kerjasama (*co-operation*) yang kemudian menghasilkan akomodasi (*accommodation*).
3. Diferensiasi (*differentiation*) yang merupakan suatu proses di mana orang perorang di dalam masyarakat memperoleh hak-hak dan kewajiban yang berbeda dengan orang lain dalam masyarakat atas dasar perbedaan usia, sek dan pekerjaan.

Berbeda dengan Gillin dan Kimball, Shibutani membedakan interaksi kedalam beberapa pola, yaitu;

1. Akomodasi dalam situasi rutin
2. Ekspresi pertemuan dan anjuran
3. Interaksi strategis dalam pertentangan-pertentangan
4. Pengembangan perilaku massa (Soekanto, 2001;78)

Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dilakukan oleh individu dengan individu lainnya, atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok lainnya dalam kehidupan yang dinamis. Interaksi merupakan syarat utama terjadinya proses sosial di mana nantinya akan menentukan system serta bentuk-bentuk hubungan. Dalam proses ini tercipta pula struktur sosial, kebudayaan serta norma-norma di masyarakat.

BAB VII

STRUKTUR DAN STRATIFIKASI SOSIAL SEKOLAH

A. Konsep Stratifikasi Sosial

Ariestoteles mengatakan bahwa masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang tersusun secara khirarkhis, ada yang kaya, ada yang miskin dan ada yang ditengah tengah. Perbedaan itu didasarkan bahwa sebenarnya dalam kehidupan masyarakat terdapat penghargaan-penghargaan tertentu bagi masyarakat yang lainnya. Penghargaan tertentu bisa diberikan lebih tinggi terhadap suatu masyarakat yang mempunyai kedudukan tertentu. Seperti misalnya kedudukan dipandang dari sudut kekayaan, pendidikan dan sebagainya.

Pitirin Sorokin pernah mengemukakan bahwa struktur yang berkembang dimasyarakat merupakan ciri utama dari terjadinya proses sosial dan merupakan ciri utama dari masyarakat yang teratur. Pada setiap masyarakat mempunyai system lapisan yang berbeda beda. Lapisan-lapisan social juga menyangkut peranan dan kedudukan seseorang di msyarakat. Kedudukan dimasyarakat akan memungkinkan seseorang untuk melaksanakan peranannya.

Penghargaan terhadap seseorang kepada orang lain merupakan landasan utama terbentuknya struktur sosial di masyarakat. Struktur yang terrjadi di masyarakat merupakan bentuk kebiasaan hubungan antar manusia secara teratur dan tersusun, sehingga setiap orang dan setiap saat akan mempunyai situasi tertentu yang menentukan hubungannya dengan orang lain secara vertical maupu horizontal. Dari sinilah maka setiap masyarakat akan ditemukan dan berkembang dengan sendirinya bentuk

stratifikasi sosial dan hanya masyarakat yang homogenlah yang tidak mengenal strata sosial.

Bentuk -bentuk lapisan yang berkembang dalam masyarakat mempunyai perbedaan-perbedaan , tergantung dalam situasi sosial mana masyarakat itu berinteraksi dan berkembang. Beberapa pendapat mengatakan bahwa lapisan tidak hanya dikenal dalam dunia manusia, melainkan juga dikenal dalam dunia hewan, tumbuhan dan berbagai kehidupan lainnya.

Pitirin A Sorokin; mengatakan bahwa lapisan sosial merupakan pembedaan masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat. Sebagai perwujudannya adalah terbentuknya kelas yang teratas, menengah dan kelas bawah. Selajutnya ia mengatakan bahwa dasar dan inti terbentuknya lapisan masyarakat adalah adanya ketidak seimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban , kewajiban dan tanggung jawab nilai-nilai sosial dan pengaruh di antara anggota-anggotanya.

Stratifikasi terjadi dengan semakin berkembangnya masyarakat, sebab dengan makin berkembangnya masyarakat, maka akan makin terbentuk pola pembagian kerja, tanggung jawab, pembagian hak dan kewajiban dan sebagainya. Bagi masyarakat modern mempunyai kecenderungan mempunyai stratifikasi yang kompleks dan luas. Dalam proses pembentukan system lapisan di masyarakat, secara otomatis juga akan terbentuk system struktur, kelas-kelas sosial.

Strata sosial merupakan suatu bentuk dimana semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukan mereka di ketahui dan di akui oleh masyarakat umum. Sementara dalam pandangan weber yang melihat dari aspek ekonomi yang berkembang di masyarakat mengatakan bahwa strata sosial merupakan pembedaan antara dasar-dasar ekonomis dengan dasar-dasar kedudukan sosial dan lapisan-lapisan.

Untuk memahmi pemahaman tentang struktur sosial atau lapisan-lapisan di dalam masyarakat, Ogburn (Sajogyo. 1985;75) menunjuk beberapa kreteria seperti;

- a. Besarnya dan jumla anggota-anggotanya
- b. Kebudayaan yang sama, yang menentukan hak-hak dan kewajiban warganya;
- c. Kelanggengan;
- d. Tanda-lambang-lambang yang merupakan ciri khas masing-masing kelas
- e. Batas-batas yang tegas
- f. Dan antagonisme tertentu.

Beberapa pandangan mengatakan terjadinya lapisan masyarakat merupakan suatu bentuk gejala sosial yang bersifat universal; namun beberap hal poko yang bisa dijadikan patokan untuk mengetahui terjadinya lapisan sosial di masyaraakat meliputi;

- a. Lapisan sosial yang terjadi di masyarakat sebagai akibat terjadinya pertentangan (*conflict*).
- b. System lapisan dapat dianalisa dari beberap unsure-unsur pokok yaitu:
 - 1) *Distribusi hak-hak istimewa yang objektif*
 - 2) *System pertanggung yang diciptakan oleh warga masyarakat*
 - 3) *Kreteria system pertentangan, yaitu apakah dapat didasarkan pada kualitas pribadi, keanggotaankelompok, kerabat, hak milik, wewenang dan kekuasaan*
 - 4) *Lambang-lambang kedudukan seperti tingkah lakuhidup, cara berpakaian, keanggotaan pada suatu organisasi dan sebagainya*
 - 5) *Mudah dan sukarnya bertukar kedudukan*
 - 6) *Solidaritas diantara individu-individu atau kelompok-kelompok yang menduduki kedudukan yang sam dalam system sosial.*

Berdasarkan bebrap patokan untuk mengetahui lapisan masyarakat, dapat pula diketahui unsur-unsur yang melekat pada system lapisan yang ada dalam masyarakat, yaitu;

- a. unsur kedudukan. Kedudukan merupajkan tempat seseorang dalam suatu kelompok social tertentu. Kedudukan social artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam artian lingkungan pergaulannya, prestice dan hak dan kewajiban-kewajibannya.
- b. Peranan (*role*) peranan adalah aspek yang melekat pada seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dalam kelas-kelas social. Peranan mencakup tiga hal, yaitu
 - 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubunngkan dengan possisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangklaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
 - 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
 - 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

B. Sistem Stratifikasi Sosial

Sistem lapisan dalam masyarakat dapat bersifat tertutup dan terbuka. Pada sifat lapisan tertutup ini memungkinkan masing-masing anggota dalam lapisan ini tidak memungkinkan untuk naik pada lapisan yang

lebih tinggi, sebaiknya pada lapisan terbuka masing-masing aggotanya mempunyai kesempatan untuk menduduki lapisan yang lebih tinggi atau sebaliknya lapisan yang tinggi memungkinkan untuk turun pada lapisan dibawahnya.

Dalam system lapisan tertutup yang terdapat pada masyarakat India atau masyarakat Hindu di Bali mempunyai ciri-ciri tertentu. Soekanto mencatat bahwa ciri-ciri tersebut meliputi:

- 1) Keanggotaan pada kasta diperoleh kerana pewarisan atau karena kelahiran. Anak yang lahir memperoleh kedudukan orang tuanya.
- 2) Keanggotaan yang diwariskan tadi berlaku seumur hidup, oleh kerana seseorang tidak mungkin mengubah kedudukannya, kecuali bila ia dikeluarkan dari kastanya.
- 3) Perkawinan bersifat endogen, dalam artian harus dipilih dari orang yang sekasta;
- 4) Hubungan dengan kelompok sosial lainnyabersifat terbatas;
- 5) Kesadaran pada anggota kasta tertentu, terutama nyata dari nama kasta, pada identifikasi anggota pada kastanya, penyesuaian diri yang ketat terhadap norma-norma kasta dan lain sebagainya
- 6) Kasta diikat oleh kedudukan-kedudukan yang secara tradisional telah ditetapkan.
- 7) *Prestice* suatu kasta benar-benar diperhatikan.

Jika didalam masyarakat bali dan masyarakat India dalam menentukan kelas tidak didasarkan pada kekayaan atau nilai ekonomi, maka beberapa anggota masyarakat memberikan kreteria dalam menentukan lapisan yang terjadi, seperti;

- a. Ukuran kekayaan, barang siapa memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam lapisan teratas, kakayaan tersebut, misalnya, dapat dilihat dalam bentuk rumah yang bersangkutan, mobil pribadi dan cara-cara dalam mempergunakan pakaian sertabahan pakain yang dipakainya.
- b. Ukuran kekuasaan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar, menempati lapisan atas
- c. Ukuran kehormatan. Ukuran kehormatan tersebut mungkin terlepas dari ukuran kekayaan dan atau kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati mendapat tempat teratas. Ukuran semacam ini banyak di jumpai masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa.

d. Ukuran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sebagai ukuran, dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Akan tetapi ukuran tersebut menyebabkan terjadinya akibat-akibat yang negative. Karenan ternyata bahwa bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, melainkan gelar kesajarannya. Sudah barang tentu hal yang demikian memacu segala macam usaha untuk mendapat gelar walau tidak halal.

Fungsi-fungsi stratifikasi adalah sebagai berikut;

- 1) Stratifikasi sosial menjelaskan kepada seseorang "tempat" dalam masyarakat sesuai dengan pekerjaan, menjelaskan kepadanya bagaimana ia harus menjalankannya dan hubungannya dengan tugasnya menjelaskan apa dan bagaimana efek serta sumbangannya kepada masyarakatnya.
- 2) Karena peranan dari setiap tugas dalam setiap masyarakat berbeda-beda dengan sering kali adanya tugas yang kurang dianggap penting oleh masyarakat (karena beberapa pekerjaan meminta pendidikan dan keahlian terlebih dahulu) maka berdasarkan perbedaan persyaratan dan tuntutan atas prestasi kerja, masyarakat biasanya memberikan imbalan kepada yang melaksanakan tugas dengan baik dan sebaliknya "menghukum" yang tidak atau kurang baik. Dengan sendirinya distribusi penghargaan hal mana menghasilkan dengan sendirinya pembentukan stratifikasi sosial.
- 3) Penghargaan yang diberikan biasanya bersifat ekonomik, berupa pemberian status sosial atau fasilitas yang karena distribusinya berbeda (sesuai dengan pemenuhan persyaratan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas) membentuk struktur sosial.

Akhirnya berdasarkan penilaian atas pemenuhan persyaratan dan pelaksanaan tugas dalam masyarakat, akan terbentuk suatu pelembagaan yang dalam tingkat teratasnya menguasai masyarakat dan menentukan distribusi dari penghargaan itu lebih lanjut. Lapisan-lapisan sosiologik dalam masyarakat ini akan merupakan unsure penertib dan mengatur pelaksanaan tugas masing-masing anggota masyarakat. Dengan demikian melalui stratifikasi sosial terbentuklah stratifikasi politik.

BAB VIII

SEKOLAH DAN KELOMPOK SOSIAL

A. Kelompok Sosial

Dalam kehidupan manusia, tidak lepas dari kehidupan berkelompok. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia mempunyai jiwa sosial (rohaniah) yang terdiri dari pikiran dan perasaan. Keduanya akan menghasilkan kehendak yang kemudian menjadi suatu bentuk tindakan. Sekap dan tindakan inilah yang kemudian menjadi landasan jasmaniah manusia sebagai makhluk biologis.

Manusia sebagai makhluk biologis dan makhluk sosial mempunyai naluri untuk selalu berhubungan dengan sesamanya secara berkesinambungan, yang kemudian menghasilkan suatu bentuk konsensus untuk menciptakan pola pergaulan. Pergaulan manusia pada awalnya di mulai dari kelompok kecil dalam masyarakat, yang kemudian disebut keluarga. Dari keluarga inilah kemudian tercipta pengalaman-pengalaman (*social experiences*) yang nantinya mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian seseorang. Kelompok sosial merupakan sekumpulan orang-perorang atau manusia yang terhimpun dalam satu kesatuan dalam kehidupan bersama, yang disebabkan adanya hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara satu dan lainnya.

Ada tiga konsep tentang kelompok sosial yang dikemukakan oleh Homans (Johnson;1989;61) yaitu; (a) kegiatan; (b) interaksi; (c) perasaan. *Kegiatan* merupakan perilaku aktual yang digambarkan pada tingkat yang sangat konkret. Gambaran mengenai kelompok dan para anggotanya meliputi catatan mengenai bentuk kegiatan

yang dilakukan oleh para anggotanya, dan individu-individu serta kelompok-kelompok dapat dibandingkan menurut persamaan dan perbedaan dalam kegiatan yang mereka lakukan, dan dalam tingkat penampilan dari berbagai kegiatan, sementara *interaksi* merupakan kegiatan apa saja yang merangsang atau dirangsang oleh kegiatan orang lain. Individu atau kelompok-kelompok dapat dibandingkan menurut frekuensi dalam berinteraksi, menurut siapa yang memulai interaksi, dengan siapa berinteraksi dan menurut saluran-saluran di mana interaksi itu terjadi. *Perasaan* merupakan suatu keadaan subjektif pada setiap anggota kelompok, namun tidak didefinisikan sebagai suatu keadaan subyektif. Perasaan dimaknai sebagai tanda yang bersifat eksternal, kemudian berperilaku yang menunjukkan sifat-sifat internal, seperti reaksi emosional, kelaparan atau perasaan suka atau tidak suka terhadap seseorang yang ditunjukkan dengan sikap sinis.

Ketiga elemen tersebut ~kegiatan, interaksi dan perasaan~ membentuk suatu keseluruhan yang terorganisasi dan berhubungan secara timbal balik, dalam artian bahwa "kegiatan" akan mempengaruhi ~dan dipengaruhi~ oleh pola-pola "interaksi" dan "perasaan-perasaan". Demikian sebaliknya, "interaksi" akan dipengaruhi dan mempengaruhi oleh "kegiatan" dan "perasaan". Apabila salah satu elemen mengalami perubahan, maka kedua elemen juga akan mengalami perubahan yang sama. Konsep yang dibangun Homans dalam perspektif kelompok sosial di dasarkan atas asumsi *individualistic*.

Berbeda dengan Homans, Rogers (1988:87) mengemukakan bahwa kelompok adalah "*composed of people, in interaction or communication and, together physically, with common interest or goals*".

Konsep tentang kelompok juga dikemukakan oleh Charles Horton Cooley. Dalam pandangannya Cooley melihat dari sisi terkecil dari sebuah kelompok besar, yang kemudian disebut sebagai "kelompok primer" (*primary group*). Ia menyebutkan bahwa "kelompok primer" (*primary group*) merupakan dasar bagi terbentuknya struktur sosial yang lebih besar, karena dalam kelompok inilah individu memperoleh pengalaman tentang kesatuan sosial lebih awal dan paling lengkap dan dalam kelompok primer tidak mengalami perubahan dalam drajat yang sama seperti hubungan-hubungan yang lebih luas, tetapi merupakan suatu sumber yang permanen dari struktur sosial yang muncul. Kelompok primer ini ditandai dengan persatuan (*association*) dan kerjasama tatamuka yang bersifat intim. Tekanan pada pandangan Cooley terletak pada adanya saling ketergantungan antara individu dengan masyarakat, komunikasi antar pribadi dan konsep diri sebagai dasar terbentuknya organisasi sosial.

Dari beberapa pandangan tersebut, sebenarnya belum ada kesepakatan dari para ahli dalam mendefinisikan sebuah kelompok. Namun demikian perlu dicatat bahwa kelompok pada intinya merupakan sekumpulan manusia yang memiliki pola interaksi yang terorganisasi dan terjadi secara berulang ulang. Namun demikian, para ahli sosiologi modern mengartikan bahwa kelompok merupakan kumpulan yang memiliki kesadaran bersama akan anggotanya dan saling berinteraksi.

Seperti yang telah dikemukakan terdahulu, bahwa interaksi merupakan landasan utama dalam proses sosial, termasuk didalamnya dalam pembentukan suatu kelompok sosial di masyarakat. Namun demikian faktor lain yang menentukan terjadinya kelompok bisa dilihat dari beberapa faktor, yaitu:

1. Waktu atau zaman
2. Sebab dan tujuan pembentukan kelompok
3. Sifat dari masing-masing individu yang akan membentuk kelompok
4. Cara pembentukan kelompok.

Terbentuknya sebuah kelompok tidak hanya bisa dilihat dari jumlah anggotanya yang terlibat atau berkumpul dalam suatu tempat, namun juga harus dilihat sebagai satu kesatuan atau ikatan *psychologies*. Kelompok terbentuk karena manusia/individu menyadari keterbatasannya dalam menyelesaikan atau mencapai tujuan yang ingin dicapai. Karena itu manusia membutuhkan hubungan (*interrelationships*) dengan manusia/ individu lainnya.

Faktor-faktor psychology dapat berupa;

1. Takut dicela oleh orang lain;
2. Kebutuhan/perasaan memerlukan kelompok untuk kelangsungan perasaan aman bagi dirinya.

Sementara faktor sosiologik yang paling menentukan adalah;

1. Adanya norma kelompok;
2. Frekuensi komunikasi antar anggota kelompok;
3. Kelompok sebagai tempat perwujudan dari kebutuhan

Park dan Buggers (Susanto;1999;39) mengemukakan bahwa interaksi antar anggota kelompok mempunyai faktor utama yaitu:

1. *an interrelationship of persons;*
2. *an interplay of personality;*
3. *a moving unit interacting personalities.*

Dari faktor di atas maka menghasilkan *we attitude* atau rasa *sense of belonging* pada anggota kelompok.

Terbentuknya kelompok juga didasarkan pada:

1. Keyakinan bersama akan perlunya pengelompokan dan mencapai tujuan
2. Harapan yang dihayati oleh anggota-anggota kelompok
3. Ideologi yang mengikat semua anggota.

Demikian pula, kelompok juga terjadi sebagai akibat adanya interaksi antar kelompok yang kemudian menghasilkan komunitas atau masyarakat yang lebih luas. Biasanya kelompok tersebut terjadi berdasarkan;

1. Pertukaran pengalaman antar anggota masyarakat dan kelompok (unsur penduduk).
2. Pengalaman yang sama pada masing-masing kelompok atau individu.
3. Interaksi mengenai pengetahuan masing-masing tentang wilayahnya.
4. Adanya kebutuhan yang sama dalam bentuk:
 - a. Biologis
 - b. Nilai-nilai, norma dan adat dan
 - c. Tujuan sebagaimana diajarkan oleh kebudayaan.
5. Pengalaman yang dikenal sebagai keterampilan teknis
6. Pengalaman dari organisasi-organisasi sosial
7. Tingkat solidaritas pada masing-masing individu.

B. Klasifikasi Kelompok Sosial

Klasifikasi dari berbagai bentuk kelompok sosial yang ada di masyarakat dapat dilihat dari berbagai faktor dan beberapa teori. Jika dilihat dari proses pembentukan masyarakat secara luas, maka kelompok sosial dapat di klasifikasikan menjadi;

1. tingkat kelompok kecil (*group level*);
2. *community level* (kelompok lokal);
3. *regional community* (regional level);
4. *nasional*;
5. *inter planetary society* (masyarakat dunia).

George Simmel, membagi kelompok sosial berdasarkan besar kecilnya jumlah anggota kelompok, bagaimana ia berinteraksi dan bagaimana masing-masing individu mempengaruhi kelompoknya. Dalam analisisnya Simmel melihat bahwa pengaruh jumlah pada bentuk merupakan perbedaan yang kontras antara bentuk *dyad* dan *triad*. Dalam bentuk *dyad* memperlihatkan ciri khas tertentu yang mempunyai sifat-sifat unik yang tidak terdapat dalam kelompok sosial yang lebih besar. Hal ini disebabkan masing-masing individu dikonfrontasi oleh hanya dua orang saja, dan tanpa adanya bentuk kolektifitas yang bersifat superpersonal.

Dalam kerangka individual, kelompok sosial dapat didasarkan kedalam berbagai bentuk, seperti system kekerabatan, seksual, usia, dan

biasanya juga atas dasar kedudukan dan kekuasaan. Dalam konteks ini Mac Iver yang melihat kelompok sosial berdasarkan penilaian *historic*, sosiologis, ekonomi dan politik membagi kelompok menjadi;

1. Kelompok yang didasarkan pada ikatan darah;
2. Kelompok yang didasarkan pada ikatan desa;
3. Kelompok yang didasarkan pada kota
4. Kelompok yang didasarkan pada ikatan Negara.

Di samping itu Anderson dan Parker juga mengklasifikasikan kelompok didasarkan atas;

1. Kesatuan ekologi (*ecological entities*);
2. Kelompok yang didasarkan atas dorongan naluri manusia (*human group*);
3. Organisasi (*organization*);
4. Lembaga-lembaga masyarakat (*social institution*);
5. Himpunan (*collectivities*).

Charles Horton Cooley (Johnson.1988), (Soekanto.2001), (Polak.2000) membagi kelompok menjadi dua bagian, yang kemudian dikenal dengan kelompok primer (*primary group*) dan kelompok sekunder (*secondary group*). Dalam pandangannya kelompok primer merupakan bagian dari struktur sosial yang lebih besar. Dalam konteks ini ia menekankan bahwa kelompok primer merupakan kelompok yang memberikan kepada individu pengalaman tentang kesatuan sosial yang paling awal dan paling lengkap. Sifat khas dalam pandangan kelompok primer ini adalah adanya hubungan yang erat dan komunikasi berlangsung dengan tatap muka (*face to face*), karenanya pada kelompok ini masing-masing anggotanya biasanya saling kenal mengenal antara satu dengan lainnya. Kelompok primer ini terdapat pada masyarakat agraris, seperti daerah pedesaan. Dengan demikian kelompok primer merupakan kelompok dimana masing-masing individu atau anggotanya dapat saling mengenal.

Pada kelompok *primer* Samuel (Susanto. 1999;55) mengemukakan bahwa fungsi kelompok primer ini membantu perkembangan individu kearah perkembangan pendewasaan yang mempunyai sifat-sifat;

1. Memberi bantuan motivasi dan landasan moral bagi anggotanya;
2. Kelompok mempunyai nilai *practical* bagi individu;
3. Loyalitas dapat menyebabkan adanya hubungan yang erat dan bantuan dalam ikatan kelompok.

Adanya kelompok primer bagi masyarakat yang luas akan memberikan keuntungan-keuntungan bagi individu dalam;

1. Menunjang sifat-sifat manusia dan menolong menghindari sifat lemahnya, memberikan kekuatan batin dan dorongan kepada individu.
2. Sebaliknya mempertebal ketergantungan kepada individu dari kelompok;

3. Menyerap individu dan kepribadiannya dalam kehidupan kolektif;
4. Memperlakukan reaksi yang didasarkan pada perasaan.

Dalam ikatan kelompok primer banyak dikemukakan unsur spontanitas. Sebaliknya pada kelompok sekunder, kelompok ini ditandai dengan pola hubungan yang bersifat formal, *impersonal* dan *segmental*, serta didasarkan pada asas manfaat (*utilitarian*). Karenanya kelompok sekunder diadakan untuk memenuhi beberapa kepentingan khusus (ada kepentingan yang bersifat rasional) dan hubungan antar individu bukan didasarkan atas perasaan.

Salah satu konsekwensi yang tidak dapat dihindari dalam kelompok sosial yang semakin besar adalah diferensiasi sosial yang semakin tinggi. Dalam pandangan Simmel, bahwa masyarakat secara evolusi dan jangka panjang akan terbentuk kelompok yang paling kecil dan sederhana menjadi kelompok besar yang kompleks dan heterogen. Simmel mengakui bahwa terbentuknya diferensiasi pada kelompok akan membantu memberikan alternatif bagi pembentukan kelompok dan sebagian akan membantu dalam memberikan kebebasan bagi individu dari dominasi struktural sosial yang bersifat monolitik.

Sebagai konsekwensi terbentuknya diferensiasi dalam kelompok, maka akan tercipta apa yang dinamakan dengan istilah "kami" dan "mereka". Dalam perspektif sosiologis, apa yang diistilahkan mereka merupakan "*in group*" dan "*out group*". *Out group* diartikan individu sebagai kelompok yang menjadi lawan "*in group*" (Soekanto.2001;135). Konsep *in-group* diperkenalkan oleh W.G. Sumner. Teori ini lahir manakala Sumner (1940) melihat masyarakat "*primitive*" yang merupakan kelompok kecil yang tersebar disuatu wilayah, yang kemudian muncul diferensiasi antara kelompok "kita" dan kelompok "mereka" (*out group*). Sikap *out Group* selalu ditandai dengan suatu kelainan yang berwujud antagonisme dan sikap sinis serta bertentangan. Sebab pada dasarnya perasaan, sikap dan norma yang terdapat pada salah satu kelompok akan dianggap paling baik diantara kelompok lain. Perasaan *in-group* dan *out-group* atau perasaan dalam serta luar kelompok dapat merupakan dasar suatu sikap yang dinamakan etnosentrisme (Polak. 2001;117). Etnosentris diartikan sebagai suatu bentuk yang ditunjukkan oleh seseorang dalam mempercayai sesuatu, sehingga sangat sukar sekali untuk mengubah suatu bentuk yang sudah menjadi kepercayaan dan melembaga, walaupun kadang-kadang apa yang telah dipercayainya adalah perbuatan yang salah. Soekanto (2001;135) mencatat bahwa sikap etnosentris yang ditunjukkan oleh sebagian besar masyarakat tradisional ini disosialisasikan atau diajarkan kepada anggota kelompok sosial, sadar atau tidak sadar, serentak dengan nilai-nilai kebudayaan yang lain. Dalam

proses pembelajaran ini sering digunakan stereotip (*stereotype*) yakni penggambaran atau anggapan yang bersifat mengejek terhadap suatu objek tertentu.

C. Kelompok Formal Dan Kelompok Informal

Pembagian kelompok didasarkan pola organisasi dikemukakan oleh Gitter (Susanto.1999;55) yang membagi kelompok menjadi kelompok formal dan informal. Dalam pandangannya ada dua prinsip yang mengatur tatanan kehidupan sosial dan salah satunya adalah organisasi. Jika individu atau kelompok melakukan suatu hubungan, maka akan terjadi bentuk organisasi yang lebih luas, walaupun organisasi tersebut tidak harus bersifat formal.

Sebuah organisasi yang bersifat formal mempunyai rumusan tentang keberadaan sebagai organisasi, tatacara untuk memobilisasi masing-masing anggotanya dan mengkoordinasikan usaha-usaha untuk mencapai tujuan berdasarkan bagian-bagian yang bersifat spesialisasi. Hubungan hubungan kelompok formal didasarkan pada-aturan -aturan yang sebelumnya sudah ditentukan. Sebuah kelompok formal yang bersifat organisasi ditegakkan pada landasan mekanisme administrasi.

Sementara *informal group* tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu dan pasti. Kelompok ini terbentuk atas dasar perasaan sepenanggungan, atau adanya interaksi yang terjadi berulang ulang dan bertemunya kepentingan yang sama serta pertukaran pengalaman yang sama dari masing-masing individu.

Sementara pada takaran perilaku, kelompok in formal memperlihatkan gejala;

1. Norma dari kelompok formal akan mempengaruhi kelompok in formal baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Apabila terdapat pertentangan antara kelompok formal dan kelompok informal, maka aturan atau norma yang berlaku pada kelompok formallah yang akan digunakan;
3. Dan apabila kelompok informal tidak terbentuk sebagai reaksi dan akan menjadi oposisi terhadap kelompok formal. Dengan demikian akan menjadi penunjang bagi kegiatan kelompok formal.
4. Anggota dari kelompok informal mengalami keserasian dengan menitik beratkan pada kepentingan pribadi kelompok informal.
5. Terbentuknya kelompok in formal akan mengakibatkan terbentuknya pimpinan yang tidak resmi;
6. Pimpinan akan diangkat berdasarkan charisma yang terdapat pada individu.

7. Pimpinan akan bertindak sebagai perumus dari norma yang akan diberlakukan.
8. Perbedaan yang terjadi pada setiap anggotanya akan dikenakan sanksi sosial;
9. Dan pemimpin kelompok in formal akan membela kepentingan kelompoknya.
10. Pada akhirnya kelompok *in formal* akan membentuk struktur sosial secara khirarki.

Suatu gejala dari kedua kelompok ini adalah hubungan keduanya. Dimana didalam kelompok formal akan terbentuk berbagai kelompok in formal. Nilai kelompok in formal yang telah terbentuk akan bertentangan dengan nilai dan aturan yang berlaku dalam organisasi formal.

Di samping beberapa bentuk kelompok yang telah disebutkan diatas, ada beberapa kelompok tak beraturan yang tersebar di masyarakat, namun konsep ini sebenarnya masih menjadi pertentangan di antara para ahli, sebab diantara para ahli mengatakan bahwa kelompok tak beraturan tidak bisa dikatakan sebagai kelompok sosial, karena mereka pada umumnya tidak melakukan kontak sosial ataupun intaraksi yang menghasilkan suatu kesepakatan atau budaya yang menjadi landasan setiap kelompok sosial.

Kelompok sosial yang tidak teratur di masyarakat bentuknya bermacam -macam. Soekanto (2001;157) mencatat bahwa pada dasarnya kelompok tidak teratur dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu;

Pertama adalah kerumunan; kerumunan ini merupakan kumpulan orang-orang yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dalam waktu yang bersamaan. Ukuran utama adanya kerumunan adalah kehadiran orang-orang yang secara fisik. Sedikit banyaknya batas kerumunan adalah sejumlah mata dapat melihat dan selama mata dapat mendengarnya. Dalam konteks sosial kerumunan bukan kelompok yang terorganisir, dalam artian bahwa iteraksi yang terjadi didalamnya hanya bersifat spontan dan identitas seseorang yang masuk kedalam kelompok kerumunan akan tenggelam dan menjadi sama.

Kedua adalah Publik. Publik merupakan kelompok yang tidak dianggap sebagai bentuk kesatuan sosial. Namun interaksi terjadi secara tidak langsung, melainkan melalui alat komunikasi. Dengan alat atau media untuk menyampaikan pesan, memungkinkan public mempunyai pengikut yang lebih luas. Soekanto mencatat bahwa setiap aksi publik di prakarsai oleh tujuan atau keinginan individual.

BAB IX

BUDAYA SEKOLAH

A. Pengertian Budaya Sekolah

Budaya merupakan produk lembaga yang berakar dari sikap mental, komitmen, dedikasi, dan loyalitas setiap personil lembaga. Budaya merupakan pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu kelompok masyarakat yang mencakup cara berpikir, perilaku, sikap, dan nilai-nilai yang tercermin baik dalam wujud fisik maupun abstrak. Budaya adalah asumsi- asumsi dasar dan keyakinan-keyakinan diantara para anggota kelompok atau organisasi. Budaya juga dapat dilihat sebagai suatu perilaku, nilai-nilai, sikap hidup, dan cara hidup untuk melakukan penyesuaian dengan lingkungan dan cara memandang persoalan serta pemecahannya.

Budaya dapat didefinisikan sebagai sikap mental dan kebiasaan lama yang sudah melekat dalam setiap langkah kegiatan dan hasil kerja. Fungsi utama budaya adalah untuk memahami lingkungan dan menentukan bagaimana orang-orang dalam organisasi merespon sesuatu, menghadapi ketidakpastian dan kebingungan.

Mengacu pada pendapat yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa budaya merupakan pandangan hidup yang diakui bersama mencakup cara berpikir, berperilaku dan nilai-nilai yang tercermin dalam komitmen dan loyalitas individu dalam merespon kebutuhan organisasi.

Setelah dipahami pengertian budaya secara umum, akan dikemukakan pengertian budaya sekolah. Budaya

sekolah diartikan sebagai sistem makna yang dianut bersama oleh warga sekolah yang membedakannya dengan sekolah lain. Budaya sekolah disebut kuat bila guru, staf dan stakeholder lainnya saling berbagi nilai-nilai dan keyakinan dalam melaksanakan pekerjaan. Budaya sekolah adalah kerangka kerja yang disadari, terdiri dari sikap-sikap, nilai-nilai, norma-norma, perilaku-perilaku dan harapan-harapan diantara warga sekolah. Bila sudah terbentuk maka keyakinan- keyakinan, nilai-nilai, dan harapan-harapannya cenderung relatif stabil serta memiliki pengaruh yang kuat terhadap sekolah (Jerald Greenberg dalam Ansar dan Masaong, 2010).

Budaya sekolah menentukan bagaimana energi sekolah dan struktur organisasi sekolah akan ditransformasikan ke dalam pekerjaan yang bermanfaat (Burt Nanus). Budaya sekolah merupakan sistem nilai sekolah dan akan mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan serta cara warga sekolah berperilaku. Budaya sekolah dibangun dari kepercayaan yang dipegang teguh secara mendalam tentang bagaimana sekolah seharusnya dikelola atau dioperasikan (Barry Cushway). Budaya sekolah menunjuk pada suatu sistem berbagi makna diantara para warga sekolah yang membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya. Sistem berbagi rasa dalam hal ini merupakan seperangkat karakteristik kunci berupa nilai-nilai sekolah itu sendiri.

Budaya sekolah penting perannya terhadap kesuksesan sekolah dengan beberapa alasan. *Pertama*, budaya sekolah merupakan identitas bagi para guru dan staf di sekolah. *Kedua*, budaya sekolah merupakan sumber penting stabilitas dan kelanjutan sekolah sehingga memberikan rasa aman bagi warga sekolah. *Ketiga*, budaya sekolah membantu para guru baru/formula untuk menginterpretasikan apa yang terjadi di sekolah. *Keempat*, budaya sekolah membantu menstimulus antusiasme guru dan staf dalam menjalankan tugasnya (Newstrom dalam Ansar dan Masaong, 2010).

Budaya sekolah dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain : (1) antusiasme guru dalam mengajar, (2) penguasaan materi yang diajarkan, (3) kedisiplinan sekolah, (4) proses pembelajaran, (5) jadwal yang ditepati, (6) sikap guru terhadap siswa, dan (7) kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin memiliki potensi yang besar untuk memantapkan dan menerapkan budaya sekolah melalui mekanisme pokok, yaitu : (1) perhatian, (2) cara menghadapi krisis, (3) model peran (modeling), (4) pengalokasian penghargaan dan kriteri penyeleksian, serta (5) pemutusan hubungan kerja guru dan staf.

Budaya sekolah berkaitan erat dengan visi dan misi yang dimiliki oleh kepala sekolah. Kepala sekolah yang memiliki visi akan mampu mengatasi tantangan sekolah di masa depan. Hal ini akan efektif apabila : (1) kepala sekolah dapat berperan sebagai model (teladan), (2) mampu membangun tim work yang kuat, (3) belajar dari guru, staf dan siswa, dan (4) harus memahami kebiasaan yang baik di sekolah untuk terus dikembangkan.

Kepala sekolah harus menyadari bahwa budaya sekolah yang ada saat ini tidak lepas dari gaya kepemimpinannya. Perubahan budaya sekolah yang lebih sehat harus dimulai dari gaya kepemimpinan kepala sekolah. Sejalan dengan pernyataan ini, John Kotter menegaskan bahwa budaya sekolah berpengaruh terhadap tiga hal, yaitu : (1) kepala sekolah memperhatikan dan mengembangkan guru dan stafnya sesuai dengan potensinya, (2) dapat mempengaruhi guru-guru yang memiliki kemampuan kepemimpinan dan memiliki kemauan untuk memimpin atau dipimpin, dan (3) membantu menentukan sekolah agar memiliki jaringan informal yang diperlukan untuk membentuk kepemimpinan sekolah yang kuat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya pengembangan budaya mutu di sekolah, yaitu : (1) iklim dan lingkungan sekolah yang kondusif, (2) perangkat kerja dan fasilitas pembelajaran secara memadai, (3) prosedur dan mekanisme kerja yang jelas, (4) dorongan dan pengakuan atas prestasi kerja yang diraih guru dan staf.

Kepemimpinan kepala sekolah dalam pengembangan budaya sekolah merupakan kajian yang masih relatif baru. Kepemimpinan yang berorientasi pada pengembangan budaya sekolah dapat diartikan sebagai upaya kepala sekolah untuk mempengaruhi, merubah dan atau mempertahankan budaya sekolah yang kuat untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan sekolah (Caldwell & Spink, 1993 ; Yukl, 1981). Nilai, keyakinan dan perilaku kepala sekolah menjadi bagian penting untuk melihat keefektifan budaya sekolah.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh kepala sekolah dalam pengembangan budaya sekolah antara lain : (1) kepala sekolah mengartikulasikan visi dan misi sekolah dalam rangka menciptakan kesatuan ide (*the unity of idea*) tentang sekolah sesuai yang dicita-citakan, (2) mengartikulasikan nilai-nilai dan keyakinan dalam organisasi sekolah, (3) menciptakan desain dan struktur organisasi sekolah, (4) menciptakan sistem simbol yang dapat memperkuat keunikan sekolah, (5) membangun sistem reward yang sesuai dengan norma dan nilai yang ada di sekolah, (6) membangun hubungan sosial dan emosional antara siswa, guru, dan masyarakat sesuai komitmen dan visi sekolah.

B. Pembentukan dan Pengembangan Budaya Sekolah

Budaya sekolah merupakan basis interaksi antara semua anggota masyarakat sekolah yang meliputi: (1) nilai-nilai (kepercayaan, kejujuran, dan transparansi, (2) norma-norma (peraturan dan perilaku yang berlaku dan disepakati oleh semua anggota masyarakat sekolah, serta (3) kebiasaan yang memberikan keunikan atau kekhususan pada sekolah.

Budaya sekolah juga memperhatikan ketentuan umum yang berlaku tanpa mengabaikan kondisi local masyarakat. Khusus mengenai cara belajar dan cara berperilaku siswa, perlu dikelola secara baik agar warga sekolah dalam hal ini, siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan komite sekolah dapat saling menghargai.

Budaya sekolah yang positif muncul dari hubungan yang baik diantara kepala sekolah, dan guru, guru dan guru, guru dan siswa, siswa dan siswa, serta antar semua warga sekolah. Ini merupakan cirri sekolah yang berpengaruh positif terhadap proses belajar mengajar di sekolah.

Kepala sekolah memiliki peran kunci dalam mengembangkan budaya sekolah yang positif. Pengembangan ini dilakukan melalui kerjasama bersama guru-guru dan warga sekolah, dengan memberi contoh tentang nilai-nilai dan perilaku positif sehingga terbentuk budaya mutu di sekolah.

Budaya mutu yang baik adalah yang dikembangkan secara utuh dan terpadu sebagai suatu sistem. Bangunan budaya mutu di sekolah yang harus dikembangkan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, sedangkan visi dan misi harus berfokus pada *customer* (pengguna jasa) baik internal maupun eksternal. Visi dan misi akan bisa dicapai secara efektif jika dibarengi dengan keyakinan dan nilai-nilai yang dianut serta diterapkan oleh warga sekolah. Selain itu, nilai-nilai dan keyakinan itu harus mampu meningkatkan keterlibatan warga sekolah, *stakeholder* dan masyarakat. Keyakinan dan nilai-nilai tersebut harus mampu mendorong dan meningkatkan komitmen kerja untuk menghindari dan mengantisipasi aspek-aspek yang dapat mengganggu terwujudnya tujuan sekolah.

Pengembangan budaya sekolah hendaknya senantiasa merujuk pada kemampuan kepala sekolah dalam mengembangkan budaya unggul (*the culture of execuence*) di sekolah. Kepala sekolah hendaknya menekankan pentingnya membangun budaya yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas proses pendidikan di sekolah.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh kepala sekolah dalam pengembangan budaya sekolah menurut Ansar dan Masaong (2010) antara lain: (1) kepala sekolah mengartikulasikan visi dan misi sekolah

dalam rangka menciptakan kesatuan ide (*the unity of idea*) tentang sekolah yang dicita-citakan, (2) mengartikulasikan nilai-nilai dan keyakinan dalam organisasi sekolah, (3) menciptakan disain dan struktur organisasi sekolah, (4) menciptakan symbol yang dapat memperkuat keunikan sekolah, (5) membangun reward yang sesuai dengan norma dan nilai yang ada di sekolah, (6) membangun hubungan sosial dan emosional antara siswa, guru, dan masyarakat sesuai komitmen dan visi sekolah.

Suasana sekolah (*school atmosphere*) yang kondusif merupakan persyaratan yang mutlak untuk terjadinya suatu interaksi yang sehat dikalangan siswa. Peningkatan suasana sekolah yang sehat akan menjamin terjadinya kepuasan dan memacu motivasi dan kreativitas dikalangan siswa dalam menjalankan kegiatan pembelajaran yang berkualitas. Secara operasional suasana sekolah yang kondusif ditandai antara lain oleh terjadinya interaksi yang optimal antara guru dan siswa, antar sesama guru serta antar sesama siswa.

Budaya sekolah (*school culture*) memegang peran penting dalam menciptakan suasana sekolah yang kondusif sehingga berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Budaya sekolah yang dimaksud adalah norma-norma yang berlaku dan dilaksanakan oleh warga sekolah, yang mampu menumbuhkembangkan kesadaran diri, watak etos kerja, disiplin, kerjasama, sikap pluralitas dalam berbagai aspek kehidupan, kreativitas, produktivitas, kemampuan berpikir kritis, solidaritas, toleransi, dan daya saing anak didik.

Pengembangan budaya sekolah sangat ditentukan oleh lingkungan fisik, lingkungan sosial, nilai-nilai yang berkembang di sekolah dan keteladanan. Untuk itu penumbuhan budaya sekolah akan diiringi dengan pengembangan lingkungan fisik sekolah yang bersih, rapi, sejuk dan tenang, serta lingkungan fisik sosial yang damai, saling toleran tetapi disiplin dalam menegakkan aturan dan semua itu akan dipandu oleh keteladanan oleh pimpinan sekolah dan guru. Budaya sekolah yang baik dengan sendirinya adalah yang juga kondusif untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing. Penumbuhan budaya sekolah memerlukan upaya sungguh-sungguh, jangka panjang dan konsisten. Untuk itu diperlukan dukungan pihak-pihak yang terkait agar sekolah dapat melaksanakannya dengan baik, khususnya dari komite sekolah, dinas pendidikan dan terutama prakarsa sekolah itu sendiri. Budaya sekolah sebagai aspek penting dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah yang meliputi nilai, norma, peraturan, ide serta berbagai perkara lain yang semuanya diterima dan dilakukan di sebuah sekolah. Budaya sekolah

merupakan peraturan yang tidak tertulis serta tradisi, norma dan ekspektasi. Budaya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak merupakan elemen-elemen simbolik dari kehidupan sekolah.

C. Budaya Mikro Sekolah

Berhubung terdapat berbagai macam dan lingkup kelompok sosial, maka terdapat pula berbagai budaya, baik pada tingkat nasional, maupun pada tingkat organisasi. Berdasarkan rumusan pengertian di atas, maka jelas bahwa budaya merupakan sesuatu yang sukar dipahami, tidak dapat diraba, harus dipatuhi dan diterima sebagai kebenaran. Namun demikian, setiap organisasi mengembangkan seperangkat asumsi dasar, pemahaman dan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi, yang menentukan perilaku sehari-hari di sekolah, yaitu sebagai budaya -mikro. Budaya-mikro sekolah diartikan sebagai budaya yang berlaku. Unsur-unsur budaya yang berlaku di lingkungan sekolah A, belum tentu berlaku pula secara keseluruhan di lingkungan sekolah B.

Budaya pada tingkat organisasi, mempunyai 7 (tujuh) karakteristik utama, yaitu:

- a. *Innovation and risk taking. The degree to which employees are encouraged to be innovative and take risks.*
- b. *Attention to detail. The degree to which employees are expected to exhibit precision, analysis, and attention to detail.*
- c. *Outcome orientation. The degree to which management focuses on results or outcomes rather than on the techniques and processes used to achieve those outcomes.*
- d. *People orientation. The degree to which management decisions take into consideration the effect of outcomes on people within the organization.*
- e. *Team orientation. The degree to which work activities are organized around teams rather than individuals.*
- f. *Aggressiveness. The degree to which people are aggressive and competitive rather than easygoing.*
- g. *Stability. The degree to which organizational activities emphasize maintaining the status quo in contrast to growth.*

(Robbins, 2005:485).

Setiap karakteristik tersebut, berada pada sebuah kontinum, dari rendah hingga tinggi. Penilaian atas tujuh karakteristik tersebut, memberikan suatu gambaran lengkap dari budaya sekolah. Budaya sekolah juga berpengaruh pada tingkat komitmen yang ditunjukkan oleh anggota sekolah. Komitmen, sebagaimana diuraikan di atas, merupakan suatu kondisi di mana anggota kelompok memberikan upaya, kemampuan

n dan kesetiaan kepada sekolah, dan kondisi tersebut terkait dengan kepuasan. Dengan demikian, budaya menciptakan kondisi dalam sekolah di mana anggota mau atau tidak mau memberikan komitmennya bagi pencapaian tujuan sekolah. Kemauan untuk menerima budaya sekolah sangat penting bagi penyesuaian diri para anggota. *"Willingness to adopt an organization's rituals and way of life is essential to acculturation"*. (Hodge, Anthony & Gales, 1996:281).

Tabel. Jenis Nilai dan Perilaku Dasarnya menurut Spranger.

No	Nilai	Perilaku Dasar
1	Ilmu Pengetahuan	Berfikir
2	Ekonomi	Bekerja
3	Kesenian	Menikmati keindahan
4	Keagamaan	Memuja
5	Kemasyarakatan	Berbakti/berkorban
6	Politik/kenegaraan	Berkuasa/memerintah

Sumber : Modifikasi dari Sumadi Suryabrata. 1990. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: Rajawali.

Dengan memahami konsep tentang budaya organisasi sebagaimana telah diutarakan di atas, selanjutnya di bawah ini akan diuraikan tentang pengembangan budaya organisasi dalam konteks persekolahan. Secara umum, penerapan konsep budaya organisasi di sekolah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penerapan konsep budaya organisasi lainnya. Kalaupun terdapat perbedaan mungkin hanya terletak pada jenis nilai dominan yang dikembangkannya dan karakteristik dari para pendukungnya. Berkenaan dengan pendukung budaya organisasi di sekolah Paul E. Heckman sebagaimana dikutip oleh Stephen Stolp (1994) mengemukakan bahwa *"the commonly held beliefs of teachers, students, and principals."*

Nilai-nilai yang dikembangkan di sekolah, tentunya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sekolah itu sendiri sebagai organisasi pendidikan, yang memiliki peran dan fungsi untuk berusaha mengembangkan, melestarikan dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada para siswanya. Nilai-nilai yang mungkin dikembangkan di sekolah tentunya sangat beragam. Jika merujuk pada pemikiran Spranger, maka setidaknya terdapat enam jenis nilai yang seyogyanya dikembangkan di sekolah. Dalam tabel 1 berikut ini dikemukakan keenam jenis nilai dari Spranger beserta perilaku dasarnya.

Dengan merujuk pada pemikiran Fred Luthan, dan Edgar Schein, di bawah ini akan diuraikan tentang karakteristik budaya organisasi di sekolah, yaitu tentang (1) *observed behavioral regularities*; (2) *norms*; (3) *dominant value*. (4) *philosophy*; (5) *rules* dan (6) *organization climate*.

1. *Observed behavioral regularities* budaya organisasi di sekolah ditandai dengan adanya keberaturan cara bertindak dari seluruh anggota sekolah yang dapat diamati. Keberaturan berperilaku ini dapat berbentuk acara-acara ritual tertentu, bahasa umum yang digunakan atau simbol-simbol tertentu, yang mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh anggota sekolah.
2. *Norms*; budaya organisasi di sekolah ditandai pula oleh adanya norma-norma yang berisi tentang standar perilaku dari anggota sekolah, baik bagi siswa maupun guru. Standar perilaku ini bisa berdasarkan pada kebijakan intern sekolah itu sendiri maupun pada kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Standar perilaku siswa terutama berhubungan dengan pencapaian hasil belajar siswa, yang akan menentukan apakah seorang siswa dapat dinyatakan lulus/naik kelas atau tidak. Standar perilaku siswa tidak hanya berkenaan dengan aspek kognitif atau akademik semata namun menyangkut seluruh aspek kepribadian. Secara umum standar perilaku yang diharapkan dari tamatan Sekolah Menengah Atas, diantaranya mencakup : (1) Memiliki keyakinan dan ketaqwaan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya; (2)Memiliki nilai dasar humaniora untuk menerapkan kebersamaan dalam kehidupan; (3) Menguasai pengetahuan dan keterampilan akademik serta beretos belajar untuk melanjutkan pendidikan; (4) Mengalihkan kemampuan akademik dan keterampilan hidup dimasyarakat local dan global; (5) Berekspresi dan menghargai seni; (6) Menjaga kebersihan, kesehatan dan kebugaran jasmani; (7) Berpartisipasi dan berwawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis. (Depdiknas, 2002). Sedangkan berkenaan dengan standar perilaku guru, tentunya erat kaitannya dengan standar kompetensi yang harus dimiliki guru, yang akan menopang terhadap kinerjanya. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu: (1) Kompetensi pedagogik yaitu merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi: (a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (b) pemahaman terhadap peserta didik; (c) pengembangan kurikulum/ silabus; (d) perancangan pembelajaran; (e) pelaksanaan pembelajaran

yang mendidik dan dialogis; (f) evaluasi hasil belajar; dan (g) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya; (2) Kompetensi kepribadian yaitu merupakan kemampuan kepribadian yang: (a) mantap; (b) stabil; (c) dewasa; (d) arif dan bijaksana; (e) berwibawa; (f) berakhlak mulia; (g) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (h) mengevaluasi kinerja sendiri; dan (i) mengembangkan diri secara berkelanjutan; (3) Kompetensi sosial yaitu merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk: (a) berkomunikasi lisan dan tulisan; (b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; (c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik; dan (d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar; dan (4) Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi: (a) konsep, struktur, dan metoda keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar; (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; (c) hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; (d) penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan (e) kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

3. *Dominant values*; jika dihubungkan dengan tantangan pendidikan Indonesia dewasa ini yaitu tentang pencapaian mutu pendidikan, maka budaya organisasi di sekolah seyogyanya diletakkan dalam kerangka pencapaian mutu pendidikan di sekolah. Nilai dan keyakinan akan pencapaian mutu pendidikan di sekolah hendaknya menjadi hal yang utama bagi seluruh warga sekolah. Adapun tentang makna dari mutu pendidikan itu sendiri, Jiyono sebagaimana disampaikan oleh Sudarwan Danim (2002) mengartikannya sebagai gambaran keberhasilan pendidikan dalam mengubah tingkah laku anak didik yang dikaitkan dengan tujuan pendidikan. Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut. Sedangkan pada aspek proses, mutu pendidikan ditunjukkan melalui pengkoordinasian dan penyerasian serta pemanduan input sekolah dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Sementara, dari aspek out put, mutu pendidikan dapat dilihat dari prestasi sekolah, khususnya prestasi siswa, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Berbicara tentang upaya menumbuh-kembangkan budaya mutu di sekolah akan

mengingatkan kita kepada suatu konsep manajemen dengan apa yang dikenal dengan istilah *Total Quality Management (TQM)*, yang merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan suatu unit usaha untuk mengoptimalkan daya saing organisasi melalui prakarsa perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses kerja, dan lingkungannya. Berkaitan dengan bagaimana TQM dijalankan, Gotsch dan Davis sebagaimana dikutip oleh Sudarwan Danim (2002) mengemukakan bahwa aplikasi TQM didasarkan atas kaidah-kaidah : (1) Fokus pada pelanggan; (2) obsesi terhadap kualitas; (3) pendekatan ilmiah; (4) komitmen jangka panjang; (5) kerjasama tim; (6) perbaikan kinerja sistem secara berkelanjutan; (7) diklat dan pengembangan; (8) kebebasan terkendali; kesatuan tujuan; dan (10) keterlibatan dan pemberdayaan karyawan secara optimal. Dengan mengutip pemikiran Scheuing dan Christopher, dikemukakan pula empat prinsip utama dalam mengaplikasikan TQM, yaitu: (1) kepuasan pelanggan, (2) respek terhadap setiap orang; (3) pengelolaan berdasarkan fakta, dan (4) perbaikan secara terus menerus.(Sudarwan Danim, 2002). Selanjutnya, dalam konteks Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Depdiknas (2001) telah memerinci tentang elemen-elemen yang terkandung dalam budaya mutu di sekolah, yakni : (a) informasi kualitas harus digunakan untuk perbaikan; bukan untuk mengadili/ mengontrol orang; (b) kewenangan harus sebatas tanggung jawab; (c) hasil harus diikuti penghargaan (*reward*) atau sanksi (*punishment*); (d) kolaborasi dan sinergi, bukan kompetisi, harus merupakan basis kerja sama; (e) warga sekolah merasa aman terhadap pekerjaannya; (f) atmosfir keadilan (*fairness*) harus ditanamkan; (g) imbal jasa harus sepadan dengan nilai pekerjaannya; dan (h) warga sekolah merasa memiliki sekolah. Di lain pihak, Jann E. Freed et. al. (1997) dalam tulisannya tentang *A Culture for Academic Excellence: Implementing the Quality Principles in Higher Education*. dalam *ERIC Digest* memaparkan tentang upaya membangun budaya keunggulan akademik pada pendidikan tinggi, dengan menggunakan prinsip- prinsip *Total Quality Management*, yang mencakup : (1) *vision, mission, and outcomes driven*; (2) *systems dependent*; (3) *leadership: creating a quality culture*; (4) *systematic individual development*; (4) *decisions based on fact*; (5) *delegation of decision making*; (6) *collaboration*; (7) *planning for change*; dan (8) *leadership: supporting a quality culture*. Dikemukakan pula bahwa “*when the quality principles are implemented holistically, a culture for academic excellence is created*. Dari pemikiran Jan E.Freed et. al. di atas, kita dapat menarik benang merah bahwa untuk dapat membangun budaya keunggulan akademik atau budaya mutu pendidikan betapa pentingnya kita untuk

dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip *Total Quality Management*, dan menjadikannya sebagai nilai dan keyakinan bersama dari setiap anggota sekolah.

4. *Philosophy*; budaya organisasi ditandai dengan adanya keyakinan dari seluruh anggota organisasi dalam memandang tentang sesuatu secara hakiki, misalnya tentang waktu, manusia, dan sebagainya, yang dijadikan sebagai kebijakan organisasi. Jika kita mengadopsi filosofi dalam dunia bisnis yang memang telah terbukti memberikan keunggulan pada perusahaan, di mana filosofi ini diletakkan pada upaya memberikan kepuasan kepada para pelanggan, maka sekolah pun seyogyanya memiliki keyakinan akan pentingnya upaya untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan.
5. *Rules*; budaya organisasi ditandai dengan adanya ketentuan dan aturan main yang mengikat seluruh anggota organisasi. Setiap sekolah memiliki ketentuan dan aturan main tertentu, baik yang bersumber dari kebijakan sekolah setempat, maupun dari pemerintah, yang mengikat seluruh warga sekolah dalam berperilaku dan bertindak dalam organisasi.
6. *Organization climate*; budaya organisasi ditandai dengan adanya iklim organisasi. *Hay Resources Direct* (2003) mengemukakan bahwa "*organizational climate is the perception of how it feels to work in a particular environment. It is the "atmosphere of the workplace" and people's perceptions of "the way we do things here*

Di sekolah terjadi interaksi yang saling mempengaruhi antara individu dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial. Lingkungan ini akan dipersepsi dan dirasakan oleh individu tersebut sehingga menimbulkan kesan dan perasaan tertentu. Dalam hal ini, sekolah harus dapat menciptakan suasana lingkungan kerja yang kondusif dan menyenangkan bagi setiap anggota sekolah, melalui berbagai penataan lingkungan, baik fisik maupun sosialnya. Moh. Surya (1997) menyebutkan bahwa:

Lingkungan kerja yang kondusif baik lingkungan fisik, sosial maupun psikologis dapat menumbuhkan dan mengembangkan motif untuk bekerja dengan baik dan produktif. Untuk itu, dapat diciptakan lingkungan fisik yang sebaik mungkin, misalnya kebersihan ruangan, tata letak, fasilitas dan sebagainya. Demikian pula, lingkungan sosial-psikologis, seperti hubungan antar pribadi, kehidupan kelompok, kepemimpinan, pengawasan, promosi, bimbingan, kesempatan untuk maju, kekeluargaan dan sebagainya. "

Pentingnya membangun budaya organisasi di sekolah terutama berkenaan dengan upaya pencapaian tujuan pendidikan sekolah dan peningkatan kinerja sekolah. Sebagaimana disampaikan oleh Stephen Stolp (1994) tentang School Culture yang dipublikasikan dalam ERIC Digest, dari beberapa hasil studi menunjukkan bahwa budaya organisasi di sekolah berkorelasi dengan peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa serta kepuasan kerja dan produktivitas guru. Upaya untuk mengembangkan budaya organisasi di sekolah terutama berkenaan tugas kepala sekolah selaku leader dan manajer di sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah hendaknya mampu melihat lingkungan sekolahnya secara holistik, sehingga diperoleh kerangka kerja yang lebih luas guna memahami masalah-masalah yang sulit dan hubungan-hubungan yang kompleks di sekolahnya. Melalui pendalaman pemahamannya tentang budaya organisasi di sekolah, maka ia akan lebih baik lagi dalam memberikan penajaman tentang nilai, keyakinan dan sikap yang penting guna meningkatkan stabilitas dan pemeliharaan lingkungan belajarnya.

BAB X

SOSIALISASI DAN PENYESUAIAN DIRI DI SEKOLAH

A. Pengaruh Iklim Sosial Terhadap Sosialisasi Anak

Budaya dan iklim organisasi sekolah secara konsisten ditemukan berkorelasi positif dengan prestasi belajar. Penelitian Cheng (1993) menunjukkan bahwa sekolah dengan budaya organisasi (cita-cita, keyakinan, dan misi) yang kokoh cenderung dipandang lebih efektif dalam hal produktivitas, kemampuan adaptasi dan keluwesan. Demikian juga halnya, kinerja sekolah ditentukan oleh suasana atau iklim lingkungan kerja pada sekolah tersebut. Di negara-negara maju, riset tentang iklim kerja di sekolah telah berkembang dengan mapan dan memberikan sumbangan yang cukup signifikan bagi pembentukan sekolah-sekolah yang berhasil. Ditegaskan bahwa jika guru merasakan suasana kerja yang kondusif di sekolahnya, maka dapat diharapkan siswanya akan mencapai prestasi akademik yang memuaskan.

Kekondusifan iklim kerja suatu sekolah mempengaruhi sikap dan tindakan seluruh komunitas sekolah tersebut, khususnya pada pencapaian prestasi akademik siswa. Purkey dan Smith (1985) menyatakan bahwa prestasi akademik siswa dipengaruhi sangat kuat oleh suasana kejiwaan atau iklim kerja sekolah. Lebih lanjut Hughes (1991) menegaskan bahwa setiap sekolah mempunyai karakter suasana kerja, yang akan mempengaruhi keberhasilan proses kegiatan pembelajaran di kelas.

1. Menciptakan suasana kondusif

Pembentukan suasana pembelajaran yang kondusif perlu diciptakan dalam seluruh lingkungan sekolah

termasuk didalamnya lingkungan kelas. Secara eksplisit faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran di dalam kelas antara lain adalah kompetensi guru, metode pembelajaran yang dipakai, kurikulum, sarana dan prasarana, serta lingkungan pembelajaran baik lingkungan alam, psikososial dan budaya (Depdikbud, 1994). Dapat diartikan disini bahwa lingkungan sosial pembelajaran di kelas maupun di sekolah (kantor guru dan staf tata usaha) mempunyai pengaruh baik langsung maupun tak langsung terhadap proses kegiatan pembelajaran.

2. Ciri-ciri yang kondusif

Dalam sekolah efektif, perhatian khusus diberikan kepada penciptaan dan pemeliharaan iklim yang kondusif untuk belajar (Reynolds, 1990). Iklim yang kondusif ditandai dengan terciptanya lingkungan belajar yang aman, tertib, dan nyaman sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Iklim adalah konsep sistem yang mencerminkan keseluruhan gaya hidup suatu organisasi. Apabila gaya hidup itu dapat ditingkatkan, kemungkinan besar tercapai peningkatan prestasi kerja (Davis dan Newstrom, 1985). Pandangan ini mengindikasikan kualitas iklim yang memungkinkan meningkatnya prestasi kerja. Iklim tidak dapat dilihat dan disentuh, tetapi ia ada seperti udara dalam ruangan. Ia mengitari dan mempengaruhi segala hal yang terjadi dalam suatu organisasi. Iklim dapat mempengaruhi motivasi, prestasi, dan kepuasan kerja (Davis dan Newstrom, 1985).

3. Penggolongan Iklim Sekolah

Budaya dan iklim sekolah yang kondusif sangat penting agar siswa merasa tenang, aman dan bersikap positif terhadap sekolahnya, agar guru merasakan diri dihargai, dan agar orangtua dan masyarakat merasa dirinya diterima dan dilibatkan (Townsend, 1994). Hal ini dapat terjadi melalui penciptaan norma dan kebiasaan yang positif, hubungan dan kerja sama yang harmonis yang didasari oleh sikap saling menghargai satu sama lain. Hal yang sama dikemukakan oleh Wijaya (2005), yaitu budaya sekolah yang perlu ditumbuhkan berupa suasana saling hormat antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan guru, dan dengan pihak lainnya. Sehubungan dengan itu maka budaya dan iklim sekolah dapat digolongkan menjadi enam kondisi yaitu: (1) iklim terbuka, (2) iklim bebas, (3) iklim terkontrol (4) iklim familier (kekeluargaan), (5) iklim parternal, dan (6) iklim tertutup (Halpin & B Croft dalam Burhanudin, 1994) . Selain itu, iklim sekolah yang kondusif mendorong setiap personil yang terlibat dalam organisasi sekolah untuk bertindak dan melakukan yang terbaik yang mengarah pada prestasi siswa yang tinggi.

4. Yang perlu diperhatikan dalam pengembangan budaya sekolah

Beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dikemukakan berikut ini.

1). Penataan dan Perawatan Fasilitas Fisik Sekolah

Salah satu ciri sekolah efektif adalah terciptanya budaya dan iklim sekolah yang menyenangkan sehingga siswa merasa aman, nyaman, dan tertib di dalam belajarnya. Hal ini ditandai dengan fasilitas-fasilitas fisik sekolah terawat dengan baik. Penampilan fisik sekolah selalu bersih, rapi, indah dan nyaman. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

1. Pekarangan dan lingkungan sekolah yang tertata sedemikian rupa sehingga memberi kesan asri, teduh, dan nyaman, serta dimanfaatkan untuk menanam sayuran dan apotik hidup.
2. Budaya bersih juga senantiasa ditumbuhkan di kalangan warga sekolah dengan membiasakan perilaku membuang sampah pada tempatnya.
3. Dalam lingkungan sekolah terdapat beberapa kawasan khusus seperti: kawasan wajib senyum, kawasan bebas narkoba dan rokok, dan kawasan wajib bahasa Inggris (English area).
4. Adanya pembiasaan-pembiasaan yang bernuansa moral dan akhlak yang mendorong meningkatnya kecerdasan spritual peserta didik, seperti: (a) berdoa sebelum pelajaran dimulai; (b) menumbuhkan budaya relegius dengan membiasakan murid mengucapkan dan membalas salam setiap bertemu; (c) mengadakan pengajian secara rutin; (d) shalat berjamaah pada waktu shalat duhur; dan (e) terdapat juga sekolah yang mengadakan “kultum” setiap hari dan menugaskan siswa berceramah sekali seminggu.

2). Penataan Ruang Kelas

Penataan ruang kelas ditujukan untuk memperoleh kondisi kelas yang menyenangkan sehingga tercipta suasana yang mendorong siswa lebih tenang belajar. Penggunaan musik instrumentalia yang lembut dapat lebih menciptakan suasana menyenangkan dan memberi efek penentraman emosi, baik pada saat siswa belajar di kelas maupun pada saat mereka melakukan berbagai aktivitas lainnya di luar kelas.

3). Penggunaan Sistem Kelas Berpindah (Moving-Class)

Moving-class adalah sistem pengelolaan aktivitas pembelajaran di mana kelas-kelas tertentu ditata khusus menjadi sentra pembelajaran bidang studi/mata pelajaran tertentu. Penggunaan sistem moving-class (kelas berpindah) merupakan alternatif yang dapat ditempuh untuk mengefektifkan penataan ruangan kelas sebagai sentra belajar. Dalam sistem moving-class ini, ruang-ruang kelas tertentu dapat ditata khusus untuk mendukung pembelajaran mata pelajaran tertentu. Ada kelas sains, kelas bahasa, kelas matematika, kelas kesenian, dan sebagainya. Kelas-kelas ini ditata menjadi semacam home-room atau sentra belajar khusus.

Meja, kursi, peralatan, media, pajangan, dan berbagai aspek yang ada di kelas diatur sedemikian rupa sesuai kebutuhan dan karakteristik pembelajaran mata pelajaran tertentu.

4). Penggunaan Poster Afirmasi

Poster -poster afirmasi, yaitu poster yang berisi pesan-pesan positif digunakan dan dipajang di berbagai tempat strategis yang mudah dan dapat selalu dilihat oleh siswa. Poster afirmasi ini dapat digunakan untuk mensosialisasikan dan menanamkan pesan-pesan spiritual kepada siswa dan warga sekolah.

Pesan-pesan spiritual untuk poster afirmasi dapat berupa petikan ayat Al-Quran, hadist, pesan pujangga, atau puisi-puisi spiritual. Yang perlu diperhatikan, adalah pengadaan dan penempatan poster afirmasi ini jangan sampai terkesan berlebihan atau menjadi pesan sloganis belaka.

B. Persaingan Dan Kerjasama

Sekolah adalah salah satu arena persaingan. Mulai dari awal masa pendidikan formal, seorang anak belajar dalam suasana kompetisi dan harus berjuang keras memenangkan kompetisi untuk bisa naik kelas atau lulus.

Setiap kali kita meminta siswa mencoba sesuatu yang baru untuk pertama kalinya, kita meminta mereka mengambil langkah yang menakutkan, keluar dari zona nyaman, untuk dengan berani berubah

1. Persaingan

Persaingan merupakan kondisi real yang dihadapi setiap orang di masa sekarang. Kompetisi dan persaingan tersebut bisa dihadapi secara positif atau negatif, bergantung kepada sikap dan mental persepsi kita dalam memaknai persaingan tersebut. Hampir tiada hal yang tanpa kompetisi/persaingan, kompetisi/persaingan dalam berprestasi, dunia usaha bahkan dalam proses belajar.

Persaingan menurut kamus ilmiah populer adalah kompetisi, banyak pengajar memakai system kompetisi dalam pengajaran dan penilaian anak didik. Dalam model pembelajaran kompetisi, siswa belajar dalam suasana persaingan. Tidak jarang pula, guru memakai imbalan dan ganjaran sebagai sarana untuk memotivasi siswa dalam memenangkan kompetisi dengan sesama pembelajar. Teknik imbalan dan ganjaran yang didasari oleh teori behaviorisme ini banyak mewarnai system penilaian hasil belajar. Tujuan utama evaluasi dalam model pembelajaran kompetisi adalah menempatkan anak didik dalam urutan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah.

Secara positif, model kompetisi seperti ini bisa menimbulkan rasa cemas yang justru bisa memacu siswa untuk meningkatkan kegiatan belajar mereka, sedikit rasa cemas memang mempunyai korelasi positif dengan motivasi belajar. Namun sebaliknya, rasa cemas yang berlebihan justru merusak motivasi.

Apa sebenarnya arti kompetisi? Kompetisi merupakan persaingan yang menunjuk kepada kata sifat siap bersaing dalam kondisi nyata dari setiap hal atau aktivitas yang dijalani. Ketika kita bersikap kompetitif, maka berarti kita memiliki sikap siap serta berani bersaing dengan orang lain. Dalam arti yang positif dan optimis, kompetisi bisa diarahkan kepada kesiapan dan kemampuan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan kita sebagai umat manusia. Kompetisi seperti ini merupakan motivasi diri sekaligus faktor penggali dan pengembang potensi diri dalam menghadapi bentuk-bentuk kompetisi, sehingga kompetisi tidak semata-mata diarahkan untuk mendapatkan kemenangan dan mengalahkan lawan. Dengan memaknai kompetisi seperti itu, kita menganggap kompetitor lain sebagai partner (bukan lawan) yang memotivasi diri untuk meraih prestasi. Inilah bentuk kompetisi yang dilandasi sifat sehat dan tidak mengarah kepada timbulnya permusuhan atau konflik, sehingga tidak bersifat deskruktif dan membahayakan kelangsungan dan keharmonisan kehidupan.

Lalu bagaimana cara menghadapi persaingan?

- a. Bersikap dan berjiwa besar dengan berani menerima kenyataan serta mengakui kelebihan orang lain
- b. Menghargai dan mengapresiasi kerja orang lain
- c. Menghindari kesombongan atas keberhasilan diri
- b. Menghindari upaya dan cara yang tidak benar, tidak adil dan merugikan orang lain dalam berkompetisi
- c. Menumbuhkan sifat cinta damai, anti kekerasan dalam menyelesaikan masalah
- d. Menjadikan orang lain sebagai partner, bukan lawan yang harus dikalahkan atau dihancurkan, tetapi sebagai motivator dan kompetitor dalam berprestasi

Manfaat Kompetisi

- a. Membiasakan diri hidup disiplin dan siap menghadapi tantangan atau masalah
- b. Memiliki semangat untuk bekerja keras dan berfikir cerdas dalam meraih dan memperjuangkan sesuatu
- c. Menjadi motivator dalam menggali, mengasah dan mengembangkan potensi diri

Sikap “ agar aku bisa menang, orang lain harus kalah” erat hubungannya dengan prinsip “tujuan menghalalkan segala cara”. Seorang yang begitu berambisius untuk menang tetapi merasa tidak bisa

mengalahkan pesaingnya bisa tergoda untuk menjatuhkan pesaingnya dengan cara apapun. Terlalu banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan cara-cara keji dan licik dalam memenangkan persaingan.

Sayangnya, model kompetisi masih dominan dibanyak sekolah. Malah dalam pikiran banyak pendidik, model ini merupakan satu-satunya yang bisa dipakai. Sebagian besar anak didik harus puas dengan predikat “rata - rata” dan beberapa anak harus dianggap “ gagal” agar segelintir anak bisa mendapat predikat “berprestasi”. Para pendidik ini tidak bisa disalahkan karena politik pendidikan membuat mereka berpikiran begitu.

2. Kerjasama

Kerjasama merupakan kebutuhan yang sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup, tanpa kerjasama tidak akan ada individu, keluarga, organisasi, atau sekolah.

Kebanyakan pengajar enggan menerapkan system kerjasama di dalam kelas karena beberapa alasan. Alasan yang utama adalah kekhawatiran bahwa akan terjadi kekacauan di kelas dan siswa tidak belajar jika mereka ditempatkan dalam grup. Selain itu, banyak orang mempunyai kesan negatif mengenai kegiatan kerjasama atau belajar dalam kelompok. Banyak siswa juga tidak senang di suruh bekerja sama dengan yang lain. Siswa yang tekun merasa harus bekerja melebihi siswa yang lain dalam grup mereka, sedangkan siswa yang kurang mampu merasa minder di ditempatkan dalam satu grup dengan siswa yang lebih pandai. Siswa yang tekun juga merasa temannya yang kurang mampu hanya menumpang saja pada hasil jerih payah mereka.

C. Membudayakan Kepemimpinan Etnopedagogi Sekolah

Guru profesional memiliki tanggung jawab untuk membangun karakter bangsa dan budaya. Sunaryo Kartadinata memberikan pengantar dalam *Model Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi* (Dasim Budimansyah, et al. 2010: vii) ada beberapa indikator untuk membangun karakter bangsa dan budaya melalui pendidikan. Pertama, pendidikan karakter tidak perlu diberikan dalam mata pelajaran yang terpisah, tapi terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Kedua, selain mengajar dalam bentuk pesan, bangsa diupayakan pembinaan pendidikan karakter melalui penciptaan kondisi (*conditioning, modeling*), pembiasaan, bahkan melalui imbalan dan hukuman. Ketiga, perlu revitalisasi, elaborasi, dan memperkuat nilai-nilai sosial yang menjadi identitas nasional sebagai pesan utama dari pendidikan karakter, atau melalui apa yang dikenal sebagai etnopedagogi. Keempat, pendidikan karakter sedang sulit dicapai jika pendidikan hanya menekankan aspek kognitif, atau hanya berorientasi pada mendapatkan nilai. Kelima, meskipun keluarga dan sekolah diakui sebagai lembaga

dan agen utama pendidikan karakter, diperlukan keterlibatan semua pihak. Partisipasi semua pihak yang diperlukan untuk mempromosikan nilai-nilai sosial yang baik serta mengurangi pandangan dan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menjadi acuan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Sekolah sebagai pusat pembudayaan, harus dipimpin oleh kepala sekolah yang kuat yang mengakomodasi nilai lokal sebagai dasar ke arah globalisasi. Pendidikan adalah transformasi budaya, yang sebagai pedoman, arah, dan kesepakatan prosedural di sekolah. Membudayakan dapat didefinisikan sebagai tempat pelestarian atau konservasi, pengayaan, perluasan, kreativitas dan transformasi dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini dapat terjadi di sekolah. Kepala sekolah membuat guru dan siswa berbudaya untuk memiliki kemampuan nyata dalam berbagai bidang kehidupan. Mereka diharapkan untuk menghadapi hidup dari yang sederhana sampai tantangan yang kompleks. Proses ini harus dikembangkan dan disesuaikan dengan keadaan setempat masing-masing.

Kepemimpinan etnopedagogi mengadopsi beberapa nilai-nilai dari teori pedagogi, kepemimpinan, dan budaya lokal. Intinya adalah memimpin sekolah dengan kombinasi nilai-nilai global dan lokal. Indonesia tergolong dalam negara berkembang yang memiliki nilai-nilai tertentu. Dipengaruhi oleh globalisasi, Indonesia harus mengadopsi inovasi dari negara-negara maju dan beradaptasi ke dalam nilai-nilai lokal. Peran pemimpin sekolah adalah untuk mengadopsi, mengadaptasi, dan mentransformasikan inovasi dan nilai-nilainya ke nilai-nilai lokal sekolah dengan harmonis. Nilai-nilai etnis lokal umumnya digunakan di setiap sekolah, serta nilai-nilai global yang tidak bertentangan. Pertumbuhan dan perkembangan budaya sangat tergantung pada pola pikir dan perilaku manusia itu sendiri dalam menerima rangsangan dari luar atau dari dalam. Setiap perubahan nilai sosial di antara orang-orang yang sekarang terjadi. Perlu upaya untuk menanamkan nilai-nilai budaya kepada masyarakat. Salah satu upaya adalah bagaimana mengembangkan guru dan siswa melalui penilaian nilai atau latar belakang sosial-budaya. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan budaya nasional yang kuat yang dapat memperkuat solidaritas dan menyatukan bangsa, sekaligus bisa menjadi kebanggaan nasional. Hal ini diyakini bahwa sekolah itu terkandung nilai-nilai sosial-budaya masyarakat (*local genius, local wisdom*), dan memiliki fungsi sosial sebagai penguat nilai-nilai dan norma yang berlaku di negara kita. Menurut William R. Bascom (1954) ada empat fungsi itu, yaitu pertama sebagai sistem proyeksi, sebagai refleksi dari sebuah pemikiran kolektif, itu membuat orang mengalihkan diri dari represi yang dikenakan terhadap mereka oleh masyarakat. Kedua, sebagai instrumen ratifikasi institusi dan lembaga kebudayaan, memvalidasi

budaya, membenarkan ritual dan lembaga untuk mereka yang melakukan dan mengamati mereka. Ketiga, sebagai alat pendidikan, alat pedagogik yang memperkuat moral dan nilai-nilai dan membangun kecerdasan. Keempat, sebagai sarana penegakan dan pengawasan untuk norma-norma masyarakat akan selalu dipatuhi kolektif, merupakan suatu cara menerapkan tekanan sosial dan melaksanakan kontrol sosial.

Sebagai institusi pendidikan, sekolah membutuhkan memimpin bagi pembudayaan. Sekolah menyediakan inovasi untuk meningkatkan kemampuan adaptasi siswa terhadap globalisasi. Mereka menerima banyak hal untuk menghadapi kehidupan modern, namun tetap menjunjung tinggi kearifan lokal. Pengetahuan lokal atau *indigenous knowledge* juga mempengaruhi pemimpin untuk menggerakkan warga sekolah. Berdasarkan definisi *indigenous knowledge*, penulis memahami pengetahuan lokal tradisional sebagai keseluruhan dari warisan intelektual dan budaya dari sekelompok masyarakat adat yang membentuk identitas mereka yang berbeda, dipertahankan dan dikembangkan melalui transmisi dari generasi ke generasi dengan cara mereka sendiri yang berbeda dan berkaitan dengan dan berkembang dalam ruang fisik yang berbeda. Definisi ini menekankan adanya sistem epistemologis tertentu pemahaman tentang dunia dan diri sendiri dalam dunia ini. Sistem ini meliputi unsur-unsur seperti: ide (konsep, persepsi, etika, estetika), artefak (sistem simbol terminologi, petroglyphs, peralatan, tari dan lagu) dan situs suci (baik yang berasal dari alam dan non-alami). (Erjen Khamaganova, 2005).

Etnopedagogi adalah praktik pendidikan berbasis pengetahuan lokal dalam berbagai aspek kehidupan. Ini akan tumbuh menjadi ethnophilosophy, ethnopsychology, etnomusicology, ethnopolitics, dan lain-lain. Etnopedagogi memandang pengetahuan atau kearifan lokal (*indigenous knowledge, local wisdom*) sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kearifan lokal adalah koleksi fakta, konsep, keyakinan, dan persepsi masyarakat terhadap lingkungan mereka. Ini termasuk cara mengamati dan mengukur lingkungan, memecahkan masalah, dan memvalidasi informasi. Singkatnya, kearifan lokal adalah proses bagaimana pengetahuan dihasilkan, disimpan, diterapkan, dikelola, dan diwariskan. (Alwasilah, 2008)

Menurut A. Chaedar Alwasilah (2008) ada beberapa karakteristik dari kearifan lokal: (1) berdasarkan pengalaman, (2) diuji setelah digunakan selama berabad-abad, (3) dapat disesuaikan dengan budaya sekarang, (4) terpadu di setiap hari praktik dan lembaga-lembaga masyarakat, (5) umumnya dilakukan oleh individu atau masyarakat secara keseluruhan, (6) adalah dinamis dan selalu berubah, dan (7) sangat terkait dengan sistem kepercayaan. Pemberdayaan melalui adaptasi pengetahuan

lokal, termasuk reinterpretasi nilai-nilai yang terkandung dalam sejumlah peribahasa, dengan kondisi kontemporer adalah strategi cerdas untuk memecahkan masalah sosial karena dalam banyak hal masalah-masalah sosial yang berasal dari isu- isu lokal juga. Pemimpin lebih mudah untuk mengarahkan anak buahnya dengan norma-norma yang umum di masyarakat dimana pertumbuhan sekolah. Kearifan lokal bisa menjadi kendaraan yang Sinergi tujuan modernisasi dengan pelestarian keunggulan lokal.

Etnopedagogi didefinisikan sebagai model pembelajaran lintas-budaya. Guru mampu mengajar di setting budaya yang setempat yang mungkin berbeda. Siswa adalah pembelajar lintas budaya. Siswa mana pun di dunia biasanya menunjukkan ada pola pikir serupa. Hal ini dapat diartikan bahwa untuk memberikan pemahaman baru harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang berlaku di lingkungan setempat. Hal baru dapat dengan mudah diterima jika mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan nilai-nilai lokal. Pendidikan juga menyediakan nilai-nilai universal yang harus ada di setiap nilai order di dunia. Sebaliknya, nilai-nilai lokal yang sangat baik juga bisa diangkat dan disosialisasikan ke dalam dunia yang lebih luas. Pendidikan melalui pendekatan etnopedagogi, melihat pengetahuan lokal sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan.

Etnopedagogi terkait erat dengan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural memuat perangkat kepercayaan yang memandang penting kearifan lokal dan keberagaman yang dimiliki komunitas etnis untuk membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, dan kelompok sosial maupun negara. Ketika etnopedagogi memandang pengetahuan atau kearifan lokal sebagai sumber inovasi dan keterampilan, dilanjutkan dengan pendidikan multikultural yang memberdayakan inovasi dan keterampilan itu agar dapat menyumbangkan masukan positif bagi kelompok sosial lain dan budaya nasional.

Kepemimpinan etnopedagogi diusulkan sebagai alternatif untuk kepemimpinan instruksional. Etnopedagogi menggunakan kearifan lokal untuk mengaktifkan pertumbuhan pembelajaran dan intelektual siswa, berbeda dengan pengajaran lain yang memperlakukan siswa sebagai objek pelaksanaan kurikulum belaka. Etnopedagogi yang sukses membutuhkan guru memahami bagaimana siswa belajar dan memiliki otonomi untuk merancang, melaksanakan dan menilai kegiatan pendidikan yang memenuhi nilai-nilai lokal. Peran pemimpin menghimpun informasi praktek guru dan refleksi, memberdayakan guru untuk melaksanakan tanggung jawab profesional dan kebijaksanaan, dan menunjukkan pengetahuan yang kredibel atas nilai-nilai lokal dalam proses belajar dan mengajar.

Mengadaptasi pemikiran Neil MacNeill dkk (2003), belajar siswa perlu ditingkatkan karena merupakan aspek penting dari kepemimpinan sekolah. Etnopedagogi kepemimpinan dapat dipandang sebagai alternatif yang berbeda gaya kepemimpinan sekolah. Dalam pandangan lain, bisa alternatif sebagai salah satu komponen kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan belajar mengajar efektif ditandai dengan atribut khusus dari staf, kepala sekolah dan pelaksana operasional sekolah. Penulis mengusulkan kepemimpinan etnopedagogi yang akan ditunjukkan oleh: Pertama, menjunjung kewajiban moral tentang harapan masyarakat sekolah. Kedua, adanya visi bersama dan misi rasa belajar siswa yang mempertimbangkan kearifan lokal. Ketiga, komitmen untuk realisasi misi oleh staf dan siswa. Keempat, penerapan pengetahuan ahli tentang pembelajaran dan perkembangan siswa. Kelima, peningkatan praktek etnopedagogi. Keenam, keterlibatan dan pemberdayaan staf. Ketujuh, kehadiran kepemimpinan yang didistribusikan ke dalam staf. Kedelapan, penekanan pada fungsi etnopedagogi daripada administratif oleh para pemimpin. Kesembilan, penciptaan dan berbagi pengetahuan di seluruh sekolah. Kesepuluh, pengembangan hubungan dan rasa memiliki dengan masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan adat. Kesebelas, penerapan pembudayaan kembali mengenai perbaikan kultur sekolah yang mempertimbangkan kearifan lokal.

Etnopedagogi yang harus menjadi peran utama dalam semua aspek tentang transfer pengetahuan antargenerasi adat tradisional melalui tradisional, bentuk sarana dan metode pendidikan. Kepemimpinan etnopedagogi ini untuk pembentukan keterampilan untuk akuisisi kearifan lokal dan sinkronisasi isu pendekatan berbasis masyarakat. Perlu pengakuan hak-hak guru dan anak-anak untuk mengetahuinya, penerapan pengetahuan tradisional sendiri, untuk menghidupkan dan melindungi serta mengembangkan budaya sendiri.

Indonesia telah menerapkan desentralisasi pemerintahan sejak tahun 1999. Ada tiga model pendidikan desentralisasi, (1) manajemen berbasis lokasi, (2) pemerintah pusat berkurang, dan (3) inovasi kurikulum. (Irianto dan Sa'ud, 2010). Menggunakan kebijakan desentralisasi pendidikan, kepala sekolah harus mengakomodasi aspek berharga lokal pada kepemimpinannya. Sekolah memiliki wewenang lebih besar untuk mengelola sendiri. Inovasi kurikulum yang dirancang untuk meningkatkan kualitas siswa dan kesetaraan. Ini disinkronkan dalam kebutuhan siswa di sekolah. Kemudian, menyebar ke daerah yang bervariasi. Etnopedagogi kepemimpinan adalah salah satu komponen paling berharga untuk memenuhi desentralisasi pendidikan di Indonesia. Seperti yang Anda tahu, Indonesia memiliki nilai-nilai tradisional yang berdasarkan adat setempat di seluruh kepulauan Indonesia.

Kepemimpinan etnopedagogi menuntut kepala sekolah untuk dapat mengembangkan sensitivitas terhadap kearifan lokal sekaligus penghormatan pada identitas budaya, toleransi antarbudaya, pengembangan sikap budaya yang responsif, peningkatan kemampuan akademik, peningkatan pengetahuan mengenai kemajemukan kebudayaan, meningkatkan kemampuan analisis dan interpretasi perilaku kultural, dan meningkatkan kesadaran kritis tentang kebudayaannya sendiri.

Kepemimpinan etnopedagogi yang didasarkan nilai-nilai tradisi Jawa telah diungkap oleh beberapa ahli. Nilai kepemimpinan pendidikan Jawa yang paling dikenal luas adalah adalah konsep kepemimpinan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yang terdiri dari 3 aspek kepemimpinan yaitu (1) *ing ngarsa sung tuladha*, (2) *ing madya mangun karsa*, dan (3) *tut wuri handayani*. Konsep kepemimpinan pendidikan ini bahkan diadopsi menjadi nilai pendidikan nasional di Indonesia.

Ing ngarsa sung tuladha menekankan peran pemimpin sebagai tokoh yang harus bisa diteladani, yang harus bisa membimbing dan memberi arah ke mana pendidikan di sekolah hendak dibawa.

Ing madya mangun karsa artinya bahwa pemimpin pendidikan harus bisa membangkitkan semangat orang-orang yang beliau pimpin. Harus dapat membangkitkan gairah untuk mewujudkan kepentingan bersama. Pemimpin pendidikan adalah juga seorang motivator.

Pemimpin pendidikan harus mampu juga bersikap *tut wuri handayani*, yaitu mampu memberikan kesempatan bagi anggotanya untuk berkembang. Pemimpin pendidikan dikatakan berhasil ketika dia mampu mengedepankan orang lain terlebih dulu. Keberhasilan kepemimpinan pendidikan terkait dengan keberhasilan dia membuat orang-orang yang dipimpinya berhasil. Secara hakiki pemimpin pendidikan adalah seseorang yang memegang kendali untuk membuat orang lain mendapatkan kendali. Kewenangan yang dimiliki pada hakekatnya adalah kewenangan untuk memungkinkan orang lain memiliki kendali atas pekerjaan dan kehidupannya.

Ahli tradisi Jawa menelaah naskah -naskah tradisional Jawa yang secara filosofis menjadi salah satu acuan bagi pemimpin di sekolah. Sri Sultan Hamengku Buwono X (2003:51-55) mengemukakan prinsip-prinsip kepemimpinan Sultan Agung seperti diungkapkan lewat Serat Sastra Gendhing, yang memuat tujuh amanah bagi pemimpin.

Pertama, *swadana maharjeng tursita*, seorang pemimpin haruslah sosok seorang intelektual, berilmu, jujur, dan pandai menjaga nama, serta mampu menjalin komunikasi atas dasar prinsip kemandirian. Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah secara tradisi merupakan guru senior yang telah mengenyam pengalaman dan pendidikan yang mumpuni, serta memiliki keunggulan dibanding guru lainnya. Secara intelektual

memiliki pemikiran yang strategis. Arah pengembangan sekolah diterapkan dengan menumbuhkan kemandirian lembaga.

Kedua, *bahni bahna amurbeng jurit*, seorang pemimpin harus selalu berada di depan dengan memberikan keteladanan dalam membela keadilan dan kebenaran. Kepala sekolah yang baik menjadi contoh yang dapat digugu dan ditiru semua guru dan siswanya. Kepala sekolah berjuang untuk memenuhi hak daripada guru dan siswanya di sekolah.

Ketiga, *rukti setya garba rukmi*, seorang pemimpin harus bertekad bulat untuk menghimpun segala daya dan potensi guna kemakmuran dan ketinggian martabat pengikutnya, masyarakat ataupun bangsa yang dipimpinya. Kepala sekolah harus dapat menerapkan kepemimpinan dalam manajemen pendidikan di sekolah. Sumber daya yang potensial harus dapat didayagunakan secara efektif dan efisien. Manajemen berbasis sekolah menjadi wahana kepala sekolah untuk dapat menghimpun sumber daya yang berada di sekitarnya, termasuk sistem pengetahuan tradisional (*indigenous knowledge system*).

Keempat, *sripandayasih krani*, seorang pemimpin harus bertekad menjaga sumber-sumber kesucian agama dan kebudayaan, agar berdaya manfaat bagi masyarakat luas. Kepala sekolah menjadi pemimpin dalam pembudayaan di lembaga pendidikan. Nilai dan norma yang berasal dari agama dan budaya setempat menjadi pencerah bagi guru dan siswa untuk selanjutnya diterapkan di masyarakat luas.

Kelima, *gaugana hasta*, seorang pemimpin juga harus bisa menciptakan seni sastra, seni suara, dan seni tari guna mengisi peradaban bangsa. Kepala sekolah dapat mendorong guru seni untuk membina kesenian bagi siswa. Pembinaan seni dapat dilakukan dalam mata pelajaran kesenian dan kerajinan tangan maupun ekstrakurikuler kesenian.

Keenam, *stiranggana cita*, disamping bisa menciptakan seni, maka seorang pemimpin harus mampu berfungsi sebagai pelestari dan pengembang budaya, pencetus sinar pencerahan ilmu, dan pembawa obor kebahagiaan umat manusia. Kepala sekolah berkewajiban untuk melestarikan budaya peninggalan leluhur sebagai kebanggaan lembaga. Sekolah sebagai lembaga kebudayaan menjalankan fungsi pelestarian budaya. Sekolah menjadi wahana transformasi nilai-nilai dalam proses pendidikan dari generasi terdahulu kepada siswa sebagai generasi muda. Nilai-nilai ini menjadi arahan bagi siswa dan masyarakat umumnya dalam menjalani hidup.

Ketujuh, *smara bhumi adi manggala*, seorang pemimpin harus memiliki tekad juang lestari untuk menjadi pelopor pemersatu dari pelbagai kepentingan yang berbeda-beda dari waktu ke waktu, serta berperan dalam perdamaian di dunia ini.

BAB XI

HUBUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT

A. Pengertian Humas Sekolah

Apa sebenarnya kebutuhan masyarakat terhadap sekolah itu? Masyarakat (lebih khusus lagi orang tua murid) mengirimkan anak-anaknya ke sekolah agar mereka dapat menjadi manusia dewasa yang bermanfaat bagi kehidupannya dan bagi masyarakat secara umum. Secara praktis sering kita dengar para orang tua menginginkan anaknya dapat berprestasi di sekolah. Ini berarti kebutuhan masyarakat terhadap sekolah adalah penyelenggaraan dan pelayanan proses belajar mengajar yang berkualitas dengan *out put* yang berkualitas pula. Dengan tuntutan yang demikian akan menjadi beban bagi sekolah, dengan segala keterbatasan yang dimilikinya (tenaga, biaya, waktu dan sebagainya).

Hubungan sekolah dengan masyarakat lebih banyak menekankan pada pemenuhan akan kebutuhan masyarakat yang terkait dengan sekolah. Di sisi lain pengertian tersebut di atas menggambarkan bahwa pelaksanaan hubungan masyarakat tidak menunggu adanya permintaan masyarakat, tetapi sekolah berusaha secara aktif (*jemput bola*), serta mengambil inisiatif untuk melakukan berbagai aktivitas agar tercipta hubungan dan kerjasama harmonis.

Apabila dicermati pengertian tersebut di atas, nampaknya lebih mengarah pada pola hubungan satu arah, yaitu kemauan sekolah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan sekolah.

Ini berarti pihak sekolah kurang mendapatkan balikan dari pihak masyarakat.

Pengertian ini memberikan dasar bagi sekolah, bahwa sekolah perlu memiliki visi dan misi serta program kerja yang jelas, agar masyarakat memahami apa yang ingin dicapai oleh sekolah dan masalah/kendala yang dihadapi sekolah dalam mencapai tujuan, melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Dengan demikian mereka dapat memikirkan tentang peranan apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat/orang tua murid dan stakeholders lainnya untuk membantu sekolah.

Pemahaman masyarakat yang mendalam, jelas dan konprehensif tentang sekolah merupakan salah satu faktor pendorong lahirnya dukungan dan bantuan mereka terhadap sekolah. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh C.L. Brownell seperti dikutip oleh Suriansyah (2001) yang menyatakan bahwa: *Knowledge of the program is essential to understanding, and understanding is basic to appreciation, appreciation is basic to support.*

Bertolak dari pendapat yang diungkapkan Brownell tersebut di atas, dapat dipahami bahwa sekolah perlu melakukan beberapa aktivitas dalam melaksanakan manajemen peran serta masyarakat agar dapat mencapai hasil yang diharapkan dan memberdayakan masyarakat dan stakeholders lainnya. Beberapa aktivitas tersebut adalah:

Selalu memberikan penjelasan secara periodik kepada masyarakat tentang program-program pendidikan di sekolah, masalah-masalah yang dihadapi dan kemajuan-kemajuan yang dapat dicapai oleh sekolah (berfungsi sebagai akuntabilitas). Agar pemahaman program oleh masyarakat menyentuh hal yang mendasar, maka harus dimulai dengan penjelasan tentang visi dan misi serta tujuan sekolah secara keseluruhan. Apa yang dimaksud dengan visi dan misi sekolah anda dapat memperdalam pada buku-buku reference lain. Kenyataan selama ini tidak semua warga sekolah menghayati atau memiliki pemahaman yang mendalam tentang visi dan misi sekolah, sehingga pada saat masyarakat ingin mengetahui secara mendalam tentang hal tersebut warga sekolah (guru, murid, staf tata usaha dan lain-lain) tidak dapat memberikan penjelasan secara rinci. Hal ini akan memberikan kesan yang kurang baik kepada masyarakat.

Apabila penjelasan-penjelasan tersebut dipahami masyarakat dan apa yang diinginkan serta program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka penghargaan mereka terhadap sekolah akan tumbuh. Tumbuhnya penghargaan inilah yang akan mendorong adanya dukungan dan bantuan mereka pada sekolah. Dengan demikian maka

program sekolah harus seiring dengan kebutuhan masyarakat. Karena memang pelanggan dan pengguna hasil lulusan sekolah adalah masyarakat. Atau dengan kata lain pelanggan sekolah itu pada hakekatnya adalah siswa dan orang tua siswa serta masyarakat. Karena itu kebutuhan dan kepuasan pelanggan merupakan hal pokok yang harus diperhatikan oleh lembaga sekolah. Sebagai contoh: Bagaimana masyarakat mau membantu sekolah apabila sekolah di tengah masyarakat religius dan fanatik, sekolah tidak pernah memprogramkan kegiatan sekolah yang bersifat religius, sehingga sekolah terisolir dari masyarakatnya. Sekolah menjadi menara gading bagi lingkungan masyarakatnya sendiri. Kondisi ini yang mendorong masyarakat untuk tidak terlibat apalagi berpartisipasi membantu sekolah.

Bertolak dari gambaran tersebut di atas, Nampak manfaat yang sangat besar bagi sekolah dan masyarakat, apabila hubungan sekolah dengan masyarakat benar-benar dapat dikelola dan direalisasikan secara utuh sesuai dengan konsepsi di atas.

Di samping manfaat seperti diuraikan di atas, pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat yang baik akan memberikan manfaat lain seperti:

1. Masyarakat/orang tua murid dan stakeholders lainnya akan mengerti dengan jelas tentang visi, misi, tujuan dan program kerja sekolah, kemajuan sekolah beserta masalah-masalah yang dihadapi sekolah secara lengkap, jelas dan akurat.
2. Masyarakat/orang tua murid dan stakeholders lainnya akan mengetahui persoalan-persoalan yang dihadapi atau mungkin dihadapi sekolah dalam mencapai tujuan yang diinginkan sekolah. Dengan demikian mereka dapat melihat secara jelas dimana mereka dapat berpartisipasi untuk membantu sekolah.
3. Sekolah akan mengenal secara mendalam latar belakang, keinginan dan harapan-harapan masyarakat terhadap sekolah. Pengenalan harapan masyarakat dan orang tua murid terhadap sekolah, khususnya sekolah merupakan unsur penting guna menumbuhkan dukungan yang kuat dari masyarakat. Apabila hal ini tercipta, maka sikap apatis, acuh tak acuh dan masa bodoh masyarakat akan hilang. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah sekolah mengenal harapan masyarakat? Atau sekarang justru sekolah memaksakan harapannya kepada masyarakat! Coba kita analisis kondisi tersebut berdasarkan pengalaman dan penglihatan selama ini dalam praktek penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah. Apabila kita belum melakukan hal tersebut, maka sudah saatnya mulai sekarang sekolah

berbenah diri untuk membangun kemitraan dengan masyarakat/ stakeholders untuk kemajuan sekolah.

Apabila kondisi dia atas tercipta, para siswa secara langsung mengetahui bahwa mereka mendapat perhatian yang besar dari kedua belah pihak, baik pihak orang tua/masyarakat maupun pihak sekolah. Hal ini tentunya merupakan kartu kendali bagi sekolah untuk bersikap, berperilaku dan bertindak di luar aturan sekolah yang ada. Kendali/control yang dilakukan bersama antara sekolah dan masyarakat secara terpadu akan memberikan ruang sempit bagi siswa, maupun warga sekolah lainnya yang akan bertindak atau berperilaku tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Dalam kenyataan yang ditemui di lembaga-sekolah sekarang ini nampaknya masih sedikit ditemukan pola-pola hubungan yang dapat mendorong terciptanya keempat hal pokok di atas. Hal ini disebabkan adanya persepsi bahwa peningkatan mutu sekolah dan peningkatan proses pembelajaran cukup dilakukan oleh pihak sekolah atau pihak pemerintah secara sepihak. Sedangkan pihak masyarakat dan orang tua murid cukup dimintakan bantuannya dalam bentuk keuangan saja, atau ada semacam persepsi seolah-olah sekolah yang bertanggung jawab dalam peningkatan mutu. Sedangkan orang tua (masyarakat) tidak perlu terlibat dalam upaya peningkatan mutu di sekolah. Keterlibatan orang tua/ masyarakat sering diinterpretasikan atau dipersepsi sebagai bentuk intervensi yang terlalu jauh memasuki kawasan otonomi sekolah. Keadaan ini juga turut berpengaruh terhadap terciptanya hubungan yang akrab antar sekolah dengan pihak masyarakat. Persepsi yang salah ini sebagai akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan dan juga pemahaman warga sekolah tentang apa dan bagaimana harusnya pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat dibangun. Di samping itu pemberdayaan masyarakat masih cenderung pada aspek pembiayaan.

B. Tujuan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

Pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat sebagai salah satu aktivitas yang mendapat kedudukan setara dengan kegiatan pengajaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan kesiswaan dan sebagainya (ingat substansi kegiatan management sekolah) juga harus direncanakan, dikelola dan dievaluasi secara baik. Tanpa perencanaan dan pengelolaan serta evaluasi yang baik, tujuan yang hakiki dari kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak akan tercapai.

Apa sebenarnya yang ingin dicapai dalam kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat?, gambaran pada pembahasan di atas sudah memperlihatkan kepada kita tentang apa yang ingin dicapai dalam kegiatan ini. Secara lebih lengkap Elsbree dan Mc Nelly seperti dikutip oleh Suriansyah (2001) menyatakan bahwa kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan untuk

1. *To improve the quality of children's learning and growing.*
2. *To rise community goals and improve the quality of community living*
3. *To develop understanding, enthusiasm and support for community program of public educations*

Dari pendapat ini terlihat bahwa yang ingin dicapai dalam kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat ini tidak hanya sekedar mendapat bantuan keuangan dari orang tua murid/masyarakat, tetapi lebih jauh dari hal tersebut yaitu pengembangan kemampuan belajar anak dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya dapat menumbuhkan dukungan mereka akan pendidikan.

Sebagai bahan perbandingan, anda dapat mempelajari tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat yang dikemukakan oleh L. Hagman sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bantuan dari orang tua murid/masyarakat, Bantuan apa? Ingat bantuan ini bukan hanya sekedar uang! Untuk melaporkan perkembangan dan kemajuan, masalah dan prestasi-prestasi yang dapat dicapai sekolah. Kapan sebenarnya laporan ini perlu dilakukan oleh pihak sekolah ?
2. Untuk memajukan program pendidikan.
3. Untuk mengembangkan kebersamaan dan kerjasama yang erat, sehingga segala permasalahan dan lain-lain dapat dilakukan secara bersama dan dalam waktu yang tepat.

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan:

1. Kualitas pembelajaran. Kualitas lulusan sekolah dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotor hanya akan dapat tercipta melalui proses pembelajar di kelas maupun di luar kelas. Proses pembelajaran yang berkualitas akan dapat dicapai apabila didukung oleh berbagai pihak termasuk orang tua murid/masyarakat.
2. Kualitas hasil belajar siswa. Kualitas belajar siswa akan tercapai apabila terjadi kebersamaan persepsi dan tindakan antara sekolah, masyarakat dan orang tua siswa. Kebersamaan ini terutama dalam memberikan arahan, bimbingan dan pengawasan pada anak/murid

dalam belajar. Karena itu peningkatan kemitraan sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat merupakan prasyarat yang tidak dapat ditinggalkan dalam konteks peningkatan mutu hasil belajar.

3. Kualitas pertumbuhan dan perkembangan peserta didik serta kualitas masyarakat (orang tua murid) itu sendiri. Kualitas masyarakat akan dapat dibangun melalui proses pendidikan dan hasil pendidikan yang handal. Lulusan yang berkualitas merupakan modal utama dalam membangun kualitas masyarakat di masa depan.

Ini berarti segala program yang dilakukan dalam kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus mengacu pada peningkatan kualitas pembelajaran, kualitas hasil belajar dan kualitas pertumbuhan/ perkembangan peserta didik. Apabila hal tersebut dapat kita lakukan, maka persepsi masyarakat tentang sekolah akan dapat dibangun secara optimal.

C. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

Apabila kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat ingin berhasil mencapai sasaran, baik dalam arti sasaran masyarakat/orang tua yang dapat diajak kerjasama maupun sasaran hasil yang diinginkan, maka beberapa prinsip-prinsip pelaksanaan di bawah ini harus menjadi pertimbangan dan perhatian. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. *Integrity.*

Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu, dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan dan disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non akademik. Hindarkan sejauh mungkin upaya menyembunyikan (*hidden activity*) kegiatan yang telah, sedang dan akan dijalankan oleh sekolah, untuk menghindari salah persepsi serta kecurigaan terhadap sekolah. Biasanya sering terjadi sekolah tidak menginformasikan atau menutupi sesuatu yang sebenarnya menjadi masalah sekolah dan perlu bantuan atau dukungan orang tua murid. Oleh sebab itu sekolah harus sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan adanya salah persepsi, salah interpretasi tentang informasi yang disajikan dengan melengkapi informasi yang akurat dan data yang lengkap, sehingga dapat diterima secara rasional oleh masyarakat. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan penilaian dan kepercayaan masyarakat/

orang tua murid terhadap sekolah, atau dengan kata lain transparansi sekolah sangat diperlukan, lebih-lebih dalam era reformasi dan abad informasi ini, masyarakat akan semakin kritis dan berani memberikan penilaian secara langsung tentang sekolah. Bahkan tidak jarang penilaian dan persepsi yang disampaikan masyarakat tentang sekolah sering tidak memiliki dasar dan data yang akurat dan valid. Persepsi yang demikian apabila tidak dihindari akan menyebabkan hal yang negatif bagi sekolah, akibatnya sekolah tidak akan mendapat dukungan bahkan mungkin sekolah hanya akan menunggu waktu kematiannya. Karena dia tidak dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakatnya sendiri.

2. Continuity.

Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat, harus dilakukan secara terus menerus. Jadi pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat jangan hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu, misalnya hanya 1 kali dalam satu tahun atau sekali dalam satu semester/caturwulan, atau hanya dilakukan oleh sekolah pada saat akan meminta bantuan keuangan kepada orang tua/masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat selalu beranggapan bahwa apabila ada panggilan sekolah untuk datang ke sekolah selalu dikaitkan dengan minta bantuan uang. Akibatnya mereka cenderung untuk tidak datang atau sekedar mewakili kepada orang lain untuk menghadiri undangan sekolah. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa undangan kepada orang tua murid dari sekolah sering diwakilkan kehadirannya kepada orang lain, sehingga kehadiran mereka hanya berkisar antara 60% - 70% bahkan tidak jarang kurang dari 30%. Apabila ini terkondisi, maka sekolah akan sulit mendapat dukungan yang kuat dari semua orang tua murid dan masyarakat. Perkembangan informasi, perkembangan kemajuan sekolah, permasalahan-permasalahan sekolah bahkan permasalahan belajar siswa selalu muncul dan tumbuh setiap saat, karena itu maka diperlukan penjelasan informasi yang terus menerus dari sekolah untuk masyarakat/orang tua murid, sehingga mereka sadar akan pentingnya keikutsertaan mereka dalam meningkatkan mutu pendidikan putra-putrinya. Oleh sebab itu maka informasi tentang sekolah yang akan disampaikan kepada masyarakat juga harus di updating setiap saat. Informasi yang sudah out update akan memberikan kesan kurang baik oleh masyarakat kepada sekolah.

3. Simplicity

Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun

komunikasi kelompok pihak pemberi informasi (sekolah) dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun melalui media hendaknya disajikan dalam bentuk sederhana sesuai dengan kondisi dan karakteristik pendengar (masyarakat setempat). Prinsip kesederhanaan ini juga mengandung makna bahwa:

- Informasi yang disajikan dinyatakan dengan kata-kata yang penuh persahabatan dan mudah dimengerti. Banyak masyarakat yang tidak memahami istilah-istilah yang sangat ilmiah, oleh sebab itu penggunaan istilah sedapat mungkin disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat yang menjadi audience.
- Penggunaan kata-kata yang jelas, disukai oleh masyarakat atau akrab bagi pendengar.
- Informasi yang disajikan menggunakan pendekatan budaya setempat.

4. Coverage

Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, factor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat, misalnya program ekstra kurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching dan lain-lain kegiatan. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya lengkap, akurat dan *up to date*. Lengkap artinya tidak satu informasi pun yang harus ditutupi atau disimpan, padahal masyarakat/orang tua murid mempunyai hak untuk mengetahui keberadaan dan kemajuan (*progress*) sekolah dimana anaknya belajar. Oleh sebab itu informasi kemajuan sekolah, kegagalan/masalah yang dihadapi sekolah serta prestasi yang dapat dicapai sekolah harus diinformasikan kepada masyarakat. Akurat artinya informasi yang diberikan memang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam kaitannya ini juga berarti bahwa informasi yang diberikan jangan dibuat-buat atau informasi yang obyektif. Sedangkan *up to date* berarti informasi yang diberikan adalah informasi perkembangan, kemajuan, masalah dan prestasi sekolah terakhir. Dengan demikian masyarakat dapat memberikan penilaian sejauh mana sekolah dapat mencapai misi dan visi yang disusunnya.

5. Constructiveness

Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan memberikan respon hal-hal positif tentang sekolah serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah (*problem dan constrain*) yang dihadapi

sekolah. Apabila hal tersebut dapat mereka mengerti, akan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong mereka untuk memberikan bantuan kepada sekolah sesuai dengan permasalahan sekolah yang perlu mendapat perhatian dan pemecahan bersama. Hal ini menuntut sekolah untuk membuat daftar masalah (*list of problems*) yang perlu dikomunikasikan secara terus menerus kepada sasaran masyarakat tertentu.

Prinsip ini juga berarti dalam penyajian informasi hendaknya obyektif tanpa emosi dan rekayasa tertentu, termasuk dalam hal ini memberitahukan kelemahan-kelemahan sekolah dalam memacu peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Prinsip ini juga berarti bahwa informasi yang disajikan kepada khalayak sasaran harus dapat membangun kemauan dan merangsang untuk berpikir bagi penerima informasi.

Penjelasan yang konstruktif akan menarik bagi masyarakat dan akan diterima oleh masyarakat tanpa prasangka tertentu, hal ini akan mengarahkan mereka untuk berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan sekolah. Untuk itu informasi yang ramah, obyektif berdasarkan data-data yang ada pada sekolah.

6. Adaptability

Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya (*culture*) dan bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan pelaksanaan kegiatan hubungan dengan masyarakat pun harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Misalnya saja masyarakat daerah pertanian yang setiap pagi bekerja di sawah, tidak mungkin sekolah mengadakan kunjungan (*home visit*) pada pagi hari.

Pengertian-pengertian yang benar dan valid tentang opini serta faktor-faktor yang mendukung akan dapat menumbuhkan kemauan bagi masyarakat untuk berpartisipasi ke dalam pemecahan persoalan-persoalan yang dihadapi sekolah.

D. Sekolah sebagai Organisasi

Beberapa faktor telah melatar belakangi terbentuknya lembaga-lembaga tertentu untuk mengelola alokasi pemenuhan kebutuhan di antaranya, (1) pertumbuhan jumlah populasi manusia yang mempengaruhi tingkat penguasaan dan ketersediaan sumber daya alam,

(2) kompleksnya pranata kebudayaan dan mekanisme pengetahuan beserta teknologi terapan, dan (3) implikasi tingkat akal budi dan mentalitas manusia yang kian rasional. Secara singkat, terbentuknya lembaga pendidikan merupakan konsekuensi logis dari taraf perkembangan masyarakat yang sudah kompleks. Sehingga untuk mengorganisasikan perangkat pengetahuan dan keterampilan tidak memungkinkan ditangani secara langsung oleh masing-masing keluarga. Perlunya pihak lain yang secara khusus mengurus organisasi dan apresiasi pengetahuan serta mengupayakan untuk ditransformasikan kepada para generasi muda agar terjamin kelestariaannya merupakan cetak biru kekuatan yang melatarbelakangi berdirinya sekolah sebagai lembaga pendidikan.

Walaupun wujudnya berbeda-beda dalam tiap-tiap negara, keberadaan sekolah merupakan salah satu indikasi terwujudnya masyarakat modern. Dalam hal ini para sosiolog telah melakukan ikhtiar ilmiah untuk menentukan taraf evolusi perkembangan masyarakat manusia. Dimulai dari Auguste Comte (1798 -1857) dengan karyanya yang berjudul *Course de philosophie Positive* (1844). Beliau menekankan hukum perkembangan masyarakat yang terdiri dari tiga jenjang, yaitu jenjang teologi di mana manusia mencoba menjelaskan gejala di sekitarnya dengan mengacu pada hal yang bersifat adikodrati. Taraf perkembangan selanjutnya disusul pencapaian manifestasi kemampuan manusia untuk menangkap fenomena lingkungan dengan menyandarkan pada kekuatan-kekuatan metafisik atau abstrak. Hingga pada level tertinggi, taraf positif. Iklim kehidupan demikian ditandai dengan prestasi kemampuan manusia untuk menjelaskan gejala alam maupun sosial berdasar pada deskripsi ilmiah melalui pemahaman kekuasaan hukum objektif (Sunarto, 2000 : 3).

Dari pengertian tersebut perwujudan manusia positivis hanya mampu ditopang oleh orientasi pendidikan yang sudah terlembaga secara mantap melalui aplikasi fungsi sekolah-sekolah modern. Di lain pihak, tak kalah pentingnya buah pikiran Emile Durkheim (1858-1912) berupa buku yang berjudul *The Division of Labour in Society* (1968) juga menganalisis kecenderungan masyarakat maju yang di dalamnya terdapat pembagian kerja dalam pemetaan bidang-bidang ekonomi, hukum, politik pendidikan, kesenian dan bahkan keluarga. Gejala tersebut merupakan dampak dari penerapan sistem ekonomi industri yang di dalamnya memerlukan memerlukan spesialisasi peran untuk mengusung keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup para anggotanya (Johson, 1986 : 181-184).

Sekali lagi ilustrasi di atas hanya dapat tercermin pada konteks organisasi lembaga pendidikan yang telah mampu memproduksi manusia profesional dengan spesifikasi keahlian. Sedangkan untuk mewujudkan figur-figur manusia itu hanya mampu dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan modern.

Dari kedua pernyataan ilmiah para tokoh sosiologi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan sekolah yang mewarnai dunia kehidupan manusia saat ini merupakan sebuah keniscayaan peradaban modern yang lekat dengan relik-relik pergulatan ilmu pengetahuan dan aplikasi teknologi mutakhir. Sementara melihat konteks sosial yang terbentuk dapat dijawab pula sekolah juga masuk dalam kategori-kategori organisasi pada umumnya yang mengemban konsekuensi - konsekuensi organisatoris. Oleh karena itu keberadaan sekolah patut dimasukkan sebagai salah satu organisasi yang memanfaatkan mekanisme birokratis dalam mengelola kerja-kerja institusinya.

Beberapa prinsip penerapan birokrasi juga terdapat dalam lembaga sekolah antara lain:

1. Aturan dan prosedur yang ketat melalui birokrasi
2. Memiliki hierarki jabatan dengan struktur pimpinan yang mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda
3. Pelaksanaan administrasi secara profesional
4. Mekanisme perekrutan staf dan pembinaan secara bertanggung jawab
5. Struktur karier yang dapat diidentifikasi, dan
6. Pengembangan hubungan yang bersifat formal dan impersonal (Robinson, 1981: 241).

Sekolah memang tidak menggunakan semua ketentuan-ketentuan di atas secara ketat dan linear. Kaitan dengan hal tersebut, Bidwell, 1965 (dalam Robinson, 1981). berpendapat bahwa sekolah mempunyai ciri "struktur yang longgar". Yang dimaksud dengan kelonggaran struktural oleh Bidwell adalah prasyarat prasyarat mutlak dari kekuatan-kekuatan struktural tidak harus dilaksanakan sepenuhnya oleh guru dalam menerapkan metode belajar-mengajar kepada para siswanya. Tiap guru mempunyai kebebasan tertentu untuk menentukan bagaimana ia mengajar di kelas, walaupun perangkat-perangkat materinya telah ditentukan oleh kurikulum di atasnya. Masih dalam lingkup sekolah sebagai organisasi formal, beberapa ahli telah menyajikan pranata-pranata manajemen yang berbeda-beda dalam menerapkan fungsi manajemen di sekolah (Robinson, 1981). Di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Manajemen Ilmiah

Pokok-pokok dari manajemen ilmiah antara lain:

- Menggunakan alat ukur dan perbandingan yang jelas dan tepat,
- Menganalisis dan membandingkan proses-proses yang telah dicapai, dan
- Menerima hipotesis terkuat yang lulus dari verifikasi serta menggunakannya sebagai kriteria tunggal Implikasinya jelas, penerapan kriteria tunggal bagi sekolah demi mencapai maksimalisasi hasil-hasil belajar secara efisien dan efektif. Tampak jelas jenis manajemen ini berkarakter mekanistik, ketat, mengutamakan hasil kuantitatif, serta cenderung mengesampingkan unsur-unsur manusiawi di dalam prosesnya.

2. Sistem Sosio-teknis

Sebagai sistem sosio-teknis, sekolah mencakup banyak hal yang menjadi input organisasi, namun stafnya akan “mengetahui” sifat input-inputnya. Dengan begitu sekolah dapat menentukan instrumen-instrumen pengolahan demi menjamin hasil yang optimal. Sampai di sini definisi sosio-teknis memberikan titik tekan pada pengamatan dan pengelompokan jenis-jenis masukan dalam sekolah lalu ditindaklanjuti dengan cara-cara yang relevan dengan “bahan mentah” tersebut. Manajemen sosio-teknis masih menggunakan prinsip manajemen formal, sehingga beberapa unsur yang melekat pada prinsip manajemen ilmiah juga dimiliki oleh sistem sosio-teknis.

3. Pendekatan Sistemik

Model pengelolaan yang paling banyak digunakan adalah bentuk teori sistem. Ciri khas pendekatan ini adalah pengakuan adanya bagian-bagian suatu sistem yang terkait erat pada keseluruhan. Hubungan timbal balik itu mengisyaratkan detail bagian yang cukup kompleks dan proses interaksi secara keseluruhan dalam sebuah organisasi. Implikasi lain, batas-batas antarbagian harus diketahui dengan tegas dalam mengidentifikasi komponen-komponen lembaga sekolah. Secara internal model teori sistem, mengadopsi penanganan lembaga formal pada umumnya untuk menggerakkan roda organisasi. Akan tetapi pendekatan ini juga memperhatikan sistem sosial yang bekerja di luar sekolah. Tiap sekolah berusaha pula menampung tuntutan-tuntutan dari para orang tua siswa, industri setempat, pendapat profesional dan kebijaksanaan pendidikan.

4. Pendekatan Individual

Baik pendekatan manajemen maupun pendekatan sistem cenderung “membendakan” organisasi. Organisasi dipandang seakan-akan seperti makhluk besar yang mengatasi dan mengecilkan peran anggota-

anggotanya (terutama para murid). Sebagai antitesisnya, maka pendekatan individual mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan dalam organisasi. Akan tetapi pada perkembangannya pendekatan individual memiliki dua keompok pandangan yakni:

a. Teori Pasif

Pandangan yang menekankan pengamatan input pendidikan secara kolektif. Di mana sudut terpenting yang harus diperhatikan oleh sekolah adalah proses kematangan pribadi para siswa yang harus difasilitasi, diakomodasi kebutuhannya dan dibimbing menuju kedewasaan. Oleh karena itu, proporsi organisasi sekolah yang cenderung mekanistik harus dipola menjadi fleksibel agar para anggotanya bisa bereksresi dengan optimal (Robinson, 1981: 252).

b. Teori Aktif

Konstruksi pendekatan yang mengutamakan kemampuan aktif para siswa untuk menginterpretasikan makna-makna normatif dan tindakan-tindakan yang diharapkan berdasarkan iklim kesadaran mereka. Menurut Silverman (1970) proses sosialisasi di sekolah bukanlah imperatif-imperatif moral yang memaksa akan tetapi justru sekolah menjadi "pembantu" para siswa dalam mendokumentasi dan memantapkan makna -makna kehidupan yang didapat oleh mereka sendiri. Pendekatan ini sangat kental dengan pengaruh aliran fenomenologis dalam sosiologi. Oleh karena itu teori aktif bermaksud menekankan makna -makna tafsiran budaya yang didapat oleh individu-individu di dalam mempersepsikan fungsi sekolah bagi mereka (Robinson, 1981 : 254).

Berbagai pandangan di atas telah menandakan aspek -aspek penting yang berperan dan berinteraksi di dalam sekolah. Pada kenyataannya seluruh konsep manajemen yang ditekankan oleh masing-masing ahli tersebut selalu tercantum di dalam sekolah. Tentunya fungsionalisasi masing-masing model manajemen di atas tergantung pada konteks pandangan manusia yang mengamatinya. Apabila pada aspek makro maka dominasi gabungan fungsi manajemen sistem, sosio-teknis dan ilmiah lebih berperan penting dalam membantu kerja penglihatan intelektual kita. Berbeda pada dimensi yang lebih mikro, maka tipe ideal pendekatan individual adalah aspek yang harus diperhatikan dalam menelaah unsur-unsur yang bermain di dalam sekolah.

Dalam hal ini kita akan lebih condong mengamati organisasi sekolah dalam skala makronya. Analisis sosial yang muncul seputar sekolah banyak mengupas konflik-konflik antar peranan yang terjadi di lembaga sekolah. Seperti yang diungkapkan oleh Davies, 1973 (dalam Robinson,

1981 : 250) bahwa lembaga pendidikan sering dirasuki oleh nilai-nilai yang terkadang bertentangan antarpihak baik dari para guru, orang tua, staf birokrat, siswa, maupun pihak aparat pimpinan sekolah.

Dari sini analisis yang bisa disajikan untuk mengamati keberadaan sekolah sebagai lembaga formal dalam aktivitas pendidikannya terbagi menjadi dua lahan persoalan yakni:

1. *Penafsiran multi-konsep tentang tujuan organisasi beserta alokasi peran yang sinergis*

Sudah menjadi konsekuensi bagi setiap organisasi untuk menetapkan tujuan lembaga. Berbeda dengan organisasi pada umumnya, sekolah memiliki ciri khas yang agak unik, khususnya dari objek yang menjadi tujuannya. Dengan menetapkan posisi peran kelembagaan yang bertugas untuk membekali peserta didik seperangkat pengetahuan dan keterampilan maka sekolah telah mengumandangkan jenis tujuan yang bersifat abstrak. Hal ini tentu saja berbeda dengan lembaga lain yang jelas-jelas memiliki objek tujuan konkrit. Contohnya lembaga perusahaan, tentunya bagi siapa saja akan jelas memahami arti "mencari keuntungan maksimal" bagi perusahaan. Baik itu manajer pemasaran, direktur pabrik, buruh angkutan, sopir, sampai tenaga administrasi akan jelas mengartikan definisi tujuan tersebut. Sementara sekolah memiliki tujuan yang bersifat multi-penafsiran dan agak kabur. Selain itu, dimensi abstrak yang menjadi titik tolak penafsiran para praktisi sekolah dapat memunculkan hambatan besar untuk menyatukan pemahaman makna tujuan pendidikan antar posisi.

Berdasarkan struktur organisasi yang terbentuk, guru bertugas sebagai pelaksana pengajaran kepada siswa, supervisor berfungsi membina para guru dan tugas formal administratur sekolah ialah untuk mengkoordinasikan dan memadukan berbagai ragam aktivitas dalam lingkungan sekolah. Masing-masing pemegang posisi mempunyai hak dan kewajiban tertentu dalam hubungan dengan posisi lain. Sudah tentu kompleksitas peranan menimbulkan nilai sosial yang berbeda-beda dan apabila ditarik dalam suatu prospek tujuan maka akan melibatkan bermacam-macam penafsiran. Selain objek tujuan yang sarat nilai, posisi-posisi peran yang cukup kompleks di lingkup internal, maka sebuah sekolah akan berhadapan langsung dengan komponen nilai - nilai lain di luar lingkungannya. Spesifikasi tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah ternyata harus bersinggungan erat dengan alokasi peran pendidikan di luar sekolah, terutama keluarga.

Berkaitan dengan hal tersebut, suatu observasi ilmiah yang dilakukan oleh Universitas Havard telah menunjukkan hasil yang cukup dramatis. Setelah diteliti, para guru di sekolah-sekolah New England memiliki

pandangan yang berbeda tentang tujuan pendidikan, begitu juga antar guru dengan kepala sekolahnya, selain itu indikasi serupa ditunjukkan perbedaan nilai antar administratur dengan Badan Pertimbangan Sekolah. Lebih jauh bukti penelitian juga menunjukkan sumber utama yang melahirkan konflik di kalangan praktisi sosial tentang tujuan dan program-program sekolah (Faisal, 1985: 69).

Dipandang dari sudut tujuannya ternyata lembaga sekolah harus melakukan bermacam-macam proses penyatuan pandangan baik dari wilayah internal maupun asumsi-asumsi publik di lingkup eksternal. Telaah sosiologis telah memberikan sumbangan konseptual untuk membedah objek tujuan sekolah dalam pola-pola hubungannya dengan pihak internal maupun luar lembaga sekolah.

2. Kompleks permasalahan di sekitar orientasi lintas posisi dalam koridor efisiensi dan efektivitas

Kompleks pertentangan tersebut merupakan derivasi dari perangkat-perangkat manusia yang memiliki peran-peran spesifik di lembaga sekolah. Banyak buku teks yang mengemukakan tentang peranan guru dan administratur pendidikan seolah-olah harmonis dan serba sinergis. Padahal kenyataan membuktikan, salah satu faktor yang memberatkan kerja organisasi adalah gejala kesalahpahaman untuk memahami kawan sekerja berkenaan dengan hak dan kewajiban yang berbeda sesuai dengan status pekerjaannya. Kecenderungan yang terjadi, hampir semua tanggung jawab dan tugas sekolah yang berhubungan dengan siswa selalu dilimpahkan kepada seorang guru. Sedangkan pemberitaan fungsifungsi peran yang berbeda baik dari aspek bimbingan konseling, pelayanan birokrasi dan keuangan, serta peran penegak ketertiban dan kedisiplinan tidak pernah tersiar secara utuh kepada para siswa.

Dalam analisis sosiologis, konflik peranan di lingkup internal sekolah disebabkan pada rangkaian hak dan kewajiban yang mempengaruhi harapan para pemegang status pekerjaan. Ruangruang kesadaran peran tersebut telah terpecah belah pada akumulasi integrasi yang terkotak-kotak pada masing-masing kelompok pekerjaan. Dalam waktu yang sama kepala sekolah mengharapkan para guru selalu tertib dalam melaksanakan pengajaran. Sementara guru sendiri selalu berkeinginan memberikan ragam materi yang selengkap-lengkapnyanya kepada para siswa. Hal ini tentu bertentangan dengan asumsi umum para siswa yang jelas-jelas berharap agar para guru tidak terlalu banyak menyodorkan materi yang harus mereka hafalkan. Hal tersebut tentunya semakin menjauhkan kesadaran warga sekolah mengenai hakikat mendasar dari fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan. Mereka semakin jauh terjerumus pada labirin-labirin pertentangan seputar ritual-

ritual teknis pemenuhan kebutuhan organisasional. Dari sini tujuan awal penerapan administrasi pendidikan untuk mempermudah lembaga sekolah dalam menjalankan fungsi-fungsi edukatif beralih menjadi raksasa permasalahan yang selalu menggelayuti mentalitasarganya. Tentu saja dalam hal ini sumbangsih teori sosiologi cukup strategis guna memberikan gambaran komperhensif tentang gurita konflik yang terbentuk di lingkungan sekolah dalam kaitan pertentangan antarperan. Dengan begitu, para praktisi pendidikan diharapkan memiliki bahan mentah yang lengkap mengenai polapola sosial yang tersusun di dunia pendidikan formal beserta varian-varian permasalahannya.

BAB XII

DIMENSI SIKAP DAN PRILAKU BELAJAR ORANG DEWASA

A. Mengukur Kedewasaan

SEJAK awal tahun delapan puluhan telah dikembangkan pada pendekatan kontinum (*continuum learning approach*) atau pendekatan yang berdaur serta berkelanjutan dalam proses pembelajaran (M. Knowles, 1980; Cross, 1982). Pendekatan ini dapat dimulai dari pedagogi dilanjutkan ke andragogi; atau sebaliknya, yaitu berawal dari model andragogi dilanjutkan ke pedagogi, dan seterusnya.

Pada pendekatan kontinum didasarkan atas asumsi bahwa semakin dewasa peserta didik maka:

- a. Konsep diri peserta didik semakin berubah dari ketergantungan kepada pendidik menuju pada sikap dan pada perilaku mengarahkan diri dan saling belajar.
- b. Semakin ia berakumulasi pengalaman belajarnya yang dapat dijadikan sumber belajar (*learning resources*) dan orientasi belajar mereka berubah dari penguasaan terhadap materi pada kemampuan pemecahan masalah.
- c. Kesiapan belajar adalah untuk dapat menguasai kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan nyata.
- d. Semakin ia membutuhkan keterlibatan dirinya dalam perencanaan, juga proses pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.

Peserta didik dalam pendekatan andragogi pada umumnya adalah orang dewasa. Orang dewasa tidak hanya dapat dilihat dari segi biologis, tetapi juga dari segi sosial, psikologis, dan fungsional. Secara biologis seseorang

disebut dewasa apabila telah mampu melakukan reproduksi, dan secara fisik telah lepas dari ciri anak-anak dan remaja. Secara sosial seseorang telah dianggap dewasa apabila telah mampu melakukan peran-peran sosial yang biasa dilaksanakan oleh orang dewasa.

Secara psikologis, orang dewasa juga dipandang telah memiliki rasa tanggung jawab (*responsibility*) terhadap setiap hal keputusan yang telah diambil dan terhadap masa depan kehidupannya.

Secara fungsional orang dikatakan dewasa, apabila ia dapat melaksanakan fungsi kehidupannya dalam keluarga, lingkungan kerja, hidup dan masyarakat.

Darkenwald dan Merriam, dalam Dj. Sudjana (2000), berpendapat bahwa seseorang disebut dewasa, apabila ia telah melewati masa pendidikan dasar (di Indonesia dikenal dengan pendidikan dasar 9 tahun) dan telah termasuk usia kerja, yaitu sejak berumur 15 tahun.

Orang dewasa adalah orang yang telah memiliki kematangan fungsi biologis, sosial, dan psikologis mempertimbangkan, bertanggungjawab, dan berperan dalam kehidupannya. Dapat juga ditambahkan bahwa kedewasaan seseorang akan bergantung pula pada konteks sosial budaya dalam lingkungan kehidupan.

Orang dewasa mempunyai peran dalam pengembangan masyarakat, baik sebagai pemimpin organisasi dan/atau tokoh masyarakat, maupun sebagai partisipan dalam pembangunan masyarakat dan bangsa. Di Perguruan Tinggi, mahasiswa pun juga termasuk pada kategori orang-orang dewasa.

Dalam hal menggunakan pembelajaran berbasis andragogi perlu diperhatikan strategi pembelajaran orang dewasa.

Strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Orang dewasa memiliki konsep diri. Orang dewasa memiliki persepsi bahwa dirinya mampu membuat suatu keputusan, dapat menghadapi resiko sebagai akibat keputusan yang ia atau mereka ambil, dan mengatur kehidupannya secara mandiri. Harga diri amat penting bagi orang dewasa, dan sangat kurang memerlukan pengakuan orang lain terhadap harga dirinya. Perilaku yang terkesan untuk menggurui, memerintah, merendahkan cenderung akan ditanggapi negatif oleh orang dewasa. Implikasi praktis dalam pembelajaran ialah apabila orang dewasa dihargai dan difasilitasi oleh pendidik maka mereka melibatkan diri optimal dalam pembelajaran. Kegiatan belajarnya akan berkembang ke arah belajar antisipatif (berorientasi ke masa depan) dan belajar secara partisipatif (bersama orang lain) dengan berpikir dan berbuat di dalam dan terhadap kehidupannya.

2. Orang dewasa memiliki akumulasi akan pengalaman. Setiap orang dewasa mempunyai pengalaman situasi dan interaksi, serta pengalaman diri yang berbeda antara seorang dengan yang lainnya sesuai dengan perbedaan latar belakang kehidupan dan lingkungannya. Pengalaman situasi merupakan sederet suasana yang dialami orang dewasa pada masa lalu yang dapat digunakan untuk merespons situasi saat ini. Pengalaman dalam interaksi menyebabkan pertambahan kemahiran orang dewasa dalam hal memadukan kesadaran untuk melihat dirinya dari segi pandangan orang lain. Pengalaman diri adalah kecakapan orang dewasa pada masa kini sebagai akibat pengalaman dalam berbagai situasi masa lalu. Implikasi praktis dalam pembelajaran, orang dewasa akan mampu berurusan dengan (dialog) berdasarkan pengalaman yang telah dimilikinya. Pengalaman mereka dapat dijadikan sumber belajar yang kaya untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran. Orang dewasa yang mempelajari sesuatu yang baru cenderung dimaknai optimal dengan menggunakan pengalaman lama. Sejalan dengan itu orang dewasa sebagai peserta didik (siswa) perlu dilibatkan sebagai sumber pembelajaran. Pengenalan dan penerapan konsep-konsep baru akan lebih mudah apabila berangkat dari pengalaman yang dimiliki orang dewasa.
3. Orang dewasa memiliki kesiapan belajar. Kesiapan belajar orang dewasa akan seiring dengan peran yang ia tampilkan baik dalam masyarakat maupun dalam tugas/pekerjaan sehari-hari. Implikasinya, akan urutan program pembelajaran perlu disusun berdasarkan urutan tugas yang diperankan orang dewasa, bukan berdasarkan urutan logis mata pelajaran. Penyesuaian materi atau muatan dan setiap kegiatan belajar perlu direlevansikan dengan setiap kebutuhan belajar dan tugas/pekerjaan peserta didik orang dewasa serta dalam lingkungan bermasyarakat.
4. Orang dewasa menginginkan dapat segera memanfaatkan hasil belajarnya. Orang dewasa berpartisipasi dalam pembelajaran karena ia sedang merespons materi dan proses pembelajaran yang berhubungan dengan peran dalam kehidupannya. Kegiatan akan belajarnya senantiasa berorientasi pada realitas (kenyataan). Oleh karena itu pembelajaran perlu mengarah pada peningkatan kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Implikasi praktisnya, pembelajaran perlu berorientasi pada pemecahan masalah yang relevan dengan peranan orang dewasa dalam kehidupannya. Pengalaman belajar hendaklah dirancang berdasarkan kebutuhan dan masalah yang sedang dihadapi orang dewasa, seperti kebutuhan dan masalah dalam pekerjaan, peranan

sosial budaya, dan ekonomi. Belajar yang sangat berorientasi juga pada penguasaan keterampilan (*skills*) menjadi motivasi kuat dalam pembelajaran orang dewasa.

5. Orang dewasa memiliki skill/kemampuan belajar. Kemampuan dasar untuk belajar tetap dimiliki oleh setiap orang. khususnya orang dewasa. sepanjang hayatnya. Penurunan akan kemampuan belajar pada usia tua bukan terletak pada intensitas dan kapasitas intelektualnya, melainkan pada kecepatan belajarnya. Implikasi praktisnya ialah bahwa pendidik perlu mendorong orang dewasa sebagai peserta didik untuk belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan cara belajar yang ia inginkan. Tujuan, materi, dan proses pembelajaran dipilih dan ditetapkan oleh dan bersama orang dewasa juga sebagai peserta didik.
6. Orang dewasa dapat belajar efektif apabila melibatkan aktivitas mental dan fisik. Orang dewasa dapat menentukan apa yang akan ia pelajari, di mana dan bagaimana strategi atau cara mempelajarinya, serta kapan melakukan kegiatan belajar. Orang dewasa melakukan kegiatan belajar dengan cara melibatkan pikiran, perasaan, dan perbuatannya. Implikasi praktisnya, orang dewasa akan belajar secara efektif dengan melibatkan fungsi otak kiri dan otak kanan, menggunakan kemampuan intelek dan emosi, dengan memanfaatkan pada berbagai media, metode, teknik dan pengalaman belajar.

Tabel 1
Dimensi Sikap dan Perilaku Dewasa

Perubahan dari sikap dan perilaku yang:	Menuju ke arah sikap dan perilaku yang:
Tergantungan	Mandiri
Subjektif	Objektif
Pasif	Aktif
Menerima informasi	Memberikan informasi
Kecakapan terbatas	Kecakapan luas/tinggi
Tanggungjawab terbatas	Tanggungjawab lebih luas
Memiliki minat terbatas	Memiliki minat beragam
Mementingkan diri sendiri	Memperhatikan orang lain
Menolak kenyataan diri	Menerima kenyataan diri
Tidak memiliki integritas diri	Memiliki integritas diri
Berpikir teknis	Berpikir prinsip
Pandangan mendatar	Pandangan mendalam
Meniru	Berinovasi
Sikap dan perilaku seragam	Tenggang rasa terhadap perbedaan
Perasaan dan fisik Mandiri	Emosi dan pikiran

B. Dimensi Sikap dan Perilaku Dewasa

Manusia menuju dewasa memerlukan suatu prakondisi, yaitu proses belajar yang dapat mengembangkan dimensi sikap dan perilaku mendewasa (*maturing person*). Dimensi mendewasa yang dikemukakan oleh Overstreet yang kemudian dikembangkan oleh Knowles (1977) dapat dilihat dalam tabel berikut.

Deskripsi umum mengenai perubahan dimensi tersebut di atas dapat diikuti dalam uraian berikut.

1. Perubahan ke arah mandiri

Perubahan sikap dan perilaku di atas, yaitu dari menggantungkan diri kepada orang lain ke arah mandiri, merupakan indikator manusia terdidik (*educated person*). Orang yang hidupnya hanya menggantungkan diri kepada orang lain disebut tidak terdidik (*uneducated person*) dan belum dewasa. Paulo Freire (1972) mengemukakan dengan jelas bahwa munculnya orang yang tidak terdidik sering disebabkan oleh proses pendidikan formal yang didominasi oleh guru dan kondisi lingkungan sosial-budaya yang tidak kondusif.

Dalam pendidikan formal, khususnya, ada jenjang sekolah dasar, terutama di pedesaan, sering tumbuh sikap peserta didik yang menggantungkan dirinya kepada guru. Sikap dan perilaku guru yang otoriter, menganggap dirinya serba lebih baik dan model yang harus ditiru oleh peserta didik. Pada gilirannya, sikap tersebut akan terbawa oleh murid dan lulusan sekolah ke dalam kehidupan pada masa dewasa.

Di samping itu, dalam kehidupan sosial budaya, sikap dan penampilan pemuka masyarakat, orang tua, dan para pemimpin formal sering menyebabkan sikap dan perilaku warga masyarakat untuk menggantungkan diri kepada orang-orang yang memiliki status sosial-ekonomi lebih tinggi.

Sikap dan perilaku orang mendewasa berupaya untuk mandiri, tidak menggantungkan dirinya kepada orang lain, melainkan juga mengembangkan saling ketergantungan sehingga muncul silih asah, silih asih, dan silih asuh antara satu dengan yang lainnya.

Model pendidikan formal, nonformal, dan informal dapat berperan untuk membantu peserta didik untuk menyadari potensi dirinya dan mampu berdialog atau diskusi dengan lingkungannya. Pelaksanaan pembelajaran diarahkan untuk memotivasi peserta didik dalam upaya mengaktualisasikan dirinya dengan berpikir dan berbuat secara positif di dalam dan terhadap dunia kehidupannya.

2. Perubahan ke arah sikap dan perilaku aktif

Bagi orang yang belum mendewasa cenderung bersikap pasif dan menerima dirinya sebagaimana adanya. Ia tidak menyadari potensi dirinya sehingga ia tidak mampu merespons dengan tepat kebutuhan dan masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Ia bersikap pasif, menyerah kepada nasib, masa bodoh (*apatis*), dan berbudaya diam, seolah-olah terasing dari lingkungannya, dan tidak berupaya secara optimal dalam kehidupannya.

Orang yang mendewasa bersikap aktif dan berupaya meningkatkan kemampuannya, orientasi dirinya meningkat dari kuantitas ke kualitas. Menyukai pergaulan, membiasakan diri bekerjasama, berpartisipasi, dan berprestasi. Ia lebih membiasakan diri untuk memberi kepada orang lain, Orang yang bersikap dan berperilaku aktif cenderung akan berorientasi terhadap kehidupan yang lebih baik di masa depan. Secara singkat, juga dapat dikemukakan bahwa orang mendewasa ditandai dengan perkembangan yang dinamis dari sikap dan perilaku pasif ke arah sikap dan perilaku aktif dalam meningkatkan kualitas diri dan lingkungannya.

3. Perubahan ke arah sikap objektif

Orang yang belum dewasa bersikap subjektif dan sering membawa pengalaman masa kanak-kanak yang memandang dan mengharapkan lingkungan sekitar selalu memperhatikan kepentingannya. Lingkungan sosial, lingkungan alam, dan/atau lingkungan buatan seolah-olah disediakan untuk memenuhi kepentingannya. Ia memandang dirinya sebagai titik pusat pada kehidupan, lingkungan sekitar dianggap sebagai bagian dari dirinya dan harus selalu melayani kebutuhan dirinya.

Orang yang dewasa bersikap objektif, mampu melihat kenyataan diri dan memandang dirinya sebagai bagian dari lingkungan yang lebih luas. Dirinya sebagai unsur yang dapat dan harus berpikir dan berbuat secara arif dalam dan terhadap lingkungannya. Ia berupaya mengembangkan diri dalam tatanan lingkungan yang meminta kepedulian dari dirinya. Singkatnya, orang yang bersikap objektif selalu berusaha untuk terus mengaktualisasikan potensi diri dan memanfaatkan potensi itu untuk kemajuan diri dan lingkungannya.

4. Perubahan ke arah sikap dan perilaku memberi informasi

Orang yang belum dewasa hanya menerima informasi dan memiliki kemampuan terbatas. Ia hanya mampu menyerap informasi (gagasan, pendapat, fakta) dari pihak lain, tanpa memberikan kritik, alasan, atau tanggapan terlebih dahulu.

Akibatnya adalah terbatasnya akan tingkat kemampuan untuk memilih sekaligus menyerap informasi-informasi dari pihak lain.

Sedangkan orang yang dewasa mampu memberikan informasi, terampil dalam memperluas informasi yang telah ia terima, dan mampu mengolah berbagai informasi yang berkaitan.

Ia menganalisis informasi dan mengaitkannya juga dengan kebutuhan, sikap dan perilaku yang telah dimiliki. Informasi digunakan pula untuk pemecahan masalah. Ia mampu memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi orang lain. Informasi yang ia berikan disesuaikan dengan tingkat kemampuan pihak yang juga menerima dirinya sehingga informasi itu mudah diterima dan dipahami oleh orang lain. Ia berupaya untuk memilih dan memberikan informasi yang kegunaannya dirasakan oleh penerima informasi, serta mampu membantu orang lain dalam hal mengolah dan mengembangkan juga informasi tersebut bagi kepentingan kehidupannya. Ia memiliki dan mencari informasi dari berbagai sumber baik media cetak maupun media elektronik, serta mengolah, memformulasikannya menjadi informasi yang berguna bagi diri dan lingkungan Orang yang dewasa.

5. Perubahan ke arah pemilikan kecakapan lebih tinggi

Seseorang yang belum dewasa mempunyai kecakapan terbatas dalam menggunakan pengetahuan atau keterampilan yang dimilikinya. Ia merasa puas dengan kecakapan tersebut dan malas untuk menambah atau meningkatkan akan kecakapan -kecakupannya. Apabila muncul penemuan dan perkembangan baru yang berkaitan dengan kecakupannya dituntut untuk menyesuaikan kecakapan yang dikuasainya ia cenderung untuk menolak hal-hal yang baru. Ia merasa cukup dengan kecakapan yang telah diperoleh.

Orang yang dewasa selalu berupaya untuk meningkatkan atau memperluas kecakupannya. Upaya yang ia lakukan adalah belajar melalui pendidikan formal, nonformal dan/atau informal. Orang yang dewasa siap untuk mengikuti, mempelajari, dan menyerap temuan baru untuk memperluas atau juga meningkatkan kecakupannya guna kemajuan kehidupan pribadi, juga berkeluarga, masyarakat, agama, bahkan bangsanya.

6. Perubahan ke arah tanggungjawab lebih luas

Kecenderungan timbulnya tanggung jawab terbatas pada seseorang yang belum dewasa dipengaruhi antara lain oleh pengalaman masa kanak-kanak dan kondisi lingkungan. Contoh, kondisi lingkungan adalah pandangan orang tua terhadap anak-anak dalam keluarga, pandangan guru terhadap murid dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, pandangan pimpinan terhadap stafnya dalam lingkungan, dan pandangan seseorang dalam kehidupan berkelompok atau berorganisasi.

Pandangan itu menunjukkan situasi keterbatasan tanggung jawab yang dialami oleh seseorang. Dalam situasi demikian, orang tua sering menganggap bahwa anak-anak mempunyai tanggung jawab lebih sempit dalam kehidupan keluarga. Berdasarkan anggapan ini anak-anak dipersiapkan dan diarahkan untuk memikul tanggung jawab yang terbatas sebagaimana dikehendaki orang tuanya. Sebagai seorang guru dalam pendidikan formal sering beranggapan bahwa tanggung jawab siswa ialah untuk menerima pelajaran yang diberikan guru. Peranan guru menjadi sangat dominan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan materi, metoda, teknik dan sumber belajar yang harus diikuti siswa.

Hasil keputusan guru menentukan peranan tanggung jawab peserta didik berdasarkan pandangan guru. Dalam pengambilan keputusan, guru tidak memperhatikan perbedaan peserta dalam perkembangan kecakapan, minat, kebutuhan belajar, latar belakang sosial ekonomi, dan lingkungannya. Seorang pimpinan suatu organisasi atau perusahaan menetapkan tanggung jawab yang harus dipikul oleh staf atau karyawannya juga berdasarkan peraturan yang berlaku di lembaganya masing-masing. Proses penetapan tanggung jawab itu kadang dilakukan tanpa telah mempertimbangkan perbedaan kemampuan dan pengalaman orang yang diberi tanggung jawab.

Pihak yang menetapkan suatu tanggung jawab yang dipikul orang lain didasarkan atas anggapan pihak pengambil keputusan bahwa orang lain mempunyai tanggung jawab tertentu sesuai keputusan pihak yang menetapkannya.

Dalam kehidupan modern terdapat kecenderungan bahwa seseorang yang mempunyai tanggung jawab terbatas tidak akan mampu memecahkan masalah secara tuntas. Kehidupan masyarakat makin maju menuntut bahwa setiap orang tidak terpaku oleh peran, tugas, atau tanggung jawab yang terbatas. Sebaliknya ia harus memiliki tanggung jawab yang lebih luas, dapat menembus dinding pembatas spesialisasi, dan memahami kaitan antara tanggung jawab spesialisnya dengan spesialisasi lain.

Kelancaran dan keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hubungan dengan tugas-tugas terkait yang dilakukan oleh orang lain. Adanya pemahaman terhadap tanggung jawab yang luas dapat mendorong seseorang untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak lain yang mempunyai tugas terkait tersebut. Manfaat kerjasama antara lain adalah untuk meningkatkan terwujudnya kegiatan secara terpadu, holistik, utuh, dan interdisiplin.

7. Perubahan ke arah pemilikan minat beragam

Minat merupakan aspek afektif setiap orang sehingga menjadi tertarik, mau, atau menyenangkan suatu benda, peristiwa atau kegiatan. Pada masa kanak-kanak minat ini berkembang dalam pergaulan bersama teman atau kelompok sebaya. Minat yang berkembang pada masa dewasa merupakan perluasan minat pada masa kanak-kanak. Faktor internal dan eksternal yang mendorong perkembangan minat akan berkaitan erat dengan dimensi-dimensi orang mendewasa.

Perkembangan minat terjadi antara lain melalui kegiatan bekerjasama dengan orang lain atau melalui pengenalan hal-hal baru yang terjadi dalam lingkungannya. Bagi orang yang mendewasa, kegiatan bersama dapat memperluas minat yang telah ada pada dirinya. Kegiatan bersama menuntut adanya minat yang beragam. Untuk menanggapi hal-hal yang baru maka seseorang perlu memiliki berbagai minat. Minat dapat dikembangkan melalui kegiatan yang berkaitan dengan berbagai aspek perubahan dalam lingkungan.

8. Perubahan ke arah memperhatikan orang lain

Sikap mementingkan diri sendiri pada orang yang belum mendewasa tumbuh sejak masa kanak-kanak, memperhatikan kepentingan akan dirinya, la menganggap bahwa lingkungan sekitar harus memenuhi kepentingan dirinya. Dirinya dianggap sebagai titik pusat perhatian dari lingkungannya.

Orang yang dewasa mulai memperhatikan orang lain. Ia tidak hanya berorientasi pada diri sendiri melainkan sikap dan perilaku memperhatikan dunia sekitar. Adanya hubungan dan kerjasama mulai dianggap penting, serta keinginan dan perilaku membantu dan menolong orang lain mulai berkembang.

Dalam hal mengembangkan sikap untuk memperhatikan orang lain, pendidikan perlu mengkondisikannya lingkungan belajar untuk selalu memupuk kerjasama melalui proses pembelajaran berpartisipasi peserta didik. Sikap dan perilaku untuk membantu orang lain menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam setiap pembelajaran. Pada diri orang yang mendewasa tumbuh sikap bahwa dengan memperhatikan orang lain akan sekaligus terus memperhatikan kepentingan dirinya sendiri. Seseorang yang memperhatikan kepentingan orang lain akan tumbuh sikap bahwa dirinya perlu lebih banyak memberikan manfaat bagi lingkungan dibandingkan dengan yang diterima dari lingkungan.

9. Perubahan ke arah menerima kenyataan diri

Pada orang yang belum dewasa terdapat kesan bahwa dirinya seolah-olah seorang raja yang sedang bertahta di atas singgasana. Ia menganggap

lingkungan sekitar harus tunduk pada keinginan dirinya dan memberikan kepuasan pada dirinya.

Orang yang dewasa mulai menyadari bahwa sikap mementingkan diri sendiri tidak memperoleh respons positif dari lingkungan. Bersuara gaduh, selalu ikut campur tangan terhadap urusan orang lain, tidak berlaku sopan, dan lain sebagainya merupakan perilaku yang juga tidak memperoleh tanggapan baik dari orang lain tersebut. Tanggapan negatif dari lingkungannya dapat mengubah sikap kekaguman yang berlebihan terhadap dirinya dan mengarah pada penolakan terhadap sikap dirinya yang tidak memperoleh respons positif dari orang lain.

Orang yang mendewasa akan bersikap menerima kenyataan diri secara rasional. Ia mengerti dirinya memiliki potensi untuk berkembang, dan dapat diterima orang lain. Penerimaan terhadap kenyataan diri mengandung makna bahwa seseorang mampu menyadari potensi dirinya dan menggunakannya untuk kemajuan yang lebih baik diri dan lingkungannya sehingga ia dapat diakui dan dihargai oleh orang lain.

Sikap untuk menerima kenyataan diri mengakibatkan seseorang dapat menerima, mengakui dan menghargai keberadaan orang lain. Akibatnya, akan tumbuh sikap saling menerima, dan saling menghormati perbedaan serta tumbuh sikap tenggang rasa dalam kehidupan berkelompok, kesetiakawanan dan juga dalam bermasyarakat.

10. Perubahan ke arah integritas

Perubahan identitas diri, sebagaimana dikemukakan oleh Erickson (1950), melalui tahapan perkembangan yang meliputi:

- a. Pertumbuhan fisik yang disertai perkembangan sikap percaya atau tidak percaya terhadap sesuatu;
- b. Pertumbuhan sendi yang bersamaan perkembangan keinginan dan rasa malu;
- c. Pertumbuhan alat vital yang disertai perkembangan inisiatif untuk melakukan kegiatan, dan tumbuhnya rasa bersalah apabila melakukan pelanggaran;
- d. Pertumbuhan potensi untuk berkembang disertai dengan dorongan untuk beraktivitas dan upaya untuk mengatasi rasa rendah diri;
- e. Pertumbuhan usia muda yang bersamaan dengan perkembangan hasrat dan upaya menjalin keakraban bersama orang lain, serta menghindarkan diri dari isolasi orang lain;
- f. Perkembangan masa remaja yang disertai dengan peningkatan upaya untuk menghindari peranan dan penampilan diri yang tidak disenangi orang lain dan masyarakat;

- g. Perkembangan masa dewasa yang disertai dengan perluasan orientasi ke dunia luar, dorongan untuk maju dan untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat kemajuan hidupnya;
- h. Perkembangan integritas diri yang bersamaan dengan meningkatnya upaya untuk menghindarkan diri dari kepribadian yang terpecah.

Pada umumnya satu tahapan yang telah dicapai seseorang merupakan langkah lanjutan dari tahapan yang telah dicapai sebelumnya. Perkembangan dari satu tahapan ke tahapan berikutnya tidak dapat dipisahkan melalui batas-batas yang tegas. Tahapan tersebut lebih bercorak perubahan yang bersifat gradual.

Tahapan ke perkembangan identitas diri yang telah dikemukakan oleh Erickson menunjukkan arah perubahan sikap dari yang belum dewasa yaitu: *"Saya tidak tahu siapa soya"* ke arah sikap yang dewasa yaitu *"Saya mengerti dan mengakui siapa soya"*. Perubahan yang disebut terakhir memberi makna bahwa seseorang yang mendewasa memahami potensi dirinya dan akan berupaya menggunakan potensi dirinya itu untuk melakukan kegiatan positif, kreatif, inovatif dan bermanfaat bagi lingkungannya.

11. Perubahan ke arah berpikir prinsip

Seseorang yang belum dewasa sering memperhatikan sesuatu yang dianggap unik. Setiap keadaan atau peristiwa dianggap berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan keadaan atau peristiwa lain.

Orang yang dewasa, apabila disertai dengan kegiatan belajar yang tepat, pikirannya akan berkembang untuk menemukan prinsip-prinsip dalam sesuatu yang dihadapinya. Penemuan prinsip-prinsip didorong oleh perkembangan kemampuan dalam melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Pandangannya akan lebih menyeluruh dan ia dapat mengaitkan sesuatu hal dengan hal lain berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditemukan sebelumnya.

Pada diri seseorang yang berpikir atas dasar prinsip akan lahir proses penalaran terhadap dirinya, yang pada gilirannya ia akan mampu berpikir kreatif dan inovatif dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Ia akan mengenali masalah atau peristiwa yang terjadi dengan menggunakan pengetahuan, pengalaman, dan keyakinan serta akan dapat menetapkan dan melaksanakan tindakan yang tepat untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan.

12. Perubahan ke pandangan mendalam

Orang yang belum dewasa memiliki pandangan bahwa setiap kenyataan diharapkan dapat menyenangkan dirinya. Kesulitan, kesusahan, kerugian, dan bahaya tidak perlu ada dalam setiap kehidupan

karena keadaan bertentangan dengan kesenangan. Segala penyebab ketidaksesuaian berada di luar kenyataan yang diharapkan. Oleh karena itu pandangan mereka mendatar, bukan mendalam. Pandangan ini muncul karena hal-hal yang menyenangkan saja yang harus ada dalam kehidupan. Dalam proses mendewasa, sejalan dengan pertumbuhan fisik, akan terjadi perubahan pandangan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi.

Suatu peristiwa dipandang mempunyai kaitan dengan peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Proses perubahan pandangan itu timbul apabila lingkungan dapat memberikan dukungan kuat terhadap berkembangnya pikiran yang positif.

Apabila dalam proses dewasa seseorang berada dalam lingkungan yang kondusif untuk berpikir positif maka ia akan lebih tanggap terhadap masalah dan peristiwa yang terjadi di masa lalu dan masa sekarang, serta akan mengaitkannya dengan masalah dan peristiwa yang dapat, mungkin, atau diharapkan terjadi pada masa yang akan datang. Namun, proses berpikir demikian kadang terhambat oleh "*paksaan sosial*" yang ada di masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, seseorang sering tidak dapat mengembangkan pikirannya secara optimal karena seolah-olah "dipaksa" oleh lingkungan untuk memandang sesuatu dengan cara yang biasa dilakukan dalam masyarakat. Oleh karena itu kegiatan berpikir bebas dan luas jarang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang diliputi oleh situasi "*paksaan*".

Untuk itu mengembangkan kemampuan dan cara berpikir maka pendidikan hendaknya melaksanakannya pembelajaran yang dapat membantu peserta didik melakukan "*praxis*" dalam berpikir dan bertindak terhadap dunia kehidupannya. *Praxis* ini, menurut *Freire*, mencakup daur kegiatan yaitu *refleksi*, *aksi*, dan *refleksi kembali*. Refleksi ialah kegiatan memikirkan dan menanggapi suatu masalah serta menemukan pemecahannya.

Aksi adalah pelaksanaan pemecahan masalah. Sedangkan refleksi kembali mencakup upaya pemikiran lanjutan terhadap proses, hasil dan dampak tindakan yang telah dilakukan, serta terhadap permasalahan yang mungkin timbul kemudian.

13. Perubahan ke arah sikap dan perilaku berinovasi

Bagi orang belum dewasa kegiatan belajar yang dianggap efektif adalah dengan cara peniruan (*imitation*) terhadap perilaku guru. Proses penerimaan informasi dan cara melakukan suatu perbuatan dilakukan melalui proses peniruan tersebut.

Menjelang usia dewasa peniruan ini sering dijadikan cara untuk mempelajari sesuatu yang dianggap baru. Alasannya ialah bahwa peniruan telah menjadi cara lama yang telah digunakan dalam kehidupan di masyarakat. Peniruan sering dianggap sebagai cara yang paling baik dalam kegiatan belajar. Anggapan inilah yang sering dijadikan pertimbangan oleh para pendidik dalam merancang program pendidikan formal untuk mentransfer (memindahkan) pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari pendidik kepada peserta didik melalui peniruan.

Akibat yang ditimbulkan peniruan adalah kecenderungan terhambatnya akan kemampuan peserta didik untuk dewasa, yaitu untuk mencari dan mengembangkan cara-cara baru yang tepat dalam memenuhi kebutuhannya. Adapun orang yang dewasa, ia memiliki motivasi yang tinggi dan merasa bangga untuk menemukan sesuatu yang baru. Ia memiliki rasa percaya pada kemampuan dirinya dan menganggap bahwa dirinya dapat menemukan sesuatu yang baru. Ia dapat berinovasi untuk memenuhi kebutuhan atau untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Pendekatan yang sering digunakan untuk berinovasi adalah dengan mengkaji upaya atau kegiatan orang lain yang telah dianggap berhasil baik, dan dengan menelusuri proses penemuan yang dilakukan oleh pihak lain yang telah dianggap baik. Melalui pendekatan ini seseorang akan berusaha untuk melakukan kegiatan berpikir secara kritis, kreatif, inovatif (antisipatif dan partisipatif), dan berkelanjutan untuk menemukan dan mengembangkan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi kehidupan.

14. Perubahan ke arah sikap tenggang rasa

Suatu lingkungan yang tidak kondusif bagi orang yang belum dewasa, adalah lingkungan yang cenderung memaksakan suatu keharusan untuk adanya keseragaman baik dalam perlakuan dan penampilan maupun dalam jawaban, pendapat, kegiatan, dan respons, terhadap rangsangan yang datang dari luar dirinya. Di pihak lain, orang yang dewasa mampu menggunakan lingkungan untuk mendorong kesempatan berpikir rasional dan terbuka untuk berpikir, bertanggung jawab, dan percaya pada kemampuan diri. Lingkungan masyarakat yang kondusif akan mendorong orang yang dewasa untuk menghargai pandangan yang berbeda terhadap suatu rangsangan atau masalah. Ia menyadari pentingnya menerima dan menghargai perbedaan sehingga tenggang rasa akan berkembang. Sikap tenggang rasa inilah prasyarat untuk membina kebersamaan, keselarasan dan keseimbangan dalam bermasyarakat.

15. Perubahan ke sikap rasional

Dalam kehidupan keluarga pada masyarakat tradisional sering ditemukan tingkah laku seseorang yang belum dewasa dikendalikan oleh emosi, seperti kehidupan yang lebih dimotivasi oleh adanya ganjaran dan hukuman. Malah sering hukuman lebih ditonjolkan daripada ganjaran. Hukuman sering dijadikan alat pengontrol tingkah anggota masyarakat. Salah satu akibatnya adalah reaksi terhadap hukuman sering muncul dalam sikap dan perilaku irasional dan emosional seperti, memberontak, dan menghayal. Kondisi demikian akan menghambat kemampuan seseorang mengembangkan cara berpikir rasional.

Sebaliknya, orang yang mendewasa akan mampu berpikir rasional. Ia mampu untuk memahami keadaan diri dan dapat mengendalikan dirinya. Ia pun mampu berpikir dan berbuat tanpa terlalu dikuasai perasaan. Orang yang dewasa mampu mengendalikan emosi, dapat mengembangkan berpikir diri secara rasional, dan mampu menghindarkan diri dari dominasi mayoritas, kekuatan fisik, dan tradisi yang *"kadang-kadang menghambat"* kemajuan diri dan lingkungannya.

Berdasarkan pada dimensi-dimensi dewasa sebagaimana telah dipaparkan dalam uraian di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah dan jenis dimensi yang telah dibahas itu masih mungkin untuk ditambah, diperluas, atau dikurangi sesuai dengan perkembangan diri dan kondisi lingkungan. Namun, kelima belas dimensi itu dapat dijadikan kriteria untuknya mengidentifikasi perubahan setiap orang yang belum dewasa menjadi orang yang dewasa, sebelum adanya hasil-hasil penelitian baru mengenai dimensi dewasa tersebut.
2. Dimensi dewasa dapat dijadikan masukan untuk dipertimbangkan juga dalam merencanakan program-program pendidikan yang bertujuan untuk membantu peserta didik dan anggota masyarakat agar mereka mengembangkan kemampuan dirinya untuk mendewasa. Pada dimensi-dimensi di atas dapat dijadikan indikator dalam memprediksi perkembangan orang yang mendewasa, serta perlu diwujudkan dalam proses pembelajaran secara bertahap, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip pendidikan sepanjang hayat.
3. Penerapan dimensi-dimensi dewasa dalam pendidikan dapat dilakukan melalui prinsip-prinsip di bawah ini:
 - a. Program pembelajaran hendaknya memberikan kesempatan peserta didik agar mereka mampu mengembangkan diri dalam berbagai dimensi dewasa. Sebagai misal, walaupun suatu program kegiatan pembelajaran sedang menitikberatkan pada sikap dan perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME. serta kedisiplinan

peserta didik melaksanakan pada ibadah kepada-Nya, namun juga dalam menumbuhkan pemahamannya tentang penerapan kaidah tersebut program pembelajaran dapat dirancang untuk mengembangkan berpikir secara terbuka, memupuk minat, mengembangkan pandangan yang objektif, kreatif menumbuhkan suasana demokratis, dan mengembangkan sikap tenggang rasa terhadap berbagai perbedaan dalam masyarakat.

- b. Proses pengembangan diri yang dewasa hendaknya dilakukan dengan melalui pendekatan kontinum. Pendekatan kontinum menunjukkan pada proses pengembangan yang terus berkelanjutan dengan menerapkan pendekatan pedagogi ke andragogi, atau sebaliknya. Sebagai ilustrasi, pengembangan pemahaman diri pada peserta didik yang pada mulanya menggunakan prinsip mengajar yang didominasi oleh peran pendidik yang dilanjutkan dengan menggunakan prinsip membelajarkan peserta didik. Prinsip yang disebut terakhir dapat dijabarkan melalui teknik diskusi, dialog kerja kelompok, dan lain yang mengarah pembebasan peserta didiknya dari ketergantungan kepada pendidik. Dengan prinsip ini diharapkan bahwa peserta didik dapat mengembangkan cara berpikir positif, rasional, kreativitas, dan aktivitas saling memberi dan saling menerima informasi baik antara pendidik dengan peserta didik, antar peserta didik, maupun antara peserta didik dengan lingkungannya.
- c. Proses mendewasa pada diri peserta didik akan berkembang dimulai dari tingkat perkembangan yang rendah menuju tingkat perkembangan yang lebih tinggi. Proses ini akan berlangsung selama hidup, sepanjang hayatnya. Dalam proses dewasa, peserta didik cenderung ia melakukan belajar yang berdasarkan pengalaman dan sesuai kebutuhan belajarnya. Peserta didik menerima dan ia menginterpretasi suatu pesan atau bahan belajar sesuai dengan dimensi mendewasa yang telah dialaminya yang mungkin berbeda dengan dimensi mendewasa yang dialami orang lain. Sebagai misal, program kegiatan belajar yang diikuti oleh sepuluh orang peserta didik, mempunyai tujuan mengembangkan semua dimensi dewasa. Namun, kenyataannya, pengalaman dan kebutuhan peserta didik berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam kondisi demikian program pembelajaran sebaiknya dapat dirancang setelah dengan optimal mempertimbangkan pada perbedaan pengalaman, kebutuhan belajar, dan taraf mendewasa setiap peserta didik.

- d. Program pembelajaran hendaknya berpusat pada peserta didik. Di samping program itu dirancang dengan memperhatikan kebutuhan belajar, potensi mendewasa, dan latar belakang pengalaman para peserta didik maka mereka pun dilibatkan dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Dengan demikian, pada program pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan belajar yang didasarkan atas kebutuhan belajar, pengalaman pada belajar, berpusat pada peserta didik. dan potensi-potensi mendewasa para peserta didik itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agger, B. 2006. *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan, dan Implikasinya*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Alan Cowling & Philip James. 1996. *The Essence of Personnel Management and Industrial Relations* (terj. Xavier Quentin Pranata). Yogyakarta: ANDI.
- Alutto, J.A. dan Belasco, J.A. 1973. *Patterns of teacher participation in school system decision making*. *Educational Administration Quarterly*.
- Alwasilah, A.C. (2008). *Tujuh Ayat Etnopedagogi*. Artikel dalam *Pikiran Rakyat Bandung*, 23 Januari 2008
- Archie, M. 2008. *Theories of Cultural Centeredness: Multiculturalism and Realities* (online). (<http://www.carleton.ca>, diakses tanggal 10 Oktober 2008).
- Ardhana, Wayan. 1986. *Dasar-dasar Kependidikan*. FIP IKIP. Malang.
- Audrey, dan Nicholls, S. H. 1982. *Developing a Curriculum: A Practical Guide*. London: George Allen & Unwin.
- Danim, S. 2003. *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Depdiknas. 2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Buku 1 Konsep dan Pelaksanaan*. Jakarta : Direktorat SLTP Dirjen Dikdasmen,
- Dewey, J. 2001. *Democracy and Education*. Pennsylvania: Pennsylvania State University.
- Ferris, R. W. 1990. *Renewal in Theological Education: Strategies for Change*. New York: Billy Graham Center.
- Hagen, E. E. 1962. *On the Theory of Social Change*. Homewood: The Darsey Press.
- Hansen, J. F. 1979. *Socio Cultural Perspective on Learning*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Hanson, Mark, E. *Education Administration and Organizational Behavior*: London. Allyn and Bacon, 1991. p. 13
- Hassan, F. 2004. *Pendidikan Adalah Pembudayaan Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Herskovits, M. J. 1964. *Cultural Dynamics*. New York: Alped A Kopf.
- Horton. Paul B., Chester L. Hunt. 1996. *Sosiologi*. Jakarta. Erlangga
- Hoy, W.K. Dan Miskel, C.G. 1987. *Educational Administration: Theory, Research and Practice*. New York: Random House.
- Hunt, M. P. 1975. *Foundations of Education Social and Cultural Perspectives*. New York: Hold Rinchars and Winston.
- Indrafachrudi, S. *Bagaimana Mengakrabkan Sekolah dengan Orangtua Murid dan Masyarakat*. Malang: IKIP Malang. 1994. h. 67
- Irianto, Y.B. & U.S. Saud. (2010). *Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional*. Chapter on *Manajemen Pendidikan* by Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UPI. Bandung: Alfabeta. Jakarta.

- Johnson, L. dan Lamb, A. 2000. *Critical and Creative Thinking-Bloom's Taxonomy* (online). (<http://eduscapes.com>, diakses 5 Agustus 2007).
- Johnson. Doyle Paul. 1980. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* jilid 1. Jakarta. Gramedia.
- Kartono, K. 1977. *Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Koentjaraningrat. 1974. *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Kohl, M. W. 2002. Theological Education: What Needs to Be Changed. Dalam Kohl, M. W. (Eds.), *Educating for Tomorrow: Theological Leadership for the Asian Context*. Bangalore: Saiacs Press.
- Lawang. Robert M. Z. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- LN Yusuf Syamsu; *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nurihsan Juntika, 2007, *Buku Materi Pokok Perkembangan Peserta didik*, Bandung; Sekolah Pasca Sarjana (UPI)
- Santrock, John W, *Life-Span Development*, WM, C Brown Comunication, Inc, 1995, Alih bahasa Achmad Chusairi, S.PSI, *Perkembangan Masa Hidup* Jilid I, Jakarta, Erlangga, 2002.
- Luthans,F.1981. *Organizational Behavior*. New York: McGraw-Hill Book Company, Inc.
- MacNeill, N. (2003). *Beyond Instructional Leadership: Towards Pedagogic Leadership*. Auckland: Australian Association for Research in Education
- Maisyaroh. *Manajemen Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Dalam, Imron, A., Maisyaroh, dan Burhanuddin (Eds.), *Manajemen Pendidikan: Analisis Substansi dan Aplikasinya dalam Institusi Pendidikan*. Malang: UM Press. 2003, h. 121-128
- Majid, Abd. 2006. *Mewujudkan Rumah Tangga Idaman*, dozz Publisher, Yogyakarta.
- Manan, I. 1989. *Dasar-Dasar Sosial Budaya Pendidikan*. Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud.
- Masud, A. 2008. *Umat Islam dan Permasalahannya* (online). (<http://www.mentaritimur.com>, diakses tanggal 9 November 2008).
- Mof, Yahya. 1997. Hasil Analisis terhadap Teori Konflik (Karl Marx). Makalah. Yogyakarta: Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Program Pascasarjana IKIP Yogyakarta.
- Murdock, G. P. 1965. *How Culture Changes*. New York: Mc Graw Hill. Oliva, P. F. 1992. *Developing the Curriculum*. New York: Harper Collins Publishers.
- Owens, R.G. 1981. *Organizational Behavior in Education*. 2nd Edition. Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Parker, S. R. 1990. *Sosiologi Industri*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Pidarta, M. 1997. *Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Robbins, S.P, 1982. *The Administrative Process*. 2nd Edition. New Delhi: Prentice-Hall of India.
- Rochman, N. 2007. *Islam dan Modernisasi, Tradisi Transformasi Intelektual*. Terjemahan oleh Ahsin Mohammad. 1985. Tanpa kota: Pustaka.
- Rogers. Everest M. 1988. *Sosial change and Rural Societies*. New Jersey. Prentice-Hall
- Salim, P, dan Salim, Y. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Sanaky, H. A. H. 2008. *Studi Pemikiran Pendidikan Islam Modern* (online). (<http://www.mentaritimur.com>, diakses tanggal 9 November 2008).
- Sayogyo, Pujiawati, 1985. *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta. BKKBN
- Sergiovanni, T.J. dan Carver, F.D. 1980. *The New School Executive, A Theory of Administration*. 2nd Edition. New York: Harper and Row Publishers. Sidjabat,
- B. S. 2009. *Pentingnya Inovasi dan Pengembangan Kurikulum dalam Pendidikan* (online). (<http://www.tiranus.net>, diakses 26 Desember 2009). Sindhunata.
2004. *Dilema Usaha Manusia Rasional*. Jakarta: Rajawali Press. Soekanto,
- Soerjono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali press Sudaryanto.
2007. *Pembelajaran Kemampuan Berpikir Kritis* (online). (<http://www.fk.undip.ac.id>, diakses 9 Juli 2008).
- Sudiro, M. I. 1995. *Pendidikan Agama dalam Masyarakat Modern, Seminar dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Pendidikan Agama Luar Sekolah dalam Masyarakat Modern*, Pemkot Cirebon, Cirebon, 30-31 Agustus 1995.
- Sukmadinata, N. S. 1997. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sukmayadi, D. 2004. *Cakrawala Inovasi Pendidikan: Upaya Mencari Model Inovasi*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sumantri, M. 1988. *Kurikulum dan Pengajaran*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sunartyo, N. 2006. *Membentuk Kecerdasan Anak Sejak Dini*, Think, Yogyakarta.
- Suzuki, L. A., and Ponterotto, J. G. 2008. *Hand Book of Multicultural Assessment Clinical, Psychological, and Educational Applications*. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc.
- Tilaar, A. R. 2004. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Umar Tirtarahardja dan La Sulo, 1994. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Jakarta. Putra Abardin
- Usa, M. 1991. *Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Vaizey, John. 1987. *Pendidikan Dunia Modern*. Jakarta: Binaprinindo Aksara.
- Wayan Ardhana, 1986: *Curriculum Development and Instructional Planning*. Sydney: Prentice Hall of Australia Limited.
- Wijayantiloma, Nani. *Landasan Sosiologis dan Kultur*. <http://naniwijayantiloma.blogspot.Com> 2009/9.

- Wijayantiloma, Nani. Landasan Sosiologis dan Kultur. <http://naniwijayantiloma.blogspot.Com> 2009/9.
- Wuradji. 2008. *Sosiologi Pendidikan Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologi*. Jakarta: Depdikbud.
- Zubaedi. 2005. *Pendidikan Berbasis Sekolah Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.